



LAPORAN KINERJA TA.2023
DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI

TIM PENYUSUN

Pembina

Dr. Safrizal ZA, M.Si

Ketua

Indra Gunawan, SE., MPA

Sekretaris

Mirwan Syarif, S.STP, M.A

Penanggung Jawab

Tia Audina, S.IP

Tian Nirwana, SE., MA

Chrizant Tiatira Manafe, S.M

Agustinus Pratama, ST

Suyat Wibowo, S.Kom



LAPORAN KINERJA TA.2023
DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan atas kehadiran Allah SWT, berkat rahmat dan karunianya, Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Tahun Anggaran 2023 sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2023 dapat diselesaikan.

Sebagai salah satu Unit Kerja Eselon I di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan berkewajiban melaksanakan akuntabilitas kinerja sebagai bentuk manifestasi dalam rangka mencapai visi, misi dan tujuan Kemendagri sesuai tugas dan fungsi yang disematkan.

Lapkin Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan TA.2023 disusun dengan mengamati Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selain itu pada proses penyusunannya, Lapkin Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan TA.2023 mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri 2020-2024 yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kemendagri Tahun 2020.

Selanjutnya, kami menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang terlibat dan mendukung penyusunan Lapkin Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan TA.2023. Semoga Lapkin Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan TA.2023 dapat menjadi bahan acuan atau instrumen dalam pengambilan kebijakan dan peningkatan kinerja seluruh pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan. Oleh karena itu, saran dan kritik sangat kami harapkan untuk perbaikan penyusunan di tahun selanjutnya.

Jakarta, 2024

Ttd.

Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan



LAPORAN KINERJA TA.2023
DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI

RINGKASAN EKSEKUTIF

Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan merupakan salah satu unsur pelaksana Kementerian Dalam Negeri yang mempunyai tugas dalam pembinaan administrasi kewilayahan dan bertanggung jawab kepada Menteri Dalam Negeri dan memiliki komitmen yang kuat dalam berkinerja melaksanakan program dan kegiatan sesuai RPJMN Tahun 2020 – 2024, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Renstra Kemendagri 2020 – 2024 secara konsisten, akuntabel dan berkesinambungan.

Dalam rangka mewujudkan kinerja terhadap capaian visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi, Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan berkewajiban melaksanakan pelaporan dalam Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan TA.2023 untuk memenuhi aspek Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Lapkin Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan TA.2023 ini menyajikan beberapa penjelasan capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan di Tahun 2023 pada, 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU) dan 9 (sembilan) Indikator Kinerja Program (IKP), sebagai berikut:

- A. Indikator Kinerja Utama (IKU) Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan, yaitu:
 - 1. Jumlah Daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Kategori Baik tercapai 100 Daerah dengan predikat Kategori “Sangat Baik” dan “Baik”.
 - 2. Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan tercapai nilai 40.
- B. Indikator Kinerja Program (IKP) Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan, yaitu:
 - 1. Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Bencana telah tercapai nilai 78,50 atau sebesar 120% dari target nilai >65 di tahun 2023;
 - 2. Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Trantibum telah tercapai nilai 85,36 atau sebesar 131% dari target nilai >65 di tahun 2023;
 - 3. Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Manajemen Satlinmas telah tercapai nilai 66,30 atau sebesar 102% dari target nilai >65 di tahun 2023;
 - 4. Indeks Penyelenggaraan Trantibunlinmas Sub Urusan Kebakaran telah tercapai nilai 70 atau sebesar 108% dari target nilai >65 di tahun 2023;
 - 5. Indeks Kinerja Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat telah tercapai 20 Provinsi atau sebesar 100% dari target 20 Provinsi di tahun 2023;
 - 6. Persentase Daerah yang Segmen Batas dan Pembakuan Rupabuminya Terintegrasi dengan Informasi Geospasial telah tercapai 71,79% dari target 61,48% di tahun 2023;
 - 7. Indeks Penyelenggaraan Perkotaan telah tercapai di 31 Kota dari target 10 Kota di tahun 2023;
 - 8. Persentase Daerah dengan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Yang Terintegrasi Dan Terpadu telah tercapai sebanyak 44,29% dari target 43% di tahun 2023; dan
 - 9. Indeks Kinerja Kecamatan telah tercapai sebanyak 15% atau 1092 kecamatan dari target 15% di tahun 2023.



LAPORAN KINERJA TA.2023
DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sesuai arah kebijakan strategis Kementerian Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan memiliki peran dalam pelaksanaan Bidang Pembinaan Kewilayahan dan Pembangunan Daerah yang diarahkan untuk penguatan administrasi kewilayahan, penyelenggaraan Trantibumlinmas, peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam melaksanakan koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di daerah, dan mendorong keserasian pembangunan antar daerah, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pembangunan daerah yang diperkuat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri.

Berdasarkan Permendagri No.137 Tahun 2022 pasal 193, Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan memiliki tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan administrasi kewilayahan dan bertanggung jawab kepada Menteri Dalam Negeri. Selain itu, Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan mempunyai kewajiban untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam mencapai Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran di bidang Pembinaan Administrasi Kewilayahan dengan mengamati Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka perlu dilaksanakan penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Tahun 2023.

B. TUGAS, FUNGSI, STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemendagri, Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan mempunyai tugas yaitu menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan administrasi kewilayahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Maka dalam mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Program Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan, terdapat beberapa tugas yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Ditjen Bina Adwil, sebagai berikut:



LAPORAN KINERJA TA.2023
DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI

- a. perumusan kebijakan di bidang pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas gubernur sebagai wakil pemerintah, penamaan rupa bumi dan data wilayah, penetapan perbatasan antardaerah dan perbatasan negara, kerja sama daerah, fasilitasi perselisihan pemerintahan, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, fasilitasi kecamatan, fasilitasi penyelesaian sengketa pertanahan, manajemen bencana dan kebakaran, dan pelaksanaan tugas tampung tantra sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi dan pembinaan umum pelaksanaan tugas gubernur sebagai wakil pemerintah, penamaan rupa bumi dan data wilayah, penetapan perbatasan antardaerah dan perbatasan negara, kerja sama daerah, fasilitasi perselisihan pemerintahan, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, fasilitasi kecamatan, fasilitasi penyelesaian sengketa pertanahan, manajemen bencana dan kebakaran, dan pelaksanaan tugas tampung tantra;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi penetapan kawasan khusus dan perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang ketenteraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
- e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan umum pelaksanaan tugas gubernur sebagai wakil pemerintah, penetapan perbatasan antardaerah, penetapan kawasan perkotaan, kerja sama daerah, fasilitasi perselisihan pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, fasilitasi kecamatan;
- f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang pembinaan umum pelaksanaan tugas gubernur sebagai wakil pemerintah, penamaan rupa bumi dan data wilayah, penetapan perbatasan antardaerah dan perbatasan negara, kerja sama daerah, fasilitasi perselisihan pemerintahan, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, fasilitasi kecamatan, fasilitasi penyelesaian sengketa pertanahan, manajemen bencana dan kebakaran, dan pelaksanaan tugas tampung tantra;
- g. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

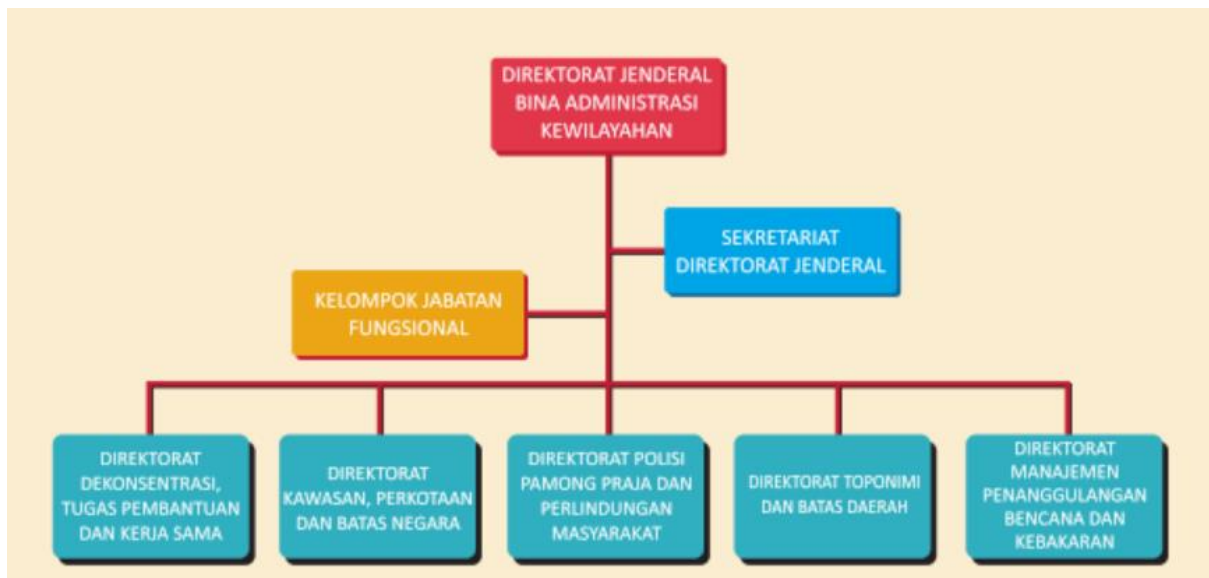


LAPORAN KINERJA TA.2023

DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi dimaksud, Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan mempunyai 6 (enam) Unit Kerja Eselon II, yang terdiri dari 1 (satu) Sekretariat Direktorat dan 5 (lima) Direktorat Teknis, dengan struktur organisasi sebagai berikut:



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan

Adapun pokok-pokok cakupan tugas dan fungsi Unit Kerja Eselon II lingkup Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan, sebagai berikut:

- melaksanakan pelayanan administratif dan teknis kepada seluruh unsur di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan;
- melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan di bidang dekonsentrasi, tugas pembantuan dan kerja sama;
- melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan di bidang kawasan, perkotaan dan batas negara;
- melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan di bidang polisi pamong praja dan perlindungan masyarakat;
- melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan di bidang toponimi dan batas antar daerah; dan
- melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan di bidang manajemen penanggulangan bencana dan kebakaran.



LAPORAN KINERJA TA.2023
DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI

C. ISU-ISU STRATEGIS

Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan mempunyai peranan strategis dalam peningkatan tata kelola penyelenggaraan administrasi kewilayahan secara nasional. Memperhatikan peran tersebut, tentunya terdapat beberapa isu strategis yang menjadi fokus utama Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi tahun 2023, sebagai berikut:

1. Asistensi Pengelolaan Perkotaan

- a. Telah diselenggarakan *Discussion Series ASEAN Smart Cities Network*: 1) *1st Discussion Topic: Industry and Innovation*; 2) *2nd Discussion Topic: Safety, Security, and Build Infrastructure*; 3) *3rd Discussion Topic: Quality Environment*; 4) *4rd Discussion Topic: Civic, Social, Health, and Well-Being*; dan 5) *The 6th ASCN Annual Meeting* yang merupakan kegiatan utama dari seluruh rangkaian kegiatan Keketuaan Indonesia pada ASCN 2023.
- b. Penerimaan penghargaan dari Badan Standarisasi Nasional (BSN) atas Indeks Maturitas Tata Kelola SPK Tahun 2023 Kepada Organisasi Pemerintah Pusat dan Daerah dalam rangka Bulan Mutu Nasional 2023 dengan Level 3 diberikan terkait telah dilaksanakannya perencanaan dan pelaksanaan penerapan SNI ISO 37122:2019 Perkotaan dan masyarakat berkelanjutan

2. Penyelesaian Batas Negara

- a. Terlaksananya Persidangan Ke-8 *Review Border Crossing Agreement (BCA)* RI-Malaysia di Kuching, Malaysia.
- b. Terlaksananya Persidangan ke-38 Jawatankuasa/Kelompok Kerja Pembangunan Sosio Ekonomi Malaysia-Indonesia (JKK/KK Sosek Malindo) adapun topik pembahasan terkait dengan sosial, kebudayaan, kerjasama ekonomi, perdagangan, perhubungan, kerjasama keselamatan dan pengurusan sempadan/perbatasan.
- c. Terlaksananya Persidangan Ke-44 *Joint Indonesia-Malaysia Boundary Committee (JIM)*, adapun kegiatan tersebut membahas terkait survei dan penegasan garis batas internasional kedua negara. Selain itu, isu yang menjadi fokus pembahasan yaitu penyelesaian *Outstanding Boundary Problems (OBP)* Sektor Timur, khususnya OBP Sungai Sinapad-Sesai yang ditargetkan penyelesaian pada bulan Juni 2024.
- d. Terlaksananya Pertemuan Ke-37 *Joint Border Committee (JBC)* RI-PNG pada tanggal 7 Desember 2023 di APEC Haus, Port Moresby, Republik Independen Papua Nugini.



LAPORAN KINERJA TA.2023
DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI

- e. Terlaksananya Persidangan Ke-4 *Joint Border Committee* (JBC) RI-RDTL. Pertemuan JBC-4 menjadi pertemuan pertama pelaksanaan kembali forum JBC setelah terhenti selama 10 (sepuluh) tahun sejak 2013.

3. Fasilitas Pembinaan Pengelolaan Kawasan Khusus

- a. Terbitnya Surat Edaran Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Nomor 400.10.11/1421/SJ Tahun 2023 tentang Pemberian Tanda Kehormatan Satya Lancana Wira Karya Bidang Pemerintahan Dalam Pengelolaan, Pengembangan Dan Pembangunan Kelautan Tahun Anggaran 2023.
- b. Terlaksananya Dukungan Kegiatan Persiapan, Pembangunan, Pemindahan serta Penyelenggaraan Kawasan Khusus Ibu Kota Nusantara dalam rangka mendorong persiapan daerah sebagai daerah-daerah penyangga (Hinterland) melalui Perpres Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibukota Nusantara (IKN).

4. Fasilitas Pembinaan Kecamatan

- a. Terlaksananya Rapat Kerja Nasional Camat (RAKERNAS) Camat dalam rangka Mendukung Tahapan Pemilu-Pilkada 2024.
- b. Terlaksananya *Training Master of Trainers* (MoT) pada program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD).

5. Fasilitas Penyelenggaraan Toponimi dan Kodifikasi Daerah

- a. Tersusunnya Surat Edaran Nomor 100.4.4.1/1234/SJ Tahun 2023 tentang Penertiban Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil.
- b. Fasilitas Kesepakatan 14 Provinsi dalam Penyelesaian Batas Kewenangan Pengelolaan Sumber Daya Alam di Laut.

6. Bantuan Pemerintah Urusan Trantibumlinmas

- a. Bantuan Pemerintah Sub Urusan Bencana sebanyak 22 unit kendaraan Roda 2 (dua) kepada 22 daerah.
- b. Bantuan peralatan Sub Urusan Penanggulangan Kebakaran, berupa 11 unit Pompa Portable beserta kelengkapannya kepada 11 daerah.
- c. Bantuan sarana dan prasarana Sub Urusan Trantibum (Satpol-PP), berupa 28 unit kendaraan roda dua kepada 28 Daerah.
- d. Bantuan sarana dan prasarana Satlinmas, berupa 400 unit Megaphone kepada 25 Daerah.



LAPORAN KINERJA TA.2023
DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI

7. Asistensi Pembinaan Pol PP dan Linmas di Daerah

- a. Terbitnya Permendagri Nomor 11 Tahun 2023 tentang Sarana dan Prasarana Bagi Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat dan Satuan Pelindungan Masyarakat.
- b. Terbitnya Kepmendagri Nomor 100.4.2.4 - 084 Tahun 2023 tentang Instrumen Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
- c. Terbitnya Kepmendagri Nomor 400.10.11 - 413 Tahun 2023 tentang Penerima Penghargaan Karya Bhakti Peduli Satuan Polisi Pamong Praja Dan Karya Bhakti Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2023.
- d. Tersusunnya Surat Edaran Nomor 400.4.4.1/2205/SJ Tahun 2023 tentang Peningkatan Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat Menghadapi Hari Raya Idul Fitri 1444 H Tahun 2023.
- e. Terlaksananya Rakornas dan Upacara Gelar Pasukan Satpol PP dan Satlinmas dengan Tema "Mewujudkan Wilayah Tertib dan Ramah Investasi melalui Satpol PP dan Satlinmas yang Profesional".
- f. Terselenggaranya Pemberian Penghargaan Karya Bhakti Peduli Satuan Polisi Pamong Praja dan Karya Bhakti Satuan Polisi Pamong Praja kepada 20 Daerah Tahun 2023.
- g. Penerimaan Penghargaan dari Polisi Negara Republik Indonesia (Polri) atas kinerja yang sangat baik dalam melaksanakan fungsi penegakan hukum terhadap Peraturan Daerah dan melaksanakan koordinasi serta bersinergi dengan Penyidik Polri Pengemban fungsi Korwas PPNS.

8. Asistensi Pembinaan Penanggulangan Kebakaran di Daerah

- a. Terbitnya Inmendagri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kesiapsiagaan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan.
- b. Terlaksananya *National Firefighter Skill Competition* (NFSC) dalam rangka peringatan HUT Damkar dan mendukung SPM Sub Urusan Kebakaran (*Response Time*) dengan peserta sebanyak 37 daerah (425 orang) dari Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- c. Terlaksananya Hari Ulang Tahun (HUT) ke 104 Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2023 dalam rangka mendukung penerapan SPM Sub Urusan Kebakaran di daerah.



LAPORAN KINERJA TA.2023
DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI

9. Asistensi Pembinaan Penanggulangan Bencana di Daerah

- a. Terbitnya Kepmendagri Nomor 100.4.3 - 826 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemenang Perhargaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Tahun 2023.
- b. Terbitnya Inmendagri 2 Tahun 2023 tentang Pengendalian Pencemaran Udara pada Wilayah Jabodetabek.
- c. Tersusunnya Surat Edaran Nomor 400.5.21/138/SJ Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Pengendalian Terhadap Zoonosis dan Penyakit Infeksius Baru di Daerah.
- d. Tersusunnya Surat Edaran Nomor 300.1.7/2133/BAK Tahun 2023 tentang Penerapan Pengkajian Cepat dalam Penanganan Keadaan Darurat Bencana di Daerah.
- e. Terlaksananya PPKM Award Tahun 2023 yang dilaksanakan oleh K/L terkait (Kemenko Marves, Kemendagri, Kemenkes) untuk menilai kinerja Provinsi, Kab/Kota dalam penanganan Covid-19 Tahun 2022.
- f. Kurun waktu Tahun 2020 - 2023 telah diterbitkan sebanyak 115 Inmendagri terkait Percepatan Penanganan dalam Penanggulangan Covid-19 sampai dengan diterbitkannya Kepres Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penetapan Berakhirnya Status Pandemi *Corona Virus Disease* 2019.



LAPORAN KINERJA TA.2023
DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIS TAHUN 2023

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 060-415 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Tahun 2020 - 2024 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, serta target kinerja dan kerangka pendanaan pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2020 - 2024, sebagai berikut:

1. Visi dan Misi Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan

Visi Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan ditujukan untuk mencapai kondisi yang ingin diwujudkan ke depan terkait pelaksanaan tugas dan fungsinya yaitu menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan administrasi kewilayahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Visi yang ditetapkan merupakan dasar dalam penyusunan program dan kegiatan strategis sesuai kondisi obyektif dalam waktu lima tahun ke depan, yaitu "Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan yang Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif dalam mewujudkan penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta tata kelola kewilayahan yang efektif dan terintegrasi untuk mendukung tercapainya visi Kementerian Dalam Negeri".

Untuk mewujudkan visi dimaksud di atas, ditetapkan misi Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, yaitu:

- a) Merumuskan regulasi yang mampu meningkatkan kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas dan kewilayahan;
- b) Meningkatkan penyelenggaraan pelayanan trantibum, pelayanan bencana dan pelayanan kebakaran dan penyelamatan yang sesuai dengan standar;
- c) Memperkuat fungsi Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP) menjadi katalisator yang mampu menjadi poros strategis dalam peningkatan hubungan pusat dan daerah melalui koordinasi, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah, menyinkronkan pengelolaan kawasan dan perkotaan, meningkatkan kerja sama daerah, mengawal penyelenggaraan pelayanan perizinan terintegrasi dan terpadu serta mengefektifkan dekonsentrasi dan tugas pembantuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daerah;



LAPORAN KINERJA TA.2023

DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

- d) Memperkuat basis data integrasi segmen batas dan pembakuan rupabumi dengan informasi geospasial, serta kinerja kecamatan selaku perangkat daerah yang bersifat kewilayahan; dan
- e) mengembangkan proses bisnis trantibumlinmas dan kewilayahan yang didukung SDM yang kompeten dan optimalisasi penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

2. Tujuan Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan

Sejalan dengan Visi dan Misi Kementerian Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan telah menetapkan tujuan yang ingin dicapai dalam periode waktu 2020-2024, sebagai berikut:

- a) Terwujudnya sistem politik yang demokratis berlandaskan nilai-nilai Pancasila (T1); dan
- b) Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi (T2).

3. Sasaran Strategis Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan

Untuk mencapai tujuan pada T1, Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan menetapkan sasaran Strategis 1 (SS 1) yakni “Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Trantibumlinmas”, dengan Indikator Kinerja Utama, yaitu:

- 1) Jumlah daerah dengan indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas kategori “baik”; dan
- 2) Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Trantibumlinmas.

Keberhasilan pencapaian Sasaran Program 1 dimaksud, diukur dengan 4 indikator kinerja program, yaitu:

- 1) Indeks penyelenggaraan trantibumlinmas sub urusan bencana;
- 2) Indeks penyelenggaraan trantibumlinmas sub urusan trantibum;
- 3) Indeks penyelenggaraan manajemen satuan perlindungan masyarakat; dan
- 4) Indeks penyelenggaraan trantibumlinmas sub-urusan kebakaran.



LAPORAN KINERJA TA.2023

DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Untuk mencapai tujuan pada T2, Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan menetapkan Sasaran Strategis 2 (SS 2) yakni “Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan kewilayahan” dengan Indikator Kinerja Utama, yaitu Indeks tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan.

Keberhasilan pencapaian Sasaran Program 2 dimaksud, diukur dengan 5 Indikator Kinerja Program, yaitu:

- 1) Jumlah Provinsi dengan indeks kinerja Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat kategori “baik”;
- 2) Persentase daerah yang segmen batasnya dan pembakuan rupabuminya terintegrasi dengan informasi geospasial;
- 3) Jumlah daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Pelayanan Perkotaan kategori “baik”;
- 4) Persentase daerah dengan pelayanan perizinan dan nonperizinan yang terintegrasi dan terpadu; dan
- 5) Persentase jumlah kecamatan dengan indeks kinerja kategori “baik”.

4. Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan

Untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan diatas, Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan menetapkan Arah Kebijakan dan Strategi Tahun 2020-2024 sebagai berikut:

- a. Kebijakan Strategis Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan untuk Sasaran Strategis Pertama “Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Trantibumlinmas” yaitu:
 - 1) Meningkatkan kualitas manajemen SDM Satpol PP daerah sehingga memiliki pola perencanaan kebutuhan/formas, pengembangan kompetensi, manajemen karir dan mampu menerapkan aturan disiplin/kode etik dalam rangka meningkatkan kinerja;
 - 2) Pemenuhan rasio PPNS dan pejabat fungsional Satpol PP pusat dan daerah sesuai standar melalui diklat, uji kompetensi dan inpassing sehingga cakupan penegakan Perda/Perkada maupun pemeliharaan trantibum lebih efektif;
 - 3) Meningkatkan ketersediaan sarpras satpol PP sesuai standar yang memperhatikan kriteria eskalasi tibumlinmas, jumlah penduduk, jumlah



LAPORAN KINERJA TA.2023
DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Perda yang ditegakkan dan luas wilayah dan diarahkan untuk pencapaian SPM;

- 4) Menekan eskalasi gangguan pelanggaran Perda/Perkada, dengan mendorong pemenuhan hak asasi manusia dan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sehingga dapat menjaga stabilitas di masyarakat;
 - 5) Meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam pemenuhan mutu layanan SPM trantibum linmas sesuai standar teknis yang ditetapkan;
 - 6) Menyusun kebijakan yang mampu meningkatkan kinerja Pol PP, Damkar, dan BPBD dalam penyelenggaraan urusan Trantibumlinmas;
 - 7) Meningkatkan penyelenggaraan perlindungan masyarakat melalui pembentukan Satgas Linmas Provinsi s.d Kecamatan, penguatan satlinmas di Kelurahan (sarpras dan kuantitas), penguatan koordinasi satlinmas di Desa, peningkatan satlinmas dalam mendukung SPM Trantibum;
 - 8) Memperkuat kesiapan dan peran Pemda dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana sehingga dapat melaksanakan kewenangan dengan tepat fungsi pada tahapan pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana; dan
 - 9) Meningkatkan layanan bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan sesuai standar.
- b. Kebijakan Strategis Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan untuk Sasaran Strategis Kedua "Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan kewilayahan" yaitu:
- 1) Meningkatkan kinerja gubernur sebagai wakil pemerintah dalam melakukan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan (korbinwas) penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan memperkuat fungsi sekretariat bersama pusat dan daerah serta menyusun dan mengawasi penerapan instrumen pelaksanaan tugas dan wewenang GWPP;
 - 2) Percepatan penyelesaian batas wilayah daerah melalui optimalisasi batasan waktu penyelesaian segmen batas sesuai dengan Permendagri 141/2017 tentang penegasan batas daerah, pelibatan pengambil kebijakan (Menteri/Eselon I K/L pada daerah/segmen batas dengan kompleksitas permasalahan yang tinggi dan pelibatan K/L, Pemda dan masyarakat untuk berkontribusi dalam penyelesaian batas daerahnya;



LAPORAN KINERJA TA.2023
DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI

- 3) Mempercepat pembakuan rupa bumi unsur buatan dan alami dengan mendorong pelibatan K/L, Pemda dan masyarakat untuk berkontribusi dalam pembakuan nama rupa bumi di daerahnya;
- 4) Meningkatkan integrasi dan transparansi dalam bentuk digitalisasi data wilayah administrasi pemerintahan dan toponimi sehingga pemangku kepentingan dan masyarakat dapat memanfaatkan data yang update dan akurat pada aspek pemerintahan, ekonomi, politik, dan sosial budaya. Selanjutnya mendorong peran Pemda agar senantiasa melakukan pemutakhiran data wilayah administrasi pemerintahan secara berjenjang berbasis elektronik, agar menghasilkan kebijakan terukur dan tepat sasaran;
- 5) Meningkatkan implementasi standar pelayanan perkotaan dengan memprioritaskan program kegiatan dan anggaran daerah yang diarahkan untuk mencapai standar pelayanan perkotaan dan mempercepat penyelesaian permasalahan perkotaan (transportasi, banjir, air minum, sampah dan limbah) melalui kerja sama daerah;
- 6) Meningkatkan manajemen pelayanan umum khususnya PTSP melalui pelaksanaan pelayanan sesuai standar dan terintegrasi secara elektronik, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengawasan internal, penyuluhan kepada masyarakat dan pelayanan konsultasi;
- 7) Memperkuat peran kecamatan sebagai perangkat daerah yang mampu mensinergikan rencana pembangunan daerah dengan pembangunan desa, membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan dan mendukung capaian SPM di wilayah kecamatan;
- 8) Mengembangkan kerjasama daerah sebagai instrumen peningkatan ekonomi dan daya saing daerah dengan memperkuat peran TKKSD dan sekretariat kerjasama dan pengintegrasian kerjasama ke dalam dokumen perencanaan daerah;
- 9) Mengembangkan wilayah dalam meningkatkan daya saing dan pertumbuhan ekonomi daerah yang selaras dan terpadu melalui penyelenggaraan dan pengelolaan kawasan khusus dan strategis nasional dengan menguatkan kapasitas Pemerintah Daerah dari aspek kebijakan (regulasi), kelembagaan dan keuangan serta SDM aparatur;
- 10) Memprioritaskan penyelesaian segmen batas antar negara melalui perundingan, survei bersama, kerjasama dibidang ekonomi, sosial dan budaya (ekososbud) serta mendorong organisasi kerjasama dengan



LAPORAN KINERJA TA.2023
DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI

negara yang berbatasan dengan laut dan memperkuat kapasitas pelayanan pemerintahan yang didukung dengan sarpras perbatasan yang memadai; dan

- 11) meningkatkan peran Pemerintahan Daerah dalam penanganan dan penyelesaian konflik pertanahan melalui pemetaan permasalahan pertanahan di daerah dan fasilitasi Pemerintahan Daerah dalam upaya penanganan masalah pertanahan.

B. PENETAPAN PERJANJIAN KINERJA ESELON I DENGAN MENTERI DALAM NEGERI TAHUN 2023

Sebagai wujud nyata komitmen pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja, dengan mempedomani Permen PAN & RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah bahwa pada tahun 2023 Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan telah menandatangani Perjanjian Kinerja kepada Menteri Dalam Negeri. Sebagaimana tertuang dalam Permendagri nomor 67 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024, terdapat 2 (dua) Sasaran Strategis dengan dukungan 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama yang diampu oleh Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2. 1
Target Indikator Kinerja Utama Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan

No	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target Semula	Target Menjadi	Keterangan
Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Trantibumlinmas				
1	Jumlah daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Kategori "Baik"	100 Daerah	100 Daerah	Tetap
2	Indeks Kepuasan Masyarakat dalam	Nilai 40	Nilai 40	Berubah



LAPORAN KINERJA TA.2023
DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI

No	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target Semula	Target Menjadi	Keterangan
	Penyelenggaraan Trantibumlinmas			
Sasaran Kegiatan 9: Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan				
3	Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan	Nilai 40	Nilai 40	Tetap

Berdasarkan Surat Plh. Sekretaris Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan nomor 000.10.1/5804/BAK tanggal 27 Oktober 2023 hal Penyampaian Usulan Perubahan Permendagri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020 – 2024. Sehubungan dengan hal tersebut Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan mengusulkan untuk menghapus Indikator Kinerja Utama Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Trantibumlinmas, hal ini dikarenakan:

1. Indeks Kepuasan Masyarakat dapat diukur ketika seluruh daerah sudah menerapkan penyelenggaraan trantibumlinmas. Target Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas berdasarkan Renstra tahun 2020-2024 yaitu 1 dokumen/ instrumen untuk tahun 2020 dan 2021, 50 Daerah dengan nilai >50 tahun 2022, 100 Daerah dengan nilai >65 tahun 2023, dan 150 Daerah dengan nilai >70 untuk tahun 2024.
2. Indeks tersebut dapat diusulkan kembali pada Renstra Kemendagri tahun 2030-2034 saat ketercapaian Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas telah mencapai nilai 100 pada proyeksi tahun 2030, dengan asumsi setiap tahunnya naik sebesar 5 poin sampai dengan nilai 100 pada tahun 2030.

Dalam mendukung ketercapaian Indikator Kinerja Utama Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan, terdapat 2 (dua) Sasaran Program dengan dukungan 9 (sembilan) Indikator Kinerja Program, yaitu:



LAPORAN KINERJA TA.2023
DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Tabel 2.2
Target Indikator Kinerja Program Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
1.	Terwujudnya manajemen bencana yang terintegrasi, pelayanan Satpol PP, Satuan Perlindungan Masyarakat, dan pelayanan Damkar sesuai standar	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Bencana	> 65
		Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Trantibum	> 65
		Indeks Penyelenggaraan Manajemen Satuan Perlindungan Masyarakat	> 65
		Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Kebakaran	> 65
2.	Meningkatnya tertib administrasi kewilayahan, penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang terintegrasi dan terpadu, kinerja Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat, serta pengelola kawasan dan perbatasan negara	Jumlah Provinsi dengan Indeks Kinerja Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Kategori "Baik"	20 Provinsi
		Persentase daerah yang segmen batasnya dan pembakuan rupa buminya terintegrasi dengan informasi geospasial	61.48%
		Jumlah Daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Pelayanan Perkotaan Kategori "Baik"	10 Kota
		Persentase daerah dengan pelayanan perizinan dan non perizinan yang terintegrasi dan terpadu	43%
		Persentase Jumlah Kecamatan dengan Indeks Kinerja Kecamatan Kategori "Baik"	15%



LAPORAN KINERJA TA.2023
DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Sebagaimana disepakati dalam Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Tahun 2023, dalam upaya mencapai 3 (tiga) sasaran program tersebut Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan didukung pendanaan yang terbagi ke 8 (delapan) jenis kegiatan. Sebagai upaya dalam pemulihan ekonomi nasional dan percepatan pelaksanaan kegiatan, Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan melakukan 13 (tiga belas) kali revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) pada tahun 2023, namun mekanisme revisi anggaran dimaksud tidak mengubah capaian kinerja kegiatan. Adapun rekapitulasi terakhir sesuai Petikan DIPA ke-13 Nomor SP DIPA-010.04.1.027486/2023 tanggal 26 Desember 2023, sebagai berikut:

Tabel 2.3
Refocusing Anggaran Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan

No.	Program / Kegiatan	Pagu Anggaran TA.2023	
		Semula	Menjadi
Total Pagu Anggaran		Rp.196.632.875.000	Rp.217.487.568.000
Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa		Rp.127.469.857.000	Rp.153.231.659.000
1.	Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat Daerah serta Kerja Sama Daerah	Rp.100.248.031.000	Rp.108.692.280.000
2.	Pembinaan Kawasan, Perkotaan, Batas Negara, Batas Wilayah, dan Toponimi	Rp.15.128.000.000	Rp.33.880.223.000
3.	Pembinaan Penyelenggaraan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Rp.11.593.826.000	Rp.10.159.156.000
4.	Pembinaan dan Pengembangan Jabatan Fungsional Trantibumlinmas	Rp. 500.000.000	Rp. 500.000.000



LAPORAN KINERJA TA.2023
DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI

No.	Program / Kegiatan	Pagu Anggaran TA.2023	
		Semula	Menjadi
	dan Kewilayahan		
Dukungan Manajemen		Rp.69.163.018.000	Rp. 64.255.909.000
1.	Layanan Legislasi dan Litigasi Bidang Administrasi Wilayah	Rp.1.500.418.000	Rp.1.500.418.000
2.	Pengelolaan Keuangan, BMN dan Umum Bidang Administrasi Wilayah	Rp.63.915.350.000	Rp.59.008.241.000
3.	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang Administrasi Wilayah	Rp.1.912.000.000	Rp.1.912.000.000
4.	Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Administrasi Wilayah	Rp.1.835.250.000	Rp.1.835.250.000



LAPORAN KINERJA TA.2023
DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI

C. METODE PERHITUNGAN INDEKS

1) Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.4.3-669 Tahun 2022 tentang Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat bahwa Jumlah Daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Kategori Baik merupakan alat pengukuran capaian penyelenggaraan urusan trantibumlinmas sebagai urusan wajib pelayanan dasar yang terdiri atas sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum, sub urusan kebakaran, dan sub urusan bencana yang diukur dari 4 (empat) Indikator Kinerja Program (IKP) sebagai komposit penilaiannya, yaitu:

- a) Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- b) Indeks Penyelenggaraan Manajemen Satlinmas;
- c) Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas sub Urusan Kebakaran; dan
- d) Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas sub Urusan Bencana.

Metode perhitungan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas dihasilkan dari penghitungan 4 (empat) tersebut. Adapun untuk membentuk Indeks Komposit dari Indeks Trantibumlinmas dilakukan dengan metode Pembobotan *Analytic Hierarchy Process* (AHP) dan diagregasikan sesuai kondisi data (Additive Aggregation Methods). Sehingga formulasi perhitungan yang digunakan adalah Additive Aggregation Method sebagai berikut:

$$IKU = \sum_{q=1}^Q w_q I_q$$

Keterangan:

IKU : Nilai Indeks Indikator Kinerja Utama (IKU) Jumlah Daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Kategori Baik

w_q : Bobot Indikator Kinerja Program ke- i

I_q : Nilai Indikator Kinerja Program ke- i



LAPORAN KINERJA TA.2023
DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Atau lebih spesifiknya rumus tersebut dapat dituliskan sebagai berikut:

$$IKU = (w_{bencana} \times I_{bencana}) + (w_{tantribum} \times I_{tantribum}) + (w_{satlinmas} \times I_{satlinmas}) + (w_{kebakaran} \times I_{kebakaran})$$

Setelah perhitungan angka indeks dilakukan menggunakan formula di atas, selanjutnya adalah melakukan kategorisasi angka indeks untuk melihat apakah capaian Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas berada pada kategori baik atau buruk. Adapun kriteria nilai indeks dikategorisasikan sebagai berikut:

- 0,00 – 25,00, kategori “Buruk”
- 25, 01 – 50,00, kategori “Cukup”
- 50,01 – 80,00, kategori “Baik”
- 80,01 – 100,00, kategori “Sangat Baik”

Tabel 2.4

Contoh Perhitungan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas

Kab/Kota	Nilai Capaian IPKKU	Nilai Capaian Satlinmas	Nilai Capaian Kebakaran	Nilai Capaian Bencana	Akumulasi Nilai Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas	Kategori
	0,25	0,25	0,25	0,25		
Kota Salatiga	90,154	81,640	68,000	88,333	82,032	Kategori Baik

Formula perhitungan yang digunakan sebagai berikut:

$$IPT = (0,2 \times 88,33) + (0,25 \times 90,15) + (0,25 \times 81,64) + (0,25 \times 68,00) = 82,032$$

Sebagai komposit dari penilaian Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas, pembobotan dan penilaian dari masing-masing komposit dijelaskan sebagai berikut:



LAPORAN KINERJA TA.2023
DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI

a) Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas sub Urusan Bencana

Tabel 2.5

Pembobotan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas sub Urusan Bencana

No	Pilar		Indikator	
1	Kelembagaan	0,15	Peran	0,05
			Bisnis Proses	0,04
			Koordinasi	0,06
2	Sumber Daya Aparatur	0,10	Penataan Aparatur	0,05
			Aparatur Teknis	0,05
3	Kebijakan	0,25	Perencanaan Kebijakan	0,10
			Implementasi Kebijakan	0,10
			Evaluasi Kebijakan	0,05
4	Pendanaan	0,15	Pendanaan APBN	0,05
			Pendanaan APBD	0,06
			Pendanaan Lain yang Sah	0,04
5	Teknis Operasional	0,15	Layanan Informasi Rawan Bencana	0,05
			Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan	0,06
			Layanan Penyelamatan dan Evakuasi	0,04
6	Kepemimpinan	0,20	Visioner	0,10
			Inovatif	0,10
TOTAL		1	TOTAL	1

Adapun formula penghitungan dari Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas sub Urusan Bencana, sebagai berikut:

$$Y(j) = \sum_{n=1}^9 a_i X_{ij}$$

Dimana:



LAPORAN KINERJA TA.2023
DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Yj : Indeks Trantibumlinmas SUB Kab/Kota
ai : Bobot masing-masing indikator
Xij : Nilai Standarisasi masing-masing indikator pada Kab/Kota

Hasil penilaian pada setiap pilar kemudian diakumulasikan dan dilakukan pengkategorian dengan standar level yang telah ditetapkan sebagai berikut:

1. Level 1 : kinerja sangat baik/sangat tinggi, *score* 91-100;
2. Level 2 : kinerja baik/tinggi, *score* 77-90,99;
3. Level 3 : kinerja menengah/cukup, *score* 50-76,99; dan
4. Level 4 : kinerja kurang baik/rendah, *score* 25-50.

b) Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas sub Urusan Trantibum

Tabel 2.6

Pembobotan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas sub Urusan Trantibum

No	Dimensi		Subdimensi	
1	Strategi	0,198	Strategi Mencapai Kinerja Satpol PP dalam Penegakan Perda	0,333
			Strategi Mencapai Kinerja Satpol PP dalam Penyelenggaraan Trantibumlinmas	0,667
2	Sumber Daya Manusia	0,49	Pemberdayaan SDM	0,5
			Peningkatan Kapasitas SDM	0,5
3	Sistem	0,312	Sarana dan Prasarana	0,25
			Perencanaan dan Anggaran	0,5
			Akuntabilitas	0,25



LAPORAN KINERJA TA.2023
DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Adapun formula penghitungan dari Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas sub Urusan Trantibum, sebagai berikut:

$$I_{PKKU} = \sum_n^l (WD^i \times WS_n^i \times S_n^i)$$

Dimana:

IPKKU : Nilai Indeks Penyelenggaraan Trantibum

WDi : Nilai Bobot pada dimensi ke-i

WSin : Nilai Bobot pada Subdimensi ke-n dimensi ke-i

Sin : Nilai rerata skala likert pada indikator di sub dimensi ke dimensi ke-i

Hasil penilaian pada setiap pilar kemudian diakumulasikan dan dilakukan pengkategorian dengan standar level yang telah ditetapkan sebagai berikut:

1. Sangat Baik, interval nilai 80,01 - 100;
2. Baik, interval nilai 60,01 - 80,00;
3. Cukup, interval nilai 40,01 - 60,00;
4. Buruk, interval nilai 20,01 - 40,00; dan
5. Sangat Buruk, dengan interval nilai 0,00 - 20,00.

c) Indeks Manajemen Satuan Perlindungan Masyarakat

Tabel 2.7

Pembobotan Indeks Manajemen Satuan Perlindungan Masyarakat

No	Dimensi	Subdimensi	Indikator Faktual	
1	Strategi	Pelaksanaan Fungsi Satlinmas (0,096)	Adanya program-kegiatan pelibatan Satlinmas dalam upaya deteksi dan cegah dini dalam menghadapi potensi rawan gangguan Trantibumlinmas	0,3326
			Adanya program-kegiatan pelibatan Satlinmas dalam	0,3337



LAPORAN KINERJA TA.2023
DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI

No	Dimensi	Subdimensi	Indikator Faktual	
			kegiatan patroli/pengawasan/pengamaman	
			Adanya data yang menunjukkan keterlibatan anggota Satlinmas dalam setiap penanganan gangguan Trantibumlinmas	0,3337
		Kebijakan Satlinmas (0,024)	Adanya SK Lurah/Kepala Desa tentang pembentukan Satlinmas	0,2615
			Adanya visi dan Misi bagian dari RPJMD yang mengarah pada fungsi Satlinmas	0,2471
			Adanya pedoman penyelenggaraan Satlinmas dalam bentuk regulasi/SOP/Juknis/Juklak yang dibuat pemerintah daerah (pemda) Kab./Kota	0,2402
			Adanya instrument periodik (bulanan/triwulan/semester) monitoring pelaksanaan program-kegiatan Satlinmas di Kab./Kota	0,2402
2	Sumber Daya Manusia	Inovasi Peningkatan Kapasitas Satlinmas (0,608)	Adanya kegiatan peningkatan kapasitas SDM bagi anggota Satlinmas di Kab./Kota	0,4811
			Adanya pemberian <i>reward</i> (penghargaan) kepada anggota Satlinmas yang berprestasi	0,5189
3	Sistem	Pemberdayaan (0,204)	Adanya data pokok jumlah anggota Satlinmas kab/kota	0,4885
			Adanya data anggota desa/kelurahan	0,5115
		Sarana dan Prasarana (0,068)	Adanya dukungan sarana dan prasarana dalam penanganan gangguan tibuntranmas, bencana dan kebakaran yang dimanfaatkan oleh Satlinmas	0,5082



LAPORAN KINERJA TA.2023
DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI

No	Dimensi	Subdimensi	Indikator Faktual	
			(baik dalam bentuk pengadaan, hibah/bantuan/ sewa/pinjam pakai dari instansi terkait)	
			Adanya bantuan/ hibah dalam pemenuhan ketersediaan sarana dan prasarana gangguan tibumtranmas, bencana dan kebakaran dari pemerintah daerah (pemda) Kab./Kota	0,4918

Adapun formula penghitungan dari Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas sub Urusan Trantibum, sebagai berikut:

$$IPM \text{ Satlinmas} = \sum_n^i ((WD^i \times WV_n^i \times S_n^i) \div k)$$

Dimana:

- IPM Satlinmas : Total Nilai Indeks
WDⁱ : Nilai pembobotan pada dimensi i
WVⁱ_n : Nilai pembobotan pada variable n dimensi i
Sⁱ_n : Nilai rerata skala likert pada indikator di variable n dimensi i
K : Jumlah skala likert yang digunakan

Hasil penilaian pada setiap pilar kemudian diakumulasikan dan dilakukan pengkategorian dengan standar level yang telah ditetapkan sebagai berikut:

1. Sangat Baik, interval nilai 80,01 - 100;
2. Baik, interval nilai 60,01 - 80,00;
3. Baik, interval nilai >60,00;
4. Cukup Baik, interval nilai 30,00 - 60,00; dan
5. Buruk, dengan interval nilai <30,00.



LAPORAN KINERJA TA.2023
DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI

d) Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas sub Urusan Kebakaran

Tabel 2.8

Pembobotan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas sub Urusan Kebakaran

No	Indikator	Pembobotan	Point	Bobot Nilai
1	Kelembagaan	Dinas Mandiri	20	20
		Bergabung dengan OPD rumpun Trantibumlinmas	15	
		Bergabung dengan OPD diluar rumpun Trantibumlinmas	5	
2	Perencanaan Anggaran	Sudah termuat di dalam RKPD	20	20
		Sudah termuat di dalam Renstra dan Renja	15	
		Sudah termuat di dalam RPJMD	5	
3	Pemenuhan Capaian SPM	>75% Capaian SPM	20	20
		50% - 75% Capaian SPM	15	
		<50% Capaian SPM	5	
4	Pemenuhan Sarana Prasarana	>75% Jumlah Pos di Kecamatan	10	10
		50%-75% Jumlah Pos di Kecamatan	5	
		<50% Jumlah Pos di Kecamatan	3	
5	Pemenuhan Tersertifikasi SDM	>50% tersertifikasi	10	10
		15% - 49% tersertifikasi	5	
		<15% tersertifikasi	3	
6	Perberdayaan Masyarakat	>75% Jumlah Pos di Kecamatan	20	20
		50%-75% Jumlah Pos di Kecamatan	15	



LAPORAN KINERJA TA.2023
DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI

No	Indikator	Pembobotan	Point	Bobot Nilai
		<50% Jumlah Pos di Kecamatan	5	
TOTAL				100

Adapun formula penghitungan dari Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas sub Urusan Trantibum, sebagai berikut:

$$IK\ 1 + IK\ 2 + IK\ 3 + IK\ 4 + IK\ 5 + IK\ 6 = \text{Total Skor}$$

- IK 1 : Kelembagaan adalah bentuk kelembagaan penyelenggara sub urusan kebakaran sesuai Permendagri 16 Tahun 2020.
- IK 2 : Perencanaan anggaran adalah termuatnya program penanggulangan kebakaran dalam dokumen perencanaan daerah.
- IK 3 : Pemenuhan capaian SPM adalah persentase pemenuhan SPM sub urusan kebakaran oleh Kab/Kota berdasarkan Permendagri 114 Tahun 2018.
- IK 4 : Pemenuhan Sarana Prasarana adalah terbentuknya pos sektor Pemadam Kebakaran di Kecamatan.
- IK 5 : Pemenuhan SDM tersertifikasi.
- IK 6 : Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya melibatkan masyarakat dalam upaya pemadaman kebakaran dan penyelamatan dengan membentuk Relawan Damkar (Redkar) di Desa/Kelurahan.

Hasil penilaian pada setiap pilar kemudian diakumulasikan dan dilakukan pengkategorian dengan standar level yang telah ditetapkan sebagai berikut:

1. Sangat Baik : Nilai 80 - 100;
2. Baik : Nilai 61 - 79;
3. Cukup : Nilai 40 - 60; dan
4. Kurang : Nilai 0 - 39.

2) Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.4.3-668 Tahun 2022 tentang Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan bahwa



LAPORAN KINERJA TA.2023
DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI

terhadap Pilar/Sektor/Variabel pada masing-masing parameter yang menjadi komposit perhitungannya dilakukan penjumlahan rata-rata dari 5 (lima) Indikator Kinerja Program yang menjadi komposit antara lain:

- Jumlah Provinsi dengan Indeks Kinerja Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat Kategori Baik;
- Persentase Daerah yang Segmen Batasnya dan Pembakuan Rupabuminya Terintegrasi dengan Informasi Geospasial;
- Jumlah Daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Pelayanan Perkotaan Kategori Baik;
- Persentase Daerah dengan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi dan Terpadu; dan
- Persentase Jumlah Kecamatan dengan Indeks Kinerja Kategori Baik.

Adapun perhitungan yang digunakan untuk menghitung angka indeks secara simultan/agregat/komposit digunakan formula *Additive Aggregation Methods* sebagai berikut:

$$ITKK \text{ per Kabupaten} = \sum_n^i W_i I_{ij}$$

Dimana:

ITKPK : Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan

W_i : Bobot masing-masing IKP

I_{ij} : Indeks IKP

Setelah perhitungan angka indeks per kabupaten dilakukan menggunakan formula di atas, selanjutnya adalah merata-ratakan nilai indeks per kabupaten untuk mengetahui apakah mencapai target yaitu nilai 20 atau tidak dengan menggunakan rumus:

$$ITKK = \frac{\text{Jumlah ITKK per Kabupaten}}{514}$$



LAPORAN KINERJA TA.2023
DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Dalam metode perhitungannya, contoh/simulasi dalam pengukuran skor IPK yang terdiri dari 5 IKP untuk sebagai berikut:

Tabel 2.9
Contoh/Simulasi dalam Pengukuran Skor Indeks Tata Kelola Kewilayahan

Kab/Kota	Nilai Capaian Indeks GWPP	Nilai Capaian Persentase segmen dan rupabumi	Nilai Capaian Indeks Perkotaan	Nilai Capaian Indeks Perizinan	Nilai Capaian Indeks Kecamatan	Akumulasi Nilai Indeks Tata Kelola Penyelenggaraa n Kewilayahan	Kategori
	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2		
Kab Aceh Barat	92,22	88,24	68,00	88,66	78,12	83,03	Kategori IKU Sangat Baik

ITKK Kab Aceh Barat = $(92,22 \times 0,2) + (88,24 \times 0,2) + (68,00 \times 0,2) + (88,66 \times 0,2) + (78,12 \times 0,2) = 83,03$

Sebagai komposit dari penilaian Indeks Tata Kelola Kewilayahan, pembobotan dan penilaian dari masing-masing komposit dijelaskan sebagai berikut:

a) Jumlah Provinsi dengan Indeks Kinerja Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat Kategori Baik

Perhitungan kinerja GWPP tidak hanya dihitung berdasarkan Nilai Indeks Kinerja GWPP berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.4.3-668 Tahun 2022 tentang Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan, melainkan dengan mempertimbangkan aspek realisasi dan pengelolaan keuangan serta koordinasi dan komunikasi Perangkat Gubernur, dengan perentase sebagai berikut:

- (1) Nilai Indeks Kinerja GWPP berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.4.3-668 Tahun 2022 tentang Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan sebesar 75%;
- (2) Realisasi dan pengelolaan keuangan dengan nilai proporsi 20%;
- (3) Koordinasi dan Komunikasi Perangkat Gubernur dengan nilai proporsi 5%.



LAPORAN KINERJA TA.2023
DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Dalam penghitungan diatas bobot Penilaian masing-masing aspek pengungkit dapat diisi bobot aspek pelaksanaan dan aspek hasil pelaporan, dengan hasil penjumlahan:

Aspek Pelaksanaan (40%) + Aspek Hasil Pelaporan (60%) = 100%

Bobot Indikator masing-masing indikator diisi dengan persentase, dengan jumlah bobot di dalam 1 aspek pengungkit = 100%. Evidence merupakan output yang dipergunakan sebagai bukti pelaksanaan kegiatan. Apabila evidence yang dihasilkan berbentuk fisik dan digital maka diberi nilai 1; Apabila evidence yang dihasilkan hanya berbentuk digital maka diberi nilai 0.75; Apabila evidence yang dihasilkan hanya berbentuk fisik maka diberi nilai 0.5; Apabila evidence yang dihasilkan tidak ada maka diberi nilai 0. Kemudian total nilai evidence didapatkan dengan hasil penjumlahan:

Bobot indikator X Nilai evidence

Jumlah nilai indikator didapatkan dari hasil penjumlahan dari total nilai evidence per masing-masing indikator. Sedangkan jumlah keseluruhan nilai indikator didapatkan melalui hasil penjumlahan dari jumlah nilai indikator seluruh indikator.

Dari nilai masing-masing tugas dan wewenang akan diakumulasikan nilai perhitungan rata-rata nilai per unit kerja, dengan rumus:

$$\text{nilai unit kerja} = \frac{x^1 + x^2 + \dots + x^n}{n}$$

Dimana:

x^1, x^2, \dots, x^n : Nilai masing-masing tugas

n : Jumlah tugas

Setelah diketahui nilai masing-masing unit kerja, maka akan diketahui nilai hasil dari kinerja gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan simulasi sebagai berikut:



LAPORAN KINERJA TA.2023
DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Tabel 2.10
Simulasi Penilaian Kinerja GWPP

No	Dimensi Nilai	Nilai
1.	Unit Kerja Pemerintahan	91,8
2.	Unit Kerja Hukum dan Organisasi	93,4
3.	Unit Kerja Keuangan	87,5
4.	Unit Kerja Perencanaan	90,0
5.	Unit Kerja Pengawasan	94,3
Jumlah		91,4
Jumlah Nilai Dimensi : $\frac{\text{Jumlah Keseluruhan Nilai Indikator}}{\text{Jumlah Indikator}}$		
Jumlah Keseluruhan Nilai Dimensi : $\frac{\text{Jumlah Nilai Dimensi}}{\text{Jumlah Dimensi}}$		

Berkenaan dengan kategori penilaian kinerja ditetapkan dalam 7 kategori, sebagai berikut:

Tabel 2.11
Kategori Predikat Penilaian Kinerja

NO	KATEGORI	NILAI/ ANGKA	PREDIKAT
1	AA	> 90	ISTIMEWA
2	A	80-90	SANGAT BAIK
3	BB	70-80	BAIK
4	B	60-70	CUKUP BAIK
5	CC	50-60	CUKUP
6	C	30-50	BURUK
7	D	0-30	SANGAT BURUK



LAPORAN KINERJA TA.2023
DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI

b) Persentase Daerah yang Segmen Batasnya dan Pembakuan Rupabuminya Terintegrasi dengan Informasi Geospasial

Perhitungan Indikator Kinerja Program (IKP) “Persentase Daerah yang Segmen Batas dan Pembakuan Rupabuminya Terintegrasi dengan informasi Geospasial” sesuai dengan Kepmendagri Nomor 100.4.3-668 Tahun 2022 tentang Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan, sebagai berikut:

- 1) Standardisasi nilai indikator dengan menggunakan z-score dan distance to scale (0 – 100); dan
- 2) Menjumlahkan hasil perkalian antara masing-masing nilai indikator yang sudah distandarisasi dengan bobot indikator, dengan rumus:

$$Y(j) = \sum_{n=1}^9 a_i X_{ij}$$

Dimana:

Y_j : Skor dimensi

a_i : bobot masing-masing indikator

X_{ij} : Nilai standarisasi masing-masing indikator pada provinsi dan kabupaten/kota

Selanjutnya, telah dilakukan perancangan pembagian bobot untuk mendapatkan persentase daerah yang segmen batas dan pembakuan rupabuminya terintegrasi dengan informasi geospasial, Adapun pembagian bobot, definisi, serta evidence nya yaitu:

1. Segmen Batas, yaitu Daerah telah selesai segmen batas secara menutup (membentuk *polygon* tertutup) yang dibuktikan dengan Permendagri;
2. Rupa Bumi, yaitu Pembaharuan Kepmendagri tentang kode data wilayah; dan
3. Terintegrasi merupakan Segmen Polygon tertutup yang sudah ditetapkan dengan Permendagri dan telah disampaikan kepada K/L terkait yang membidangi informasi geospasial.



LAPORAN KINERJA TA.2023
DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI

c) Jumlah Daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Pelayanan Perkotaan Kategori Baik

Dalam melakukan pengukuran indeks penyelenggaraan pelayanan perkotaan menggunakan Standar Nasional Indonesia (SNI) ISO 37122:2019 diadopsi dari Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 687/KEP/BSN/12/2019 tentang Penetapan Standar Nasional Indonesia *International Organization For Standardization* 37122:2019 Perkotaan dan Masyarakat Berkelanjutan – Indikator Untuk Kota Cerdas.

Tabel 2.11
Kategori Penilaian Indeks Penyelenggaraan Pelayanan Perkotaan
Kategori Baik

Nilai	Penjelasan
Sedang	Sedang berada pada tahap Konsolidasi data terkait ekosistem solusi pintar untuk layanan (M0)
Baik	Sudah terdapat Perencanaan sampai dengan Pembangunan ekosistem solusi pintar pada semua sektor untuk mendukung pengambilan keputusan, baik digunakan masyarakat atau pemerintah sesuai dengan kepentingannya (M1 s.d M2)
Sangat Baik	Ekosistem Solusi Pintar sudah beroperasi dengan baik sampai dengan penggunaan output ekosistem solusi pintar untuk peningkatan layanan perkotaan (M3 s.d M5)

d) Persentase Daerah dengan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi dan Terpadu

Sebagai bentuk dukungan Pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik khususnya di bidang Perizinan Berusaha, pemerintah telah membentuk unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang diwujudkan dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Guna mendukung penataan pelayanan Perizinan Berusaha maka kepala daerah membentuk lembaga pelayanan terpadu satu pintu seperti yang tercantum pada Pasal 350 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah



LAPORAN KINERJA TA.2023

DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

diubah pula dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Pasal 176.

Pada kegiatan penyesuaian kelembagaan PTSP daerah terhadap kebijakan penyelenggaraan perizinan berusaha terdapat 2 (dua) komponen input yaitu Penyusunan pedoman penguatan kelembagaan DPMPTSP yang memiliki output kebijakan atau pedoman yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha di Daerah dan Permendagri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

e) Persentase Jumlah Kecamatan dengan Indeks Kinerja Kategori Baik

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, salah satu perubahan yang sangat esensial yaitu menyangkut kedudukan, tugas pokok dan fungsi kecamatan yang sebelumnya merupakan perangkat daerah otonom dalam kerangka pelaksanaan asas desentralisasi, berubah perannya menjadi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kabupaten/kota yang melaksanakan urusan kewilayahan. Kecamatan yang berkedudukan sebagai perangkat daerah kabupaten/kota menyelenggarakan Tugas Atributif dan Tugas Delegatif sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Adapun tugas delegatif diberikan oleh bupati/wali kota terhadap sebagian kewenangannya untuk dapat dilaksanakan di tingkat kecamatan khususnya dalam hal pelayanan publik.

Pada tanggal 27 Desember 2022 telah diterbitkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.4.3-668 Tahun 2022 tentang Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan. Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan merupakan indeks komposit dari indeks kinerja Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat, indeks penyelenggaraan pelayanan perkotaan, dan indeks kinerja kecamatan.



LAPORAN KINERJA TA.2023
DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

IKU 1. Jumlah Daerah Dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Kategori Baik

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.4.3-669 Tahun 2022 tentang Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat bahwa Jumlah Daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Kategori Baik merupakan alat pengukuran capaian penyelenggaraan urusan trantibumlinmas sebagai urusan wajib pelayanan dasar yang terdiri atas sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum, sub urusan kebakaran, dan sub urusan bencana yang diukur dari 4 (empat) Indikator Kinerja Program (IKP) sebagai komposit penilaiannya, yaitu:

1. Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas sub urusan Ketenteraman dan ketertiban umum, dengan aspek penilaian yang meliputi Penegakan Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah, Implementasi Ketenteraman dan ketertiban umum, Akuntabilitas Kinerja, Manajemen Sumber Daya Manusia, Kualitas Pelayanan Publik
2. Indeks Penyelenggaraan Manajemen Satlinmas dengan aspek pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh kepala daerah dan kepala desa dengan aspek meliputi pembentukan satgas linmas, pembentukan satlinmas, efektivitas tugas satlinmas, pemberdayaan, pemenuhan hak anggota satlinmas.
3. Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas sub urusan kebakaran dengan aspek penilaian yang meliputi Manajemen Proteksi Kebakaran, Pencegahan Kebakaran, Manajemen Pemadaman dan penyelamatan/penanggulangan Kebakaran, Penataan dan Penguatan kelembagaan Pemadam Kebakaran, Manajemen SDM Pemadam Kebakaran, Manajemen Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran,
4. Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas sub urusan bencana dengan aspek penilaian yang meliputi Pra Bencana, Tanggap Darurat, Pasca Bencana, Manajemen SDM, Manajemen Sarana Prasarana, Layanan Kebencanaan.



LAPORAN KINERJA TA.2023
DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Tahun 2023 merupakan tahun ke-2 perhitungan nilai Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas dilakukan di 514 daerah dengan target 100 Daerah yang berkategori Baik, sehingga diperoleh hasil perhitungan, sebagai berikut:

1. 7 daerah dengan kategori sangat baik;
2. 302 daerah dengan kategori baik;
3. 205 daerah dengan kategori cukup; dan
4. 0 daerah dengan kategori buruk.

Tabel 3.1 Capaian Target IKU
Jumlah Daerah Dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Kategori Baik

	2020	2021	2022	2023	2024
Target	1 Dokumen	1 Dokumen	50 Daerah	100 Daerah	150 Daerah
Realisasi	1 Dokumen	1 Dokumen	59 Daerah	100 Daerah	
Capaian	100%	100%	118%	100%	

Pada penilaian Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Kategori Baik, terdapat daerah yang dilakukan afirmasi. Hal ini dikarenakan daerah tidak mengisi kuisioner yang telah disiapkan. Mengingat daerah telah melaksanakan kegiatan sebagaimana yang dilaporkan melalui eSPM Ditjen Bina Bangda, sehingga Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan memberikan nilai afirmasi sebesar 50.

Beberapa kegiatan strategis dalam mendukung pemenuhan data Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas yang telah ditetapkan pada Rencana Kerja Ditjen Bina Adwil Tahun 2023, yaitu:

1. Pemutakhiran data indeks penyelenggaraan trantibumlinmas sub urusan damkar;
2. Pemutakhiran data indeks penyelenggaraan trantibumlinmas sub urusan bencana;
3. Pemutakhiran data indeks penyelenggaraan trantibumlinmas sub urusan trantibum;
4. Pemutakhiran data indeks penyelenggaraan manajemen satuan perlindungan masyarakat; dan
5. Pemutakhiran Data Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas.

Adapun kegiatan pada Tahun 2023 yang mendukung ketercapaian indeks pada masing-masing indeks komposit diantaranya:

1. Peningkatan kapasitas pengintegrasian dan pengarusutamaan terkait Trantibumlinmas;



LAPORAN KINERJA TA.2023
DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI

2. Penyusunan Standardisasi Sarana Prasarana Trantibumlinmas di Daerah melalui Petunjuk Teknis pelaksanaan Bantuan Pemerintah kepada Daerah;
3. Penyerahan Bantuan Sarana dan Prasarana Dalam Rangka Implementasi Mutu Pelayanan Dasar Urusan Trantibumlinmas;
4. Pemutakhiran data layanan pencegahan dan kesiapsiagaan urusan Trantibumlinmas;
5. Meningkatkan peran Kemendagri melalui asistensi dan supervisi pelaksanaan teknis urusan trantibumlinmas di daerah;
6. Pendampingan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam urusan trantibumlinmas; dan
7. Peningkatan layanan konsultasi dan fasilitasi pembentukan OPD yang membidangi urusan trantibumlinmas di daerah.

Berdasarkan hasil perhitungan Indeks penyelenggaraan trantibumlinmas, terdapat beberapa indikator penialain Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas yang memerlukan upaya perbaikan diantaranya:

1. Indikator Pemenuhan Sarana Prasarana pada Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Kebakaran. Kondisi sarana prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan yang tidak memadai di daerah berpengaruh terhadap kinerja aparatur dalam memberikan layanan perlindungan bagi seluruh warga negara.
2. Indikator Pendanaan pada Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Bencana. Proporsi pendanaan dalam rangka Penanggulangan Bencana di daerah yang bersumber dari APBD masih rendah serta kemandirian mayoritas daerah masih kurang dalam hal pendanaan tanggap darurat karena masih mengharapkan Dana Siap Pakai (DSP) yang bersumber dari APBN.
3. Indikator Sumber Daya Manusia pada Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Trantibum. Hal ini disebabkan belum optimalnya penghitungan kebutuhan formasi jabatan fungsional, dan penghitungan/peyusunan analisi jabatan dan beban kerja pada setiap unit jabatan fungsional serta Pelaksanaan Program Peningkatan Kompetensi SDM Pol PP.
4. Indikator Kebijakan pada Indeks Penyelenggaraan Manajemen Satlinmas. Hal ini disebabkan oleh belum adanya dudukan regulasi ataupun kebijakan di daerah terkait melibatkan Satlinmas dalam mendukung penyelenggaraan urusan trantibumlinmas dan pelaksanaan pembinaan serta pengelolaan manajerial satlinmas di daerah.



LAPORAN KINERJA TA.2023

DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

IKU 2. Indeks Penyelenggaraan Tata Kelola Kewilayahan

Dalam mendukung ketercapaian Indeks Penyelenggaraan Tata Kelola Kewilayahan, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.4.3-668 Tahun 2022 tentang Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan bahwa terhadap Pilar/Sektor/Variabel pada masing-masing parameter yang menjadi komposit perhitungannya dilakukan penjumlahan rata-rata dari 5 (lima) Indikator Kinerja Program yang menjadi komposit antara lain:

1. Jumlah Provinsi dengan Indeks Kinerja Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat Kategori Baik, dengan dimensi hitung dari aspek pelaksanaan dan aspek hasil, realisasi dan pengelolaan keuangan serta koordinasi dan komunikasi perangkat GWPP.
2. Persentase Daerah yang Segmen Batasnya dan Pembakuan Rupabuminya Terintegrasi dengan Informasi Geospasial, dengan dimensi penilaian antara lain:
 - a. Segmen Batas, yaitu Daerah telah selesai segmen batas secara menutup (membentuk *polygon* tertutup) yang dibuktikan dengan Permendagri;
 - b. Rupa Bumi, yaitu Pembaharuan Kepmendagri tentang kode data wilayah; dan
 - c. Terintegrasi merupakan Segmen Polygon tertutup yang sudah ditetapkan dengan Permendagri dan telah disampaikan kepada K/L terkait yang membidangi informasi geospasial.
3. Jumlah Daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Pelayanan Perkotaan Kategori Baik, dengan bobot perhitungan berdasarkan kriteria indikator-indikator SNI ISO 37122 Perkotaan dan masyarakat berkelanjutan – Indikator untuk kota cerdas serta indikator SPM dan SPM Teknis.
4. Persentase Daerah dengan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi dan Terpadu.
5. Persentase Jumlah Kecamatan dengan Indeks Kinerja Kategori Baik.

Indeks Penyelenggaraan Tata Kelola Kewilayahan disusun untuk menunjukkan tingkat perkembangan tata kelola penyelenggaraan kewilayah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Nilai indeks mempunyai rentang 0 sampai dengan 100. Untuk memudahkan interpretasi, maka dilakukan pengelompokan wilayah menjadi 3 kategori yaitu daerah dengan ITKK kurang baik, daerah dengan ITKK baik, dan daerah dengan ITKK sangat baik.

1. ITKK kategori belum mengisi : 0
2. ITKK kategori cukup baik: 1 – 49;
3. ITKK kategori baik: dengan nilai 50 – 74; dan



LAPORAN KINERJA TA.2023
DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI

4. ITKK kategori sangat baik: 75 – 100.

Tahun 2023 merupakan tahun ke 2 perhiungan nilai Indeks Tata Kelola Kewilayahan dengan penilaian dilaksanakan kepada 514 kabupaten/kota dengan hasil penialian **rata-rata nilai Indeks Tata Kelola Kewilayan secara nasional berada pada angka 100%** dengan rincian sebagai berikut:

1. 0 Daerah dengan ITKK kategori sangat baik.
2. 140 Daerah dengan ITKK kategori baik.
3. 374 Daerah dengan ITKK kategori kurang.
4. 0 Daerah Belum mengisi.

Tabel 3.2 Capaian Target IKU
Indeks Penyelenggaraan Tata Kelola Kewilayahan

	2020	2021	2022	2023	2024
Target	1 Dokumen	1 Dokumen	Nilai 20	Nilai 40	Nilai 60
Realisasi	1 Dokumen	1 Dokumen	Nilai 26,15	Nilai 42,11	-
Capaian	100%	100%	130,75%	105%	-

Beberapa kegiatan strategis dalam mendukung pemenuhan data capaiannya yaitu:

1. Penerapan Pedoman Pengukuran Kinerja Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
2. Penyelesaian Segmen Batas;
3. Penegasan Batas Kewenangan Pengelolaan Sumber Daya Alam di Laut Daerah Provinsi dan Supervisi Kegiatan Penegasan Status Pulau;
4. Penilaian data maturasi Indeks Pelayanan Perkotaan; dan
5. Pemetaan Daerah yang Memiliki PTSP Berbasis Elektronik.



LAPORAN KINERJA TA.2023
DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI

B. CAPAIAN KINERJA INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)

IKP 1. Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub-Urusan Bencana

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota yang mana Pemerintah Daerah wajib dan bertanggungjawab menyediakan tiga jenis layanan sebagai amanat konstitusi untuk melindungi segenap warga negara dari ancaman bencana yaitu (1) Layanan Informasi Rawan Bencana, (2) Layanan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana dan (3) Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana.

Berdasarkan Kepmendagri No.100.4.3-664 Tahun 2022 tentang Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat bahwa indeks penyelenggaraan trantibumlinmas sub urusan bencana merupakan salah satu indikator komposit pendukung ketercapaian Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas. Secara pelaksanaan teknis di daerah, Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Bencana menjadi penting untuk dilakukan pengukuran mengingat salah satu upaya yang harus dilakukan dalam perbaikan kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan penanggulangan bencana adalah dengan melakukan pengukuran kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan tata kelola penanggulangan bencana berdasarkan indikator yang sudah ditentukan.

Tahun 2023 merupakan tahun kedua dilakukan pengukuran Indeks penyelenggaraan trantibumlinmas sub urusan bencana, pada tahun ini telah dilaksanakan penilaian indeks penyelenggaraan Sub Urusan Bencana kepada **182 Kabupaten/Kota**. Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan sudah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 300.1.7/4583 tanggal 25 Agustus tahun 2023 hal Pengukuran Indeks Trantibumlinmas Sub Urusan Bencana kepada seluruh Bupati/Walikota, namun tindaklanjut dari surat tersebut hanya 182 Kabupaten/Kota yang mengisi Indeks Trantibumlinmas Sub Urusan Bencana.

Berdasarkan hasil penilaian, penentuan kategori kabupaten/kota atas hasil capaian nilai Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Bencana sebagai berikut:

1. 6 (enam) Kabupaten/Kota dengan kategori Sangat Baik/Sangat Tinggi;
2. 107 (Seratus Tujuh) Kabupaten/Kota dengan kategori Baik/Tinggi;
3. 65 (Enam Puluh Lima) Kabupaten/Kota dengan kategori Menengah/Cukup; dan
4. 4 (Empat) Kabupaten/Kota dengan nilai kategori Kurang Baik/Rendah.



LAPORAN KINERJA TA.2023
DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Tabel 3.3 Capaian Target IKP
Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Bencana

	2020	2021	2022	2023	2024
Target	1 Dokumen	1 Dokumen	>60	>65	>70
Realisasi	1 Dokumen	1 Dokumen	75,81	78,50	
Capaian	100%	100%	126%	120%	

Berdasarkan hasil penialain, indikator kelembagaan menunjukkan nilai pengukuran teringgi **dikarenakan setiap pemangku kepentingan memiliki peran yang jelas dan tidak tumpang tindih serta memiliki proses bisnis yang saling terkait antar stakeholder dan saling berkoordinasi secara efektif dalam melakukan penanggulangan bencana. Namun dalam hal berkoordinasi dengan OPD lain dan Instansi Vertikal BPBD juga sering mengalami kendala jika Typologi BPBD nya B karena Kepala Pelaksananya hanya setingkat eselon III.**

Adapun Pilar Pendanaan menjadi pilar yang memiliki skor indeks **paling rendah** dalam pengukurannya **dikarenakan proporsi pendanaan dalam rangka Penanggulangan Bencana di daerah yang bersumber dari APBD masih rendah serta kemandirian mayoritas daerah masih kurang dalam hal pendanaan tanggap darurat karena masih mengharapkan Dana Siap Pakai (DSP) yang bersumber dari APBN. Selain hal tersebut kreatifitas daerah dalam mencari sumber pendanaan lain yang sah maupun sumber kegiatan lain yang sah dalam Penanggulangan bencana masih sangat minim. Penyebab rendahnya proporsi pendanaan Penanggulangan Bencana di daerah karena Kepala Daerah banyak yang belum melihat Penanggulangan Bencana sebagai skala prioritas Pembangunan di daerah, selain hal tersebut typology BPBD yang B juga memiliki pengaruh dalam mendapatkan proporsi pendanaan yang memadai.**

Adapun upaya lainnya yang akan dilakukan oleh Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan, Kemendagri pada tahun berikutnya, yaitu:

1. Melakukan Penguatan Kelembagaan BPBD melalui Revisi Permendagri No. 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja BPBD sehingga dapat mendorong BPBD memperoleh proporsi anggaran yang maksimal dalam pelaksanaan Penanggulangan Bencanan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana.
2. Mendorong Kecamatan selaku Perangkat Daerah yang berinteraksi secara langsung dengan Masyarakat untuk ikut serta membantu BPBD dalam mempercepat penerapan Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana di daerah.



LAPORAN KINERJA TA.2023
DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI

3. Melakukan Asistensi dan Supervisi penerapan Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana kepada pemerintah daerah kabupaten/kota.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja, yaitu:

1. Melakukan Revisi Permendagri No. 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja BPBD.
2. Mengimplementasikan Gerakan Kencana kepada seluruh kecamatan yang memiliki indeks risiko bencana tinggi.
3. Melakukan pendampingan kepada kabupaten/kota dalam perencanaan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana.

IKP 2. Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub-Urusan Trantibum

Menindaklanjuti amanat Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018, Kementerian Dalam Negeri telah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat. Pada Permendagri tersebut, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat (tibumtranmas) adalah upaya dan kegiatan yang diselenggarakan Satpol PP yang memungkinkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dalam situasi dan kondisi yang tenteram, tertib dan teratur sesuai dengan kewenangannya untuk penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

Pelaksanaan tugas penyelenggaraan perlindungan masyarakat akan dievaluasi menggunakan indeks tersendiri untuk mengukur efektivitas dari tugas penegakan Perda dan Perkada, serta penyelenggaraan tibumtranmas, maka hal inilah yang menjadi dasar acuan dalam penyusunan Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Trantibum) yang selanjutnya disingkat IPKKU.

Pada tahun 2023, sebagai tahun kedua dilakukannya pengukuran Indeks penyelenggaraan trantibumlinmas sub urusan trantibum telah dilaksanakan kepada 121 Kabupaten/Kota, dengan hasil penilaian sebagai berikut:

1. 46 Kabupaten/Kota dengan kategori Sangat Baik;
2. 59 Kabupaten/Kota dengan kategori Baik;
3. 16 Kabupaten/Kota dengan kategori Cukup;
4. 0 Kabupaten/Kota dengan kategori Kurang; dan
5. 0 Kabupaten/Kota dengan nilai kategori Sangat Buruk.



LAPORAN KINERJA TA.2023
DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Sehingga Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Trantibum mendapatkan capaian nilai sebesar **85,36** atau sebesar **131%** dari target nilai **>65**.

Tabel 3.4 Capaian Target IKP
Indeks Penyelenggaraan Penyelenggaraan Trantibumlinmas
Sub-Urusan Trantibum

	2020	2021	2022	2023	2024
Target	1 Dokumen	1 Dokumen	>60	>65	>70
Realisasi	1 Dokumen	1 Dokumen	75,12	85.36	
Capaian	100%	100%	125%	131%	

Dalam pengisian Indeks, **Pilar Sistem** sebagai faktor tertinggi dalam kategori Indeks Penyelenggaraan Sub Urusan Trantibum. Pilar Sistem menjadi Pilar tertinggi dalam pengukurannya dikarenakan “Adanya Dokumen Inventarisasi Sarana Prasarana dan Pendukung Kinerja Satpol PP serta Program Tibumtranmas melalui Sistem layanan aduan masyarakat terkit dengan Kinerja Satpol PP.

Adapun **Pilar SDM** menjadi Pilar yang paling rendah dalam pengisiannya, Pilar SDM menjadi Pilar terendah dalam pengukurannya dikarenakan belum optimalnya penghitungan kebutuhan formasi jabatan fungsional, dan penghitungan/penyusunan analisi jabatan dan beban kerja pada setiap unit jabatan fungsional serta Pelaksanaan Program Peningkatan Kompetensi SDM Pol PP.

Adapun upaya lainnya yang akan dilakukan oleh Kemendagri oleh Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan di tahun berikutnya, yaitu Mendorong Pemerintah daerah dalam pemberdayaan dan Peningkatan Kapasitas Pol PP melalui :

- Penghitungan Kebutuhan Serta Formasi Jabatan Fungsional dan Struktural;
- Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisa beban kerja pada setiap jabatan Fungsional dan Struktural;
- Penyusunan Standart Kompetensi Jabatan;
- Perencanaan dan Progran Peningkatan Kompetensi SDM Pol PP;



LAPORAN KINERJA TA.2023

DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Adapun dalam mendukung keberhasilan atas dampak pengukuran indeks, maka setiap daerah perlu menyiapkan regulasi penyelenggaraan trantibum dengan didukung pemetaan daerah rawan trantibum.

IKP 3. Indeks Penyelenggaraan Manajemen Satuan Perlindungan Masyarakat

Berdasarkan Kepmendagri No.100.4.3-664 Tahun 2022 tentang Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat bahwa Indeks Penyelenggaraan Manajemen Satuan Penyelenggaraan Masyarakat merupakan salah satu indikator komposit pendukung ketercapaian Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas. Secara pelaksanaan teknis di daerah, Indeks Penyelenggaraan Manajemen Satuan Penyelenggaraan Masyarakat menjadi penting untuk dilakukan pengukuran mengingat tugas dan fungsi Satlinmas sesuai peraturan perundang-undangan adalah garda terdepan dalam penyelenggaraan layanan Trantibumlinmas tingkat desa/kelurahan.

Pada tahun 2023, sebagai tahun kedua dilakukannya pengukuran Indeks Penyelenggaraan Manajemen Satuan Penyelenggaraan Masyarakat telah dilaksanakan kepada **146 Kabupaten/Kota**, dengan hasil penilaian berdasarkan kategori sebagai berikut:

1. 57 Kabupaten/Kota dengan kategori Sangat Baik;
2. 81 Kabupaten/Kota dengan kategori Baik;
3. 8 Kabupaten/Kota dengan kategori Cukup Baik;

Sehingga Indeks Penyelenggaraan Manajemen Satuan Penyelenggaraan Masyarakat mendapatkan capaian nilai sebesar **76,26 atau sebesar 102% dari target nilai >65**.

Tabel 3.5 Capaian Target IKP

Indeks Penyelenggaraan Manajemen Satuan Perlindungan Masyarakat

	2020	2021	2022	2023	2024
Target	1 Dokumen	1 Dokumen	>60	>65	>70
Realisasi	1 Dokumen	1 Dokumen	66,28	66,30	
Capaian	100%	100%	110%	102%	



LAPORAN KINERJA TA.2023 DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Adapun Pilar kebijakan menjadi Pilar yang **paling rendah** dalam pengisiannya, Pilar Kebijakan menjadi Pilar terendah dalam pengukurannya **dikarenakan beberapa faktor diantaranya:**

1. Belum menetapkan SK Satgas Linmas sebagai bentuk penguatan kelembagaan penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat (Linmas) di daerah
2. Belum termuatnya kebijakan kepala daerah terkait pelibatan Satlinmas dalam membantu penyelenggaraan urusan Trantibumlinmas sebagaimana RPJMD
3. Belum menetapkan regulasi berupa Peraturan Daerah maupun Peraturan Kepala Daerah terkait pedoman pembinaan dan pemberdayaan Satlinmas
4. Belum menyusun instrumen periodik (bulanan/triwulan/semester) monitoring pelaksanaan program-kegiatan terkait pelibatan Satlinmas dalam membantu penyelenggaraan urusan Trantibumlinmas

Adapun program/kegiatan yang menunjang keberhasilan, yaitu:

1. Menyiapkan sistem informasi pelaporan penyelenggaraan Linmas yang dimanfaatkan oleh anggota Satlinmas yaitu aplikasi SIM Linmas. Melalui aplikasi SIM Linmas, kinerja anggota Satlinmas dapat dikelola dan disajikan dengan baik. Penyajian laporan ini telah disampaikan kepada kepala daerah oleh Satpol PP, sehingga dalam kurun waktu 2022 s.d 2023 terdapat kecenderungan di daerah telah mengalokasikan anggaran untuk lebih memberdayakan dan meningkatkan kapasitas Satlinmas dalam penyelenggaraan Trantibumlinmas.
2. Menyusun peta rawan trantibumlinmas yang disampaikan kepada kepala daerah melalui Kepala Satpol PP sebagai data dukung dalam perencanaan program dan kegiatan di daerah. Dengan adanya peta rawan trantibumlinmas yang disusun oleh Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan telah memperkuat data kondisi kerawanan Trantibumlinmas di daerah.
3. Menyampaikan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 300.1/4980/BAK tanggal 19 September 2023 tentang Pengalokasian Anggaran Untuk Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana bagi Satgas Linmas dan Satlinmas di daerah.

IKP 4. Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub-Urusan Kebakaran

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.4.3-664 Tahun 2022 tentang Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat bahwa Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Kebakaran merupakan salah satu indikator komposit pendukung ketercapaian Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas. Secara pelaksanaan teknis di daerah, Indeks



LAPORAN KINERJA TA.2023

DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Kebakaran menjadi penting untuk dilakukan pengukuran sehingga tergambar secara komprehensif terkait ketangguhan suatu daerah dalam menghadapi risiko kebakaran, termasuk di dalamnya upaya pelibatan partisipasi masyarakat, kapasitas ekonomi, pemulihan pasca kebakaran, serta tata kelola pemerintahan yang baik.

Pada tahun 2023, sebagai tahun kedua dilakukannya pengukuran Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Kebakaran telah diperoleh data dari **101 Kabupaten/Kota** yang lebih lanjut dijabarkan sebagai berikut:

1. 23 Kabupaten/Kota dengan kategori Sangat Baik;
2. 57 Kabupaten/Kota dengan kategori Baik;
3. 18 Kabupaten/Kota dengan kategori Cukup Baik; dan
4. 3 Kabupaten/Kota dengan kategori Kurang.

Sehingga Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Kebakaran mendapatkan capaian nilai sebesar **70** atau sebesar **108%** dari target nilai >65.

Tabel 3.6 Capaian Target IKP

Indeks Penyelenggaraan Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub-Urusan Kebakaran

	2020	2021	2022	2023	2024
Target	1 Dokumen	1 Dokumen	>60	>65	>70
Realisasi	1 Dokumen	1 Dokumen	68,86	70	
Capaian	100%	100%	114%	108%	

Berdasarkan hasil perhitungan Indeks, **indikator kelembagaan mencapai nilai tertinggi** dalam kategori Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Kebakaran. Secara bertahap pemerintah daerah mulai menerapkan prinsip-prinsip yang diatur dalam regulasi khususnya terkait pentingnya pembentukan kelembagaan yang mandiri sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota dimana diamanatkan bahwa Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dibentuk sebagai dinas yang mandiri dan tidak digabung dengan urusan pemerintahan lainnya.



LAPORAN KINERJA TA.2023 DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Kelembagaan yang mandiri menjadi pondasi bagi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan untuk menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal dalam mengelola risiko dan ancaman kebakaran. Dengan kelembagaan yang mandiri, dinas damkar memiliki keleluasaan dalam pengambilan keputusan, fokus pada tugas pemadam kebakaran terpisah dari urusan lainnya, membuka ruang untuk mendapatkan alokasi anggaran sesuai kebutuhannya, dapat merancang program-program yang lebih efektif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pencegahan kebakaran (pemberdayaan masyarakat), mengakomodir kebutuhan pengembangan kompetensi bagi aparatur damkar, serta dapat melakukan pemeliharaan dan penyediaan sarana prasarana, yang pada akhirnya bermuara pada optimalnya pemenuhan layanan pemadam kebakaran dan penyelamatan di daerah.

Indikator **pemenuhan sarana prasarana memiliki nilai paling rendah** dalam kategori Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Kebakaran. Kondisi sarana prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan yang tidak memadai tentu sangat berpengaruh terhadap kinerja aparatur dalam memberikan layanan perlindungan bagi seluruh warga negara.

Dalam pelaksanaannya di daerah, keterbatasan anggaran/faktor kemampuan keuangan daerah menjadi kendala utama yang dilaporkan oleh kebanyakan penyelenggara sub urusan kebakaran dalam konteks penyediaan sarana prasarana pemadam kebakaran. Di samping itu, sub urusan kebakaran sebagai salah satu urusan wajib pelayanan dasar masih belum mendapatkan prioritas anggaran yang setara dengan urusan wajib pelayanan dasar lainnya.

Kurang optimalnya pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kebakaran, khususnya dalam hal penyediaan sarana prasarana menjadi tanggung jawab seluruh tingkatan pemerintahan, termasuk pemerintah pusat. Salah satu upaya/dukungan yang saat ini telah dilakukan oleh pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan sub urusan kebakaran adalah melalui hibah mobil damkar yang bersumber dari luar negeri dan juga bantuan peralatan sarana pemadam kebakaran berupa unit pompa portable kebakaran. Bantuan ini menjadi salah satu langkah strategis dalam mendukung Pemerintah Daerah meningkatkan layanan dasar di bidang kebakaran.

Adapun upaya lainnya yang akan dilakukan oleh Kemendagri oleh Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan di tahun berikutnya terkait penyelenggaraan sub urusan kebakaran yaitu:

1. Memperkuat tugas dan fungsi kelembagaan perangkat daerah yang membidangi sub urusan kebakaran melalui implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16



LAPORAN KINERJA TA.2023

DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota sehingga dapat mendorong Dinas Damkar dan Penyelamatan memperoleh proporsi anggaran yang maksimal dalam penyelenggaraan sub urusan kebakaran dan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran

2. Mendorong pemerintah daerah untuk memprioritaskan alokasi anggaran sub urusan kebakaran yang memadai baik yang bersumber dari APBD maupun dukungan sektor non pemerintah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pemenuhan prioritas anggaran untuk sub urusan kebakaran sesuai dengan SPM adalah keharusan agar pemadam kebakaran dapat berfungsi secara optimal dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
3. Penguatan kapasitas dan kompetensi aparatur damkar melalui dorongan pembentukan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran, Analis Kebakaran, P3K, serta dorongan tersertifikasinya seluruh aparatur damkar.
4. Mendorong peningkatan peran serta masyarakat melalui Percepatan Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran (REDKAR) di daerah sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 364.1-306 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran.
5. Melakukan Asistensi dan Supervisi penerapan Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran kepada pemerintah daerah kabupaten/kota.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja, yaitu:

1. Membangun kolaborasi dengan Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Ditjen Bina Keuangan Daerah, serta K/L lain terkait dalam hal memberikan pendampingan kepada kabupaten/kota untuk mengintegrasikan SPM sub urusan kebakaran ke dalam dokumen perencanaan dan anggaran pemerintah daerah.
2. Peningkatan kompetensi aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/sumber daya manusia dalam rangka pemenuhan mutu layanan SPM sub urusan kebakaran.
3. Melakukan asistensi dan supervisi kepada kabupaten/kota dalam hal Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran (REDKAR) di daerah.

IKP 5. Jumlah Provinsi dengan Indeks Kinerja Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat Kategori Baik;

Pada tahun anggaran 2023, dialokasikan anggaran Dekonsentrasi GWPP sebesar Rp.72.000.000.000,- dengan target 22 Tugas dan Wewenang GWPP, meliputi:



LAPORAN KINERJA TA.2023
DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI

1. monitoring dan evaluasi kerjasama yang dilakukan daerah Kab/kota dalam satu provinsi;
2. evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten/ Kota
3. pengawasan terhadap Perda Kab/kota;
4. koordinasi kegiatan pemerintahan dan pembangunan antara daerah provinsi dan
5. antardaerah kab/kota di wilayahnya (Melalui peningkatan daya saing wilayah berbasis kawasan dan strategis nasional);
6. Mengoordinasikan pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
7. memberikan rekomendasi kepada pemerintah pusat atas usulan DAK pada daerah kab/kota di wilayahnya;
8. mengoordinasikan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas pembantuan di daerah Kabupaten/kota;
9. monitoring, evaluasi, dan supervisi terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah kab/kota yang ada di wilayahnya (pengawasan capaian SPM);
10. mengevaluasi kinerja pelayanan publik pemerintah daerah kab/kota terkait penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan;
11. Evaluasi terhadap rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD, perubahan APBD dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
12. Menerima pertanggungjawaban bupati/wali kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum untuk diteruskan kepada Menteri;
13. Melantik bupati/wali kota;
14. Pelantikan kepala instansi vertikal dari Kementerian dan LPNK yang ditugaskan di daerah provinsi yang bersangkutan kecuali untuk kepala instansi vertikal yang melaksanakan urusan pemerintahan absolut dan kepala instansi vertikal yang dibentuk oleh kementerian yang nomenklturnya secara tegas disebutkan dalam UUD 1945;
15. Fasilitasi penyelesaian dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan antardaerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
16. evaluasi terhadap rancangan Perda kabupaten/kota tentang pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
17. evaluasi pembinaan dan pengendalian penataan perangkat daerah kabupaten/kota.
18. pemberdayaan dan memfasilitasi daerah kabupaten/kota;
19. pengendalian atas defisit APBD kabupaten/kota dengan berdasarkan batas maksimal defisit APBD dan batas maksimal jumlah kumulatif pinjaman daerah;
20. penyelarasan perencanaan pembangunan antardaerah kabupaten/kota dan antara daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota di wilayahnya;



LAPORAN KINERJA TA.2023
DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI

21. pelaksanaan evaluasi terhadap rancangan Perda kabupaten/kota tentang RPJPD dan RPJMD;
22. pelaksanaan evaluasi terhadap rancangan Perda kabupaten/kota tentang tata ruang daerah dan melakukan fasilitasi terhadap rancangan peraturan kepala daerah mengenai rencana kerja Pemerintah Daerah; dan
23. Koordinasi teknis pembangunan antara daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota dan antardaerah kabupaten/kota lingkup daerah provinsi.

Dengan mempertimbangkan alokasi anggaran yang belum ideal, maka hanya 11 tugas dan wewenang (poin 1 s.d 11) yang mendapat pendanaan secara rinci dan dalam perhitungan indeks penilaian kinerja dilihat dari aspek pelaksanaan dan aspek hasil pelaporan. Sementara 11 tugas dan wewenang lainnya, target output dicapai melalui pengimpunan laporan yang dilaksanakan oleh Sekretariat perangkat GWPP dan dalam perhitungan kinerja hanya dilihat dari aspek hasil dan pelaporan.

Pelaksanaan tugas dan wewenang GWPP melalui mekanisme Dekonsentrasi, memberikan tugas dan fungsi tambahan kepada Perangkat Gubernur *ex officio* perangkat daerah, baik dari sisi pencapaian kinerja maupun pengelolaan keuangan. Ditambah lagi, banyaknya kebijakan pengelolaan keuangan APBN yang berbeda dengan pengelolaan APBD.

Dengan pertimbangan diatas, perhitungan kinerja GWPP tidak hanya dihitung berdasarkan Nilai Indeks Kinerja GWPP berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.4.3-668 Tahun 2022 tentang Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan, melainkan dengan mempertimbangkan aspek realisasi dan pengelolaan keuangan serta koordinasi dan komunikasi Perangkat Gubernur, dengan perentase sebagai berikut:

1. Nilai Indeks Kinerja GWPP berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.4.3-668 Tahun 2022 tentang Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan sebesar 75%;
2. Realisasi dan pengelolaan keuangan dengan nilai proporsi 20%; dan
3. Koordinasi dan Komunikasi Perangkat Gubernur dengan nilai proporsi 5%.

Berdasarkan pengukuran Indeks Kinerja Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat Kategori Baik pada Tahun Anggaran 2023 telah dilaksanakan kepada 34 Provinsi, dengan hasil penilaian sebagai berikut:

1. 2 Provinsi dengan predikat Istimewa (Nilai >90);
2. 1 Provinsi dengan predikat Sangat Baik (Nilai 80 – 90);
3. 10 Provinsi dengan predikat Baik (Nilai 70 – 80);
4. 3 Provinsi dengan predikat Cukup Baik (Nilai 60 – 70);



LAPORAN KINERJA TA.2023
DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI

5. 8 Provinsi dengan predikat Cukup (Nilai 50 – 60);
6. 7 Provinsi dengan predikat Buruk (Nilai 40 – 50); dan
7. 3 Provinsi dengan predikat Sangat Buruk (0 – 30).

Tabel 3.7 Capaian Target IKP
Jumlah Provinsi dengan
Indeks Kinerja Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat Kategori Baik

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Target	*Dokumen	*Dokumen	10 Provinsi	20 Provinsi	34 Provinsi
Realisasi	*Dokumen	*Dokumen	19 Provinsi	20 Provinsi	
Capaian	100%	100%	190%	100%	

Pada tahun 2023, terhadap target Indikator Kinerja Program (IKP) Jumlah Provinsi dengan Indeks Kinerja Gubernur Sebagai Wakil Pemerintahan Pusat kategori “istimewa” sebanyak 4 Provinsi, kategori “sangat baik” sebanyak 9 Provinsi dan kategori “baik” sebanyak 7 Provinsi, sehingga total capaian provinsi dengan kategori baik-istimewa sebanyak 20 Provinsi dengan capaian sebesar 100%. Adapun capaian Nilai Indeks Kinerja GWPP pada 34 provinsi dan kategori penilaiannya sebagai berikut:

Tabel 3.8
Daftar Kinerja GWPP Per Provinsi

No	Provinsi	Nilai	Predikat
1	Provinsi Aceh	94,55	Istimewa
2	Provinsi Sumatera Utara	64,24	Cukup Baik
3	Provinsi Sumatera Barat	95,66	Istimewa
4	Provinsi Riau	88,80	Sangat Baik
5	Provinsi Kepulauan Riau	60,66	Cukup Baik
6	Provinsi Jambi	56,84	Cukup
7	Provinsi Sumatera Selatan	54,99	Cukup
8	Provinsi Bengkulu	66,62	Cukup Baik
9	Provinsi Kep. Bangka Belitung	86,50	Sangat Baik
10	Provinsi Lampung	67,6	Cukup Baik



LAPORAN KINERJA TA.2023
DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI

No	Provinsi	Nilai	Predikat
11	Provinsi DKI Jakarta	73,48	Baik
12	Provinsi Banten	56,17	Cukup
13	Provinsi Jawa Barat	99,17	Istimewa
14	Provinsi Jawa Tengah	82,37	Sangat Baik
15	Provinsi D.I Yogyakarta	83,70	Sangat Baik
16	Provinsi Jawa Timur	43,84	Buruk
17	Provinsi Bali	70,03	Baik
18	Provinsi NTB	72,84	Baik
19	Provinsi NTT	84,20	Sangat Baik
20	Provinsi Kalimantan Timur	37,09	Buruk
21	Provinsi Kalimantan Selatan	67,15	Cukup Baik
22	Provinsi Kalimantan Barat	91,51	Istimewa
23	Provinsi Kalimantan Tengah	76,93	Baik
24	Provinsi Kalimantan Utara	82,33	Sangat Baik
25	Provinsi Sulawesi Utara	83,75	Sangat Baik
26	Provinsi Sulawesi Barat	76,71	Baik
27	Provinsi Sulawesi Tengah	80,46	Sangat Baik
28	Provinsi Sulawesi Selatan	79,99	Baik
29	Provinsi Sulawesi Tenggara	63,98	Cukup Baik
30	Provinsi Gorontalo	70,41	Baik
31	Provinsi Maluku	86,40	Sangat Baik
32	Provinsi Maluku Utara	55,92	Cukup
33	Provinsi Papua	51,37	Cukup
34	Provinsi Papua Barat	41,97	Buruk

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja, yaitu:

1. Pelaksanaan Bimbingan Teknis Pelaksanaan Tugas dan Wewenang GWPP untuk masing-masing unit kerja perangkat GWPP pada awal tahun anggaran;



LAPORAN KINERJA TA.2023 DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI

2. Sosialisasi dan penampingan satker dalam penginputan evidence kinerja melalui SIPGWPP;
3. Penyampaian Surat kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat terkait dengan percepatan penyampaian evidence kinerja melalui SIPGWPP; dan
4. Pelibatan UKE I Pembina yang tergabung dalam Sekretariat Bersama Pembinaan GWPP dalam proses verifikasi dan penilaian kinerja GWPP.

IKP 6. Persentase Daerah yang Segmen Batasnya dan Pembakuan Rupabuminya Terintegrasi dengan Informasi Geospasial

Menurut UU No. 4 Tahun 2011 bahwa batas daerah menjadi salah satu IGD (Informasi Geospasial Dasar) yang keberadaannya wajib menjadi acuan bagi penyusunan IGT (Informasi Geospasial Tematik). Contoh IGT antara lain peta penataan ruang, kehutanan, pertanahan, perijinan usaha pengelolaan SDA, dll. Adapun Jumlah segmen batas daerah adalah **979 segmen, berupa 165 segmen batas antar provinsi, dan 814 segmen batas antar kabupaten/kota**. Dalam ketentuan umum PP 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Rupabumi, bahwa rupabumi adalah permukaan bumi beserta objek yang dapat dikenali identitasnya baik berupa unsur alami maupun unsur buatan. Unsur rupabumi terdiri atas unsur alami dan unsur buatan, dimana unsur alami meliputi pulau, kepulauan, gunung, pegunungan, bukit, dataran tinggi, gua, lembah, tanjung, semenanjung, danau, sungai, muara, samudera, laut, selat, teluk, unsur bawah laut, dan unsur alami lainnya. Sementara unsur buatan terdiri atas wilayah administrasi pemerintahan, objek yang dibangun, kawasan khusus dan tempat berpenduduk.

Selanjutnya, Kode dan data Wilayah Administrasi Pemerintahan merupakan identitas wilayah administrasi pemerintahan yang berfungsi sebagai instrumen pembeda antara Wilayah Administrasi Pemerintahan yang satu dengan yang lainnya. Sebagaimana terdapat dalam UU dimaksud diatas bahwa batas daerah menjadi salah satu IGD dan pemberian Kode dan WAP merupakan representasi wilayah administrasi pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten/kota, Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain, Desa atau yang disebut dengan nama lain dan Kelurahan di seluruh Indonesia, maka hal ini menunjukkan urgensi perlunya percepatan penyelesaian batas daerah bagi kejelasan dan kelangsungan kegiatan di berbagai bidang.

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.4.3-668 Tahun 2022 tentang Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan, perhitungan Indikator Kinerja Program (IKP) "Persentase Daerah yang Segmen Batas dan Pembakuan Rupabuminya Terintegrasi dengan informasi Geospasial" yaitu dengan menggunakan metode hitung sebagai berikut:



LAPORAN KINERJA TA.2023
DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI

1. Segmen Batas, yaitu Daerah telah selesai segmen batas secara menutup (membentuk *polygon* tertutup) yang dibuktikan dengan Permendagri;
2. Rupa Bumi, yaitu Pembaharuan Kepmendagri tentang kode data wilayah; dan
3. Terintegrasi merupakan Segmen Polygon tertutup yang sudah ditetapkan dengan Permendagri dan telah disampaikan kepada K/L terkait yang membidangi informasi geospasial.

Berdasarkan hasil perhitungan 514 Daerah yang Segmen Batasnya dan Pembakuan Rupabuminya Terintegrasi dengan Informasi Geospasial, didapati hasil penialain sebagai berikut:

1. 396 daerah kabupaten/kota atau 71,79% sudah terintegrasi segmen batas (polygon) dan rupabumiya dengan Geospasial
2. 145 daerah kabupaten/kota atau 28,21% belum terintegrasi segmen batas (polygon) dan rupabumiya dengan Geospasial

Tabel 3.9 Capaian Target IKP
Persentase Daerah yang Segmen Batasnya dan Pembakuan Rupabuminya
Terintegrasi dengan Informasi Geospasial

	2020	2021	2022	2023	2024
Target	*Dokumen	51,95%	58,81%	61,48%	66,34%
Realisasi	*Dokumen	71%	69,09%	71,79%	
Capaian	100%	136,67%	101,17%	116%	

Adapun jumlah kabupaten/kota yang telah segmen batas daerahnya telah polygon dan terintegrasi dengan informasi geospasial sebagai berikut:

Tabel 3.10
Data Rekapitulasi Segmen Batas (Polygon Tertutup) Kabupaten/Kota

No	Provinsi	Jumlah Kab/Kota	Sudah Polygon	Belum Polygon
1	Provinsi Aceh	23	23	-
2	Provinsi Sumatera Utara	33	24	4
3	Provinsi Sumatera Barat	19	15	4
4	Provinsi Riau	12	6	6



LAPORAN KINERJA TA.2023
DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI

No	Provinsi	Jumlah Kab/Kota	Sudah Polygon	Belum Polygon
5	Provinsi Kepulauan Riau	7	7	-
6	Provinsi Jambi	11	7	4
7	Provinsi Sumatera Selatan	17	11	6
8	Provinsi Bengkulu	10	10	-
9	Provinsi Kep. Bangka Belitung	7	7	-
10	Provinsi Lampung	15	11	4
11	Provinsi DKI Jakarta	6	-	6
12	Provinsi Banten	8	8	-
13	Provinsi Jawa Barat	27	27	-
14	Provinsi Jawa Tengah	35	35	-
15	Provinsi D.I Yogyakarta	5	5	-
16	Provinsi Jawa Timur	38	36	2
17	Provinsi Bali	9	9	-
18	Provinsi NTB	10	8	2
19	Provinsi NTT	22	22	-
20	Provinsi Kalimantan Timur	10	3	7
21	Provinsi Kalimantan Selatan	13	7	6
22	Provinsi Kalimantan Barat	14	5	9
23	Provinsi Kalimantan Tengah	14	4	10
24	Provinsi Kalimantan Utara	5	1	4
25	Provinsi Sulawesi Utara	15	15	-
26	Provinsi Sulawesi Barat	6	1	5
27	Provinsi Sulawesi Tengah	13	12	1
28	Provinsi Sulawesi Selatan	24	1	23
29	Provinsi Sulawesi Tenggara	17	6	11
30	Provinsi Gorontalo	6	6	-
31	Provinsi Maluku	11	11	-



LAPORAN KINERJA TA.2023
DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI

No	Provinsi	Jumlah Kab/Kota	Sudah Polygon	Belum Polygon
32	Provinsi Maluku Utara	10	10	-
33	Provinsi Papua	9	7	2
34	Provinsi Papua Barat	7	1	6
35	Provinsi Papua Selatan	4	1	3
36	Provinsi Papua Tengah	8	4	4
37	Provinsi Papua Pegunungan	8	0	8
38	Provinsi Papua Barat Daya	6	3	3
Jumlah		514	396	145
%			71,79%	28,21%

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja, yaitu:

1. Pemutakhiran Kode Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau;
2. Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Pasca Penegasan Batas Antar Daerah;
3. Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Penegasan Batas Kecamatan dan Kelurahan Oleh Kabupaten/Kota;
4. Fasilitasi dan identifikasi wilayah administrasi pemerintahan dan pulau di wilayah perbatasan antar negara;
5. Penyusunan Rumusan Kebijakan Batas Daerah; dan
6. Pengintegrasian data wilayah administrasi pemerintahan.

Adapun upaya yang dilakukan oleh Kemendagri oleh Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan di tahun berikutnya, yaitu:

- Mendorong penetapan Permendagri batas daerah yang telah berproses penerbitannya sejak tahun 2021 (73 Ranpermendagri+55 Ranpermen menunggu izin prakarsa).
- Penyelesaian 31 segmen batas daerah yang masih belum selesai ditegaskan, di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua
- Finalisasi penyelesaian segmen batas daerah di luar 31 segmen (segmen anulir kesepakatan, revisi Permendagri batas daerah)
- Penyelesaian penegasan batas kewenangan pengelolaan SDA di Laut Provinsi, serta penyamaan persepsi rancangan dan penerbitan Permendagri



LAPORAN KINERJA TA.2023 DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI

- Supervisi penegasan batas kecamatan dan kelurahan oleh Pemkab/Pemkot
- Penyusunan pedoman Penegasan Batas Kecamatan dan Kelurahan, sosialisasi Pedoman dan fasilitasi supervise Pemkab/Pemkot dalam Penegasan Batas Kecamatan dan Kelurahan sebagai tindak lanjut pasca penegasan batas daerah oleh kabupaten/kota
- Perlu pengkajian ulang keberadaan wilayah administrasi pulau seperti identifikasi, verifikasi dan validasi bersama Kementerian/Lembaga terkait akibat dari pemekaran wilayah dan penyelesaian segmen batas daerah terkait dengan wilayah administrasi pulau.
- Perlu adanya integrasi data WAP yang diimplementasikan ke dalam pembuatan Perjanjian Kerjasama terhadap Kementerian/Lembaga terkait.
- Percepatan integrasi kode dan data wilayah administrasi pemerintahan melalui PKS dengan K/L terkait dan pembinaan pengelolaan pulau pulau kecil.
- Perlu dilakukan pemutakhiran data kependagri Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau dikarenakan adanya usulan dari Pemerintah Daerah terkait perbaikan redaksional dan usulan pemekaran.

IKP 7. Jumlah Daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Pelayanan Perkotaan Kategori Baik

Pada tahun 2023, telah dilaksanakan pengukuran Jumlah Daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Pelayanan Perkotaan Kategori Baik kepada 31 Kabupaten/Kota dengan menggunakan indikator SNI ISO 37122 Perkotaan dan Masyarakat Berkelanjutan-Indikator untuk Kota Cerdas.

Berdasarkan penentuan kategori sebagaimana perhitungan Jumlah Daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Pelayanan Perkotaan Kategori Baik di atas, dapat dijelaskan capaian Jumlah Daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Pelayanan Perkotaan Kategori Baik, sebagai berikut:

- a. 0 kota dengan Klasifikasi Tingkat Kematangan Kota tahap **Optimalisasi** dengan nilai 81%-100% (M5);
- b. 0 kota dengan Klasifikasi Tingkat Kematangan Kota tahap Kapabilitas ekosistem solusi cerdas (interoperabilitas) dengan nilai 61%-80,99% (M4);
- c. 0 kota dengan Klasifikasi Tingkat Kematangan Kota tahap Pengoperasian ekosistem solusi pintar dengan nilai 41%-60,99 (M3);
- d. 3 Kabupaten/Kota dengan Klasifikasi Tingkat Kematangan Kota tahap Pengembangan ekosistem solusi pintar dengan nilai 31%-40,99% (M2);
- e. 28 Kabupaten/Kota dengan Klasifikasi Tingkat Kematangan Kota tahap Perencanaan ekosistem solusi pintar dengan nilai 10%-30,99% (M1); dan



LAPORAN KINERJA TA.2023
DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI

- f. 0 Kabupaten/Kota dengan Klasifikasi Tingkat Kematangan Kota tahap Desk Evaluation dengan nilai 0%-9,99% (M0);

Tabel 3.11
Kategori Penilaian Indeks Penyelenggaraan Pelayanan Perkotaan Kategori Baik

Nilai	Penjelasan
Sedang	Sedang berada pada tahap Konsolidasi data terkait ekosistem solusi pintar untuk layanan (M0)
Baik	Sudah terdapat Perencanaan sampai dengan Pembangunan ekosistem solusi pintar pada semua sektor untuk mendukung pengambilan keputusan, baik digunakan masyarakat atau pemerintah sesuai dengan kepentingannya (M1 s.d M2)
Sangat Baik	Ekosistem Solusi Pintar sudah beroperasi dengan baik sampai dengan penggunaan output ekosistem solusi pintar untuk peningkatan layanan perkotaan (M3 s.d M5)

Penilaian dilakukan dengan mengacu pada verifier indikator-indikator SNI ISO 37122 Perkotaan dan masyarakat berkelanjutan – Indikator untuk kota cerdas serta indikator SPM dan SPM Teknis. Berdasarkan hasil perhitungan, didapati jumlah daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Pelayanan Perkotaan Kategori Baik sebanyak target 31 Kabupaten/Kota sebagai berikut:

Tabel 3.12 Capaian Target IKP
Jumlah Daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Pelayanan Perkotaan
Kategori Baik

	2020	2021	2022	2023	2024
Target	1 Dokumen	1 Dokumen	5 Kota	10 Kota	15 Kota
Realisasi	1 Dokumen	1 Dokumen	5 Kota	31 Kota	
Capaian	100%	100%	100%	310%	



LAPORAN KINERJA TA.2023
DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Penentuan kategori baik dimulai pada tingkat kematangan kota tahap perencanaan ekosistem solusi cerdas (M1 s.d M2) karena Kabupaten/Kota sudah mempunyai arah menuju kota cerdas pada tahap Sudah terdapat Perencanaan sampai dengan Pembangunan ekosistem solusi pintar pada semua sektor untuk mendukung pengambilan keputusan, baik digunakan masyarakat atau pemerintah sesuai dengan kepentingannya. Berikut adalah rekapitulasi tingkat maturasi perkotaan pada 31 Kabupaten/Kota yang telah ditunjuk:

Tabel 3.13
Daftar Rekapitulasi Tingkat Maturitas Perkotaan

No	Kab./Kota	Nilai	
1	Kab. Hulu Sungai Selatan	M1	15,66
2	Kota Yogyakarta	M1	12,42
3	Kota Batam	M1	10,87
4	Kota Surakarta	M1	11,3
5	Kota Semarang	M1	25,75
6	Kab. Labuhanbatu	M1	27,75
7	Kab. Indragiri Hulu	M1	11,08
8	Kab. Boyolali	M1	10,79
9	Kota Bukittinggi	M1	11,32
10	Kab. Belitung	M1	11,52
11	Kota Surabaya	M1	12,10
12	Kab. Bulungan	M1	20,32
13	Kota Tangerang Selatan	M1	10,49
14	Kab. Rembang	M1	13,84
15	Kab. Banyumas	M2	35,23
16	Kab. Nias Utara	M1	20,05
17	Kab. Karang Asem	M1	18,51
18	Kab. Demak	M1	13,91



LAPORAN KINERJA TA.2023
DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI

No	Kab./Kota	Nilai	
19	Kab. Cilacap	M1	25,3
20	Kab. Sukoharjo	M2	40,4
21	Kab. Tanjung Jabung Barat	M1	15,85
22	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	M1	11,74
23	Kota Blitar	M1	26,57
24	Kab. Bangka Tengah	M1	13,24
25	Kab. Trenggalek	M2	31,66
26	Kota Pariaman	M1	16,5
27	Kota Madiun	M1	14,09
28	Kab. Maros	M1	10,88
29	Kab. Gresik	M1	11,37
30	Kab Probolinggo	M1	18,15
31	Kab. Banjar	M1	16,25

IKP 8. Persentase Daerah dengan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi dan Terpadu

Sebagai bentuk dukungan Pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik khususnya di bidang Perizinan Berusaha, pemerintah telah membentuk unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang diwujudkan dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Guna mendukung penataan pelayanan Perizinan Berusaha maka kepala daerah membentuk lembaga pelayanan terpadu satu pintu seperti yang tercantum pada Pasal 350 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah pula dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Pasal 176.

Pada kegiatan penyesuaian kelembagaan PTSP daerah terhadap kebijakan penyelenggaraan perizinan berusaha terdapat 2 (dua) komponen input yaitu Penyusunan pedoman penguatan kelembagaan DPMPTSP yang memiliki output kebijakan atau pedoman yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha di Daerah dan Permendagri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas



LAPORAN KINERJA TA.2023
DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan komponen input lainnya yaitu Asistensi penguatan kelembagaan DPMPTSP yang memiliki output jumlah daerah dengan kelembagaan PTSP Daerah yang telah menyesuaikan dengan kebijakan penyelenggaraan perizinan berusaha dengan target 34 daerah.

Pada tahun 2023, telah dilaksanakan pengukuran Daerah Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi dan Terpadu kabupaten/kota di 33 Provinsi (diluar Provinsi DKI Jakarta) dan diperoleh sebanyak 225 Kabupaten/kota telah memiliki PTSP yang terpadu dan terintegrasi atau sekitar 44,29% dari 508 total kabupaten/kota.

Tabel 3.14 Capaian Target IKP
Persentase Daerah dengan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi dan Terpadu

	2020	2021	2022	2023	2024
Target	1 Dokumen	14%	28%	43%	58%
Realisasi	1 Dokumen	14,73%	28%	44,29%	
Capaian	100%	136,67%	101,17%	103%	

Adapun upaya lainnya yang akan dilakukan oleh Kemendagri oleh Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan di tahun berikutnya, yaitu:

- Koordinasi dan Supervisi PTSP Berbasis Elektronik
- Koordinasi dan Supervisi Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha, Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP
- Penyusunan Kebijakan Jabatan Fungsional Penata Perizinan
- Fasilitasi Penguatan Kelembagaan PTSP sesuai dengan Permendagri 25 Tahun 2021

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja, yaitu:

- Koordinasi dan Supervisi PTSP Berbasis Elektronik dilakukan melalui rapat koordinasi di, provinsi Kalimantan Timur, dan provinsi Bali



LAPORAN KINERJA TA.2023
DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI

- b. Pendelegasian kewenangan perizinan, perzinan berusaha, dan nonperizinan kepada DPMPTSP dalam rangka kemudahan berusaha dan transparansi penyelenggaraan pelayanan perizinan, perizinan berusaha, dan nonperizinan
- c. Peningkatan profesionalisme SDM Aparatur dalam penyelenggaraan perizinan, perizinan berusaha, dan nonperizinan dengan penyusunan standar kompetensi Jabatan Fungsional Penata Perizinan dan penguatan regulasi jabatan fungsional penata perizinan
- d. Penguatan kelembagaan dengan memangkas rentang kendali birokrasi dalam pencapaian ekpetasi organisasi melalui penyederhanaan birokrasi yang menghilangkan jabatan administrasi dalam dua level (jabatan administrator dan jabatan pengawas).

IKP 9. Persentase Jumlah Kecamatan dengan Indeks Kinerja Kategori Baik

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, salah satu perubahan yang sangat esensial yaitu menyangkut kedudukan, tugas pokok dan fungsi kecamatan yang sebelumnya merupakan perangkat daerah otonom dalam kerangka pelaksanaan asas desentralisasi, berubah perannya menjadi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kabupaten/kota yang melaksanakan urusan kewilayahan. Kecamatan yang berkedudukan sebagai perangkat daerah kabupaten/kota menyelenggarakan Tugas Atributif dan Tugas Delegatif sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Adapun tugas delegatif diberikan oleh bupati/wali kota terhadap sebagian kewenangannya untuk dapat dilaksanakan di tingkat kecamatan khususnya dalam hal pelayanan publik.

Pada tanggal 27 Desember 2022 telah diterbitkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.4.3-668 Tahun 2022 tentang Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan. Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan merupakan indeks komposit dari indeks kinerja Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat, indeks penyelenggaraan pelayanan perkotaan, dan indeks kinerja kecamatan. Direktorat Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerja Sama telah melakukan perhitungan indeks kinerja kecamatan tahun 2023 terhadap 1.467 Kecamatan di 114 kabupaten/kota pada 10 provinsi dari total 7.277 Kecamatan se-Indonesia dengan hasil sebagai berikut:

- a. 14 Kecamatan berkinerja sangat baik
- b. 1092 Kecamatan berkinerja baik
- c. 361 Kecamatan berkinerja kurang baik



LAPORAN KINERJA TA.2023
DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Tabel 3.14 Capaian Target IKP
Persentase Jumlah Kecamatan dengan Indeks Kinerja Kategori Baik

	2020	2021	2022	2023	2024
Target	1 Dokumen	1 Dokumen	10%	15%	20%
Realisasi	1 Dokumen	1 Dokumen	(10,14%) 738 kec	15% (1092 kec)	-
Capaian	100%	100%	107%	100%	-

Tabel 3.15
Rekapitulasi Kecamatan dengan kategori
Indeks Kinerja Kecamatan Tahun 2023

No	Provinsi	Jumlah Kecamatan		
		Berkinerja Sangat Baik	Berkinerja Baik	Berkinerja Kurang Baik
1	Aceh	0	157	114
2	Jambi	0	123	21
3	Lampung	0	152	68
4	Banten	0	135	20
5	Bali	0	57	0
6	Kalimantan Selatan	7	117	22
7	Kalimantan Timur	0	85	20
8	Sulawesi Tenggara	7	125	50
9	Sulawesi Barat	0	53	16
10	Maluku	0	88	30
Total		14	1.092	361

Dalam hasil perhitungan Indeks Kinerja Kecamatan tahun 2023, kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah menjadi penyumbang bobot perhitungan terbesar yang direncanakan dan dianggarkan pada **1.165** Kecamatan daerah intervensi. Berdasarkan hal tersebut, dapat ditarik sebuah hipotesa bahwa Pemerintah Daerah kabupaten/kota memberikan atensi dalam hal penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan Di Daerah, dimana pada Pasal 29 ayat (3) terdapat amanat dalam hal pendanaan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.

Disisi lain, kegiatan yang paling banyak direncanakan dan dianggarkan oleh Kecamatan yaitu koordinasi kegiatan pemberdayaan desa dan kelurahan. Sebanyak **1.175** kecamatan atau 80% Kecamatan dari total daerah target yang merencanakan dan



LAPORAN KINERJA TA.2023

DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

menganggarkan kegiatan koordinasi kegiatan pemberdayaan desa dan kelurahan pada tahun 2023.

Berbanding terbalik dengan koordinasi kegiatan pemberdayaan desa dan kelurahan, 135 Kecamatan yang merencanakan dan menganggarkan kegiatan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK) tingkat kecamatan dan kelurahan. Hal ini dimungkinkan karena belum tersosialisasinya hasil pemutakhiran klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang menambahkan kode rekening baru di Kecamatan untuk kegiatan PKK tingkat Kecamatan dan kelurahan dan pembaharuan menu kegiatan di SIPD.

Secara garis besar, total jumlah Kecamatan dengan kategori berkinerja baik pada tahun 2022 dan 2023 adalah **1.830** kecamatan atau sebesar **25,14%** dari total keseluruhan Kecamatan di Indonesia. Target Kecamatan berkinerja baik sebanyak 15% dari total **7.277** Kecamatan pada tahun 2023 berhasil tercapai.

Pengukuran variabel indeks kinerja kecamatan didasarkan atas data perencanaan dan penganggaran yang bersumber dari SIPD. Pada prakteknya, terdapat kecamatan yang melakukan kegiatan sesuai dengan variabel indeks kinerja kecamatan namun tidak mendapatkan penganggaran sehingga tidak terdata dalam SIPD. Sehubungan dengan hal tersebut, Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan pada tahun 2024 akan melakukan upaya untuk meningkatkan validitas pengukuran indeks kinerja kecamatan, sebagai berikut:

- a. Melakukan sosialisasi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, khususnya daerah target intervensi, terkait variabel indeks kinerja kecamatan dan mekanisme pengukurannya sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat meningkatkan atensinya terhadap penganggaran program dan kegiatan di Kecamatan.
- b. Melakukan asistensi terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan jumlah kecamatan yang mayoritas memiliki kinerja kurang baik untuk menemukan permasalahan dan memformulasikan kebijakan yang dapat digunakan guna meningkatkan indeks kinerja kecamatan di wilayahnya.

Pada tahun 2023, telah diselenggarakan beberapa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja, antara lain:

- a. Rapat Kerja Nasional Camat Tahun 2023 dalam Mendukung Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024. Kegiatan dimaksud berfokus pada penguatan peran camat untuk mendukung pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024, pemberdayaan desa, serta penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan.



LAPORAN KINERJA TA.2023

DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

- b. Rapat Sosialisasi Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) PIU 1-D *Frontline Service Delivery*. Rapat dimaksud mengundang 60 Bupati pada 10 Provinsi di Indonesia yang sekaligus menjadi wadah penyampaian kewajiban pelimpahan sebagian kewenangan bupati kepada camat sebagai salah satu solusi penguatan peran Kecamatan.

Dalam proses pencapaian keberhasilan kinerja tahun 2023, terdapat beberapa kendala sebagai berikut:

- a. Kurangnya sumber daya manusia dalam aspek kuantitas di tingkat pemerintah pusat untuk dapat melakukan asistensi secara mendalam terhadap daerah target.
- b. Sistem Informasi yang telah dibangun yaitu SIMPEL (Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Kelurahan) yang merupakan tools (alat) kerja mengalami peretasan, hingga akhir tahun 2023 SIMPEL belum dapat diakses. Hal ini menyebabkan terkendalanya jalur komunikasi dan data antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah kabupaten/kota sehingga harus dilakukan secara manual.

C. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2023

Program di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Dalam Negeri dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Target dan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh masing-masing unit kerja harus dilaporkan secara berkala (triwulanan) baik secara keuangan maupun secara fisik berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. Berdasarkan dokumen Rencana Kerja Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2023, bahwa total alokasi anggaran Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Tahun 2023 sebesar Rp.217.487.568.000,-. TA.2023, kinerja program dan kegiatan yang telah dicapai oleh Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan. Adapun perhitungan penggunaan anggaran berdasarkan pada nilai riil yang sudah SP2D (disahkan oleh Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu), dengan rincian sebagai berikut:



LAPORAN KINERJA TA.2023
DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Tabel 3.16
Total Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran Per Kewenangan

No.	Kewenangan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	%
1.	Pusat	Rp.157.664.713.000	Rp.156.880.629.434	99,50%
	a.Rupiah Murni	Rp.144.594.835.000	Rp.144.050.427.240	99,62%
	b.PHLN P3PD	Rp.13.069.878.000	Rp.12.830.202.194	98,17%
2.	Dekonsentrasi	Rp. 55.250.152.000	Rp.54.302.121.961	98,28%
3.	Tugas Pembantuan	Rp.4.572.703.000	Rp.4.558.549.490	99,69%
Total		Rp.217.487.568.000	Rp.215.741.300.885	99,20%

Tabel 3. 17
Tabel Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja

No.	Jenis Belanja	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	%
1.	Belanja Barang	Rp.178.083.645.000	Rp.176.433.782.846	99,07%
2.	Belanja Modal	Rp.2.600.000.000	Rp.2.593.840.673	99,76%
3.	Belanja Pegawai	Rp.36.803.923.000	Rp.36.713.677.366	99,75%
Total		Rp.217.487.568.000	Rp.215.741.300.885	99,20%

Tabel 3.18
Tabel Realisasi Belanja Per Jenis Kegiatan

No.	Jenis Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	%
1.	Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah	Rp.108.692.280.000	Rp.107.341.727.738	98,76%
2.	Pembinaan Kawasan, Perkotaan, batas	Rp.33.880.223.000	Rp.33.716.433.748	99,52%



LAPORAN KINERJA TA.2023
DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI

No.	Jenis Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	%
	negara, batas wilayah, dan toponimi			
3.	Pembinaan Penyelenggaraan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Rp.10.159.156.000	Rp.10.111.419.437	99,53%
4.	Pembinaan dan Pengembangan Jabatan Fungsional Trantibumlinmas dan kewilayahan	Rp.500.000.000	Rp.496.950.964	99,39%
5.	Layanan Legislasi dan Litigasi Bidang Administrasi Wilayah	Rp.1.500.418.000	Rp.1.499.830.570	99,96%
6.	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Administrasi Wilayah	Rp.59.008.241.000	Rp.58.871.861.971	99,77%
7.	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang Administrasi Wilayah	Rp.1.912.000.000	Rp.1.872.185.858	97,92%
8.	Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Administrasi Wilayah	Rp.1.835.250.000	Rp.1.830.890.599	99,76%
Total		Rp.217.487.568.000	Rp.215.741.300.885	99,20%

D. EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

1. Sarana dan Prasarana

Bagian Umum Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, memiliki tanggung jawab terhadap pelayanan kepada pejabat serta seluruh pegawai yang meliputi penyediaan sarana dan prasarana demi menunjang seluruh kegiatan Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, adapun sumberdaya yang dimiliki dalam mendukung kinerja Ditjen Bina Adwil



LAPORAN KINERJA TA.2023
DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI

tahun 2023 yaitu seperti Peralatan dan Mesin sejumlah **4.140 buah/unit** saldo per 31 Desember 2023, aset Tetap Lainnya sebanyak **22 buah/unit** saldo per 31 Desember 2023, dan Aset tetap yang tidak digunakan sebanyak **138 unit buah/unit** saldo per 31 Desember 2023. Setiap penjabaran sumber daya yang sudah disebutkan tersebut akan dilampirkan pada tabel dengan judul Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan Intrakomptabel Rincian Per-Sub-sub Kelompok Barang Tahun Anggaran 2023.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 sumber daya berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

2. Sumber Daya Manusia

Berdasarkan rekapitulasi jumlah pegawai pada Subbag Kepegawaian Bagian Umum, total pegawai Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan pada Tahun 2023 sejumlah 348 pegawai yang terdiri dari 251 Pegawai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 97 Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3. 19
Jumlah Pegawai Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan

No.	Unit Kerja Eselon II	Jumlah Pegawai	
		PNS	Non PNS
1.	Sekretariat Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan	78 Pegawai	18 Pegawai
2.	Direktorat Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerja Sama	34 Pegawai	22 Pegawai
3.	Direktorat Kawasan, Perkotaan dan Batas Negara	41 Pegawai	10 Pegawai
4.	Direktorat Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat	32 Pegawai	19 Pegawai
5.	Direktorat Toponimi dan Batas Daerah	30 Pegawai	17 Pegawai
6.	Direktorat Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran	34 Pegawai	11 Pegawai
Total Keseluruhan		251 Pegawai	97 Pegawai



LAPORAN KINERJA TA.2023
DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI

E. HASIL EVALUASI INTERNAL DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN TAHUN 2023

Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Tahun 2023 telah melaksanakan seluruh kegiatan dengan anggaran yang dialokasi sebesar Rp.217.487.568.000,- dan realisasi sebesar Rp.215.741.300.885,- dengan persentase 99,20%. Dalam pelaksanaannya, tentu terdapat beberapa kendala dan hambatan terhadap pengerjaan Dokumen Laporan Kinerja. Adapun beberapa evaluasi dimaksud sebagai berikut:

1. Belum terotomasinya proses pelaksanaan monitoring dan evaluasi pada capaian kinerja program dan kinerja anggaran

Target Kinerja pada masing-masing Unit Kerja telah diuraikan dalam Perjanjian Kinerja Eselon I hingga Eselon IV dan Dokumen Kerangka Acuan Kerja dari Indikator Kinerja Kegiatan. Pada capaiannya terdapat beberapa kendala seperti belum tersedianya akses secara flexibel kepada pelaksana anggaran (hanya diberikan akses kepada Bendahara Pengeluaran) dan belum terotomasinya proses pemantauan realisasi kinerja anggaran Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan secara realtime dan flexibel.

Menyikapi hasil evaluasi ini, pada Tahun 2023 Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan melalui Bagian Perencanaan telah mengembangkan aplikasi E-Monev Adwil yang menyediakan fitur monitoring realisasi kinerja anggaran yang telah terintegrasi dengan MonSakti. Untuk menghasilkan capaian kinerja yang optimal, maka Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan melalui E-Monev Adwil dapat meningkatkan pelayanan informasi secara mutakhir kepada seluruh Unit Kerja teknis pelaksana anggaran di lingkup Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan.

2. Kekhawatiran dalam melaksanakan pengadaan barang jasa (jasa konsultan, jasa lainnya dan kontruksi

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.02/2011 tentang Klasifikasi Anggaran, terdapat 2 (dua) jenis belanja barang dalam mekanisme belanja penyelenggaraan pemerintah pusat, yaitu Belanja Barang Operasional dan Belanja Barang Non Operasional. Kegiatan pengadaan barang jasa yang didalamnya terdapat jasa konsultan, jasa lainnya dan kontruksi termasuk pada klasifikasi belanja barang non operasional yang target kinerja dan satuan kerjanya bersifat eksternal. Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala yang menjadi kekhawatiran kegiatan belanja non operasional salah satunya belum adanya quality control terhadap dokumen pengajuan kegiatan belanja jasa



LAPORAN KINERJA TA.2023
DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI

konsultan, jasa lainnya dan kontruksi, maka pada Tahun 2023, Ditjen Bina Adwil melalui Bagian Perencanaan telah membentuk Tim *Quality Surveillance* (QS) terhadap dokumen-dokumen pengajuan belanja jasa konsultan, jasa lainnya dan kontruksi oleh masing-masing unit kerja yang mengajukan. Selain itu, Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan telah membuat 5 (lima) SOP yang tertuang dalam Nota Dinas Sekretaris Ditjen Bina Adwil Nomor 027/46/SEKR tanggal 26 Januari 2022 kepada UKE II lingkup Ditjen Bina Adwil tentang Penyampaian SOP pengadaan barang dan jasa dalam rangka pengawasan kualitas output/pengawasan mutu di lingkungan Ditjen Bina Administrasi kewilayahan.

3. Untuk Meningkatkan Kualitas Laporan kinerja, perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Penyusunan pedoman pengukuran kinerja yang disertai dengan ketersediaan data dukung (evidence).
 - b. Melakukan laporan kinerja triwulan untuk setiap indikator kinerja.



LAPORAN KINERJA TA.2023
DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI

BAB IV

PENUTUP

A. SIMPULAN UMUM

Capaian Kinerja yang tersaji dalam Laporan Kinerja Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan tahun 2023 merupakan cerminan atas pelaksanaan kegiatan dan capaian kinerja yang dilaksanakan selama tahun 2023, yang merupakan media pertanggungjawaban dari upaya pencapaian Visi dan Misi Kementerian Dalam Negeri dan Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Tahun 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 dan keputusan Menteri Dalam Negeri No. 060-415 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Tahun 2020-2024.

Mengacu pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023, Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan memiliki target dan capaian Indikator Kinerja Program sebagai berikut:

1. Jumlah Provinsi dengan Indeks Kinerja Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Kategori “Baik”, dengan target 20 Provinsi dan tercapai 20 Provinsi.
2. Persentase daerah yang segmen batasnya dan pembakuan rupa buminya terintegrasi dengan informasi geospasial, dengan target 61,48% dan tercapai 71,79%.
3. Jumlah Daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Pelayanan Perkotaan Kategori “Baik”, dengan target 10 kota dan tercapai 31 kota.
4. Persentase daerah dengan pelayanan perizinan dan non perizinan yang terintegrasi dan terpadu, dengan target 43% dan tercapai 44,29%.
5. Persentase Jumlah Kecamatan dengan Indeks Kinerja Kecamatan Kategori “Baik”, dengan target 15% dan tercapai 15% (1.092 Kecamatan).
6. Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Bencana, dengan target >65 dan tercapai 78,50.
7. Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Trantibum, dengan target >65 dan tercapai 85,36.
8. Indeks Penyelenggaraan Manajemen Satuan Perlindungan Masyarakat, dengan target >65 dan tercapai 66,30.
9. Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Kebakaran, dengan target >65 dan tercapai 70,00.



LAPORAN KINERJA TA.2023

DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Sedangkan untuk realisasi anggaran hingga berakhirnya TA 2023 mencapai Rp. 215.741.300.885 atau (99,20%) dari total pagu anggaran APBN sebesar Rp.217.487.568.000,- terhadap rencana target penyerapan Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan sebesar 99,01%.

B. SARAN

Dari hasil simpulan umum di atas, langkah di masa mendatang yang akan dilakukan oleh Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan untuk meningkatkan kinerja adalah sebagai berikut:

1. Terhadap indeks penyelenggaran trantibumlinmas dengan 4 (empat) indikator kinerja program (IKP) yaitu meningkatkan koordinasi kelembagaan, meningkatkan asistensi penyelenggaraan teknis, meningkatkan layanan konsultasi dan fasilitasi, mengoptimalisasi bantuan sarana dan prasarana terhadap daerah yang melaksanakan masing-masing sub-urusan trantibumlinmas
2. Terhadap indeks penyelenggaraan tata Kelola kewilayahan yang didukung oleh 5 (lima) indikator kinerja program sebagai kompositnya yaitu dengan meningkatkan peran sekretariat bersama dalam pembinaan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, Mengoptimalisasi kegiatan penegasan batas daerah di seluruh wilayah administrasi pemerintahan, meningkatkan penyelenggaraan pengelolaan pelayanan perkotaan menjadi kota cerdas (*smart city*), peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pelayanan perizinan dan non-perizinan yang terintegrasi dan terpadu, serta meningkatkan peran camat dalam kinerjanya di kecamatan baik vertikal dan horizontal.

Diharapkan Laporan Kinerja (LAPKIN) ini dapat dijadikan sebagai input perbaikan dan penyempurnaan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan serta alat komunikasi dalam memberikan informasi akuntabilitas kegiatan Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan ke depan. Berbagai hal yang menjadi kendala dan permasalahan dalam pelaksanaan program dan anggaran tahun 2023 sebagaimana termuat dalam buku laporan ini agar dijadikan evaluasi bagi segenap unit kerja dan individu dalam lingkup internal Ditjen Bina Adwil, guna membangun komitmen dalam memberikan hasil yang berkualitas bagi peningkatan kinerja Ditjen Bina Adwil maupun Kementerian Dalam Negeri ke depannya.



LAPORAN KINERJA TA.2023
DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI

LAMPIRAN



LAPORAN KINERJA TA.2023
DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI

LAMPIRAN IKU 1: Jumlah daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Kategori
“Baik”

Daftar Kab/Kota dengan nilai Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Kategori Baik

No	Kab/Kota	Indeks Komposit				Nilai Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas	Kategori
		Indeks IPKKU	Indeks Satlinmas	Indeks Kebakaran	Indeks Bencana		
1	Kabupaten Luwu	94,63	81,69	95,00	83,89	88,80	Sangat Baik
2	Kota Banjarmasin	85,81	87,41	90,00	88,67	87,97	Sangat Baik
3	Kabupaten Sumbawa	86,23	82,62	95,00	83,99	86,96	Sangat Baik
4	Kabupaten Cilacap	98,06	85,38	74,00	84,88	85,58	Sangat Baik
5	Kota Tanjung Pinang	95,52	80,85	75,00	73,33	81,18	Sangat Baik
6	Kota Surakarta	100,00	85,69	50,00	87,55	80,81	Sangat Baik
7	Kabupaten Indragiri Hilir	98,75	72,83	73,00	75,90	80,12	Sangat Baik
8	Kota Tegal	97,93	88,18	50,00	82,12	79,56	Baik
9	Kabupaten Malang	97,20	82,12	50,00	85,67	78,75	Baik
10	Kabupaten Wonogiri	98,13	76,57	50,00	86,87	77,89	Baik
11	Kabupaten Wajo	92,06	77,85	50,00	90,11	77,50	Baik
12	Kabupaten Bojonegoro	82,42	84,35	50,00	84,77	75,38	Baik
13	Kabupaten Hulu Sungai Selatan	100,00	100,00	50,00	50,00	75,00	Baik
14	Kabupaten Kendal	50,00	88,00	74,00	86,33	74,58	Baik
15	Kota Medan	89,05	50,00	74,00	85,22	74,57	Baik
16	Kabupaten Badung	69,52	50,00	88,00	88,45	73,99	Baik
17	Kabupaten Pamekasan	82,52	79,12	50,00	82,67	73,58	Baik
18	Kabupaten Bone	81,68	78,05	50,00	82,00	72,93	Baik
19	Kabupaten Bombana	92,74	50,00	69,00	79,11	72,71	Baik
20	Kabupaten Magetan	85,93	68,80	50,00	85,88	72,65	Baik
21	Kota Madiun	75,64	81,23	50,00	83,56	72,61	Baik
22	Kabupaten Boyolali	100,00	50,00	50,00	89,94	72,49	Baik
23	Kabupaten Aceh Besar	50,00	89,16	75,00	74,83	72,25	Baik
24	Kabupaten Kediri	98,72	50,00	50,00	89,50	72,05	Baik
25	Kabupaten Kepulauan Selayar	74,16	78,29	50,00	85,66	72,03	Baik
26	Kabupaten Cianjur	80,51	50,00	68,00	89,11	71,90	Baik
27	Kabupaten Hulu Sungai Utara	94,56	50,00	93,00	50,00	71,89	Baik
28	Kabupaten Lombok Utara	50,00	77,85	72,00	86,34	71,55	Baik
29	Kabupaten Bogor	50,00	80,73	85,00	69,33	71,26	Baik
30	Kota Samarinda	99,37	83,35	50,00	50,00	70,68	Baik
31	Kota Balikpapan	50,00	50,00	98,00	84,45	70,61	Baik



LAPORAN KINERJA TA.2023
DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI

No	Kab/Kota	Indeks Komposit				Nilai Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas	Kategori
		Indeks IPKKU	Indeks Satlinmas	Indeks Kebakaran	Indeks Bencana		
32	Kabupaten Sukoharjo	100,00	81,98	50,00	50,00	70,49	Baik
33	Kabupaten Sijunjung	50,00	72,00	81,00	78,89	70,47	Baik
34	Kabupaten Kutai Kartanegara	50,00	82,42	69,00	80,45	70,47	Baik
35	Kabupaten Lumajang	93,33	50,00	50,00	88,42	70,44	Baik
36	Kabupaten Tanjung Jabung Barat	99,33	50,00	82,00	50,00	70,33	Baik
37	Kabupaten Mojokerto	98,15	83,06	50,00	50,00	70,30	Baik
38	Kabupaten Kotawaringin Barat	76,89	78,34	50,00	74,40	69,91	Baik
39	Kabupaten Penajam Paser Utara	79,29	50,00	100,00	50,00	69,82	Baik
40	Kabupaten Blora	50,00	87,54	50,00	90,56	69,52	Baik
41	Kota Banda Aceh	50,00	84,34	72,00	70,99	69,33	Baik
42	Kabupaten Pekalongan	81,11	59,30	50,00	85,54	68,99	Baik
43	Kota Malang	50,00	83,46	50,00	92,10	68,89	Baik
44	Kota Kediri	50,00	91,51	50,00	84,00	68,88	Baik
45	Kabupaten Gresik	50,00	50,00	89,00	85,66	68,67	Baik
46	Kota Administrasi Jakarta Selatan	50,00	79,41	95,00	50,00	68,60	Baik
47	Kabupaten Purworejo	50,00	85,91	50,00	88,22	68,53	Baik
48	Kota Administrasi Jakarta Timur	50,00	78,48	95,00	50,00	68,37	Baik
49	Kota Bontang	76,53	62,22	84,00	50,00	68,19	Baik
50	Kabupaten Semarang	88,91	50,00	50,00	83,66	68,14	Baik
51	Kota Payakumbuh	98,08	50,00	50,00	74,43	68,13	Baik
52	Kota Blitar	50,00	85,89	50,00	85,89	67,95	Baik
53	Kabupaten Magelang	70,41	59,65	50,00	91,67	67,93	Baik
54	Kabupaten Kudus	50,00	81,04	50,00	90,56	67,90	Baik
55	Kabupaten Blitar	87,35	50,00	50,00	82,89	67,56	Baik
56	Kota Parepare	99,37	50,00	50,00	70,78	67,54	Baik
57	Kota Bitung	50,00	85,97	50,00	82,88	67,21	Baik
58	Kabupaten Tegal	50,00	61,22	68,00	89,45	67,17	Baik
59	Kabupaten Bekasi	50,00	50,00	79,00	89,45	67,11	Baik
60	Kabupaten Purbalingga	85,81	50,00	50,00	82,55	67,09	Baik
61	Kabupaten Ciamis	50,00	78,78	50,00	88,88	66,91	Baik
62	Kota Serang	88,79	78,29	50,00	50,00	66,77	Baik
63	Kabupaten Enrekang	50,00	78,48	50,00	88,56	66,76	Baik
64	Kota Kendari	50,00	50,00	93,00	74,00	66,75	Baik
65	Kabupaten Belitung	50,00	81,98	50,00	84,44	66,61	Baik
66	Kota Sukabumi	77,83	50,00	50,00	88,44	66,57	Baik



LAPORAN KINERJA TA.2023
DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI

No	Kab/Kota	Indeks Komposit				Nilai Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas	Kategori
		Indeks IPKKU	Indeks Satlinmas	Indeks Kebakaran	Indeks Bencana		
67	Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir	50,00	67,07	72,00	76,56	66,41	Baik
68	Kabupaten Sambas	50,00	84,68	50,00	80,66	66,34	Baik
69	Kota Bengkulu	50,00	50,00	88,00	77,01	66,25	Baik
70	Kabupaten Cirebon	50,00	50,00	80,00	84,65	66,16	Baik
71	Kabupaten Aceh Barat	97,32	66,78	50,00	50,00	66,03	Baik
72	Kabupaten Seluma	50,00	86,55	66,00	60,39	65,73	Baik
73	Kota Tasikmalaya	88,67	74,20	50,00	50,00	65,72	Baik
74	Kota Bau-Bau	50,00	83,51	50,00	79,14	65,66	Baik
75	Kabupaten Jombang	75,77	50,00	50,00	86,45	65,56	Baik
76	Kota Jambi	64,00	50,00	98,00	50,00	65,50	Baik
77	Kota Pekanbaru	64,00	50,00	98,00	50,00	65,50	Baik
78	Kabupaten Lombok Barat	77,32	50,00	50,00	84,32	65,41	Baik
79	Kota Padangsidempuan	79,37	81,69	50,00	50,00	65,26	Baik
80	Kabupaten Soppeng	81,32	79,41	50,00	50,00	65,18	Baik
81	Kota Subulussalam	50,00	77,49	60,00	73,06	65,14	Baik
82	Kabupaten Barru	83,03	76,85	50,00	50,00	64,97	Baik
83	Kabupaten Sumenep	50,00	78,83	50,00	80,45	64,82	Baik
84	Kabupaten Bengkulu Selatan	50,00	80,06	50,00	79,00	64,76	Baik
85	Kota Denpasar	70,90	50,00	50,00	88,10	64,75	Baik
86	Kabupaten Sukabumi	50,00	72,00	50,00	86,22	64,55	Baik
87	Kabupaten Tangerang	50,00	50,00	75,00	83,11	64,53	Baik
88	Kabupaten Bima	50,00	50,00	72,00	85,45	64,36	Baik
89	Kabupaten Tulang Bawang	91,38	50,00	66,00	50,00	64,35	Baik
90	Kabupaten Gorontalo	76,76	50,00	50,00	80,34	64,27	Baik
91	Kota Mataram	72,21	84,74	50,00	50,00	64,24	Baik
92	Kota Palopo	80,44	50,00	50,00	76,11	64,14	Baik
93	Kabupaten Serang	50,00	77,10	50,00	79,44	64,14	Baik
94	Kabupaten Banyumas	50,00	66,15	50,00	90,34	64,12	Baik
95	Kabupaten Pati	50,00	71,36	50,00	84,99	64,09	Baik
96	Kota Padang	64,75	50,00	50,00	91,55	64,07	Baik
97	Kabupaten Bengkalis	50,00	50,00	82,00	74,12	64,03	Baik
98	Kabupaten Pinrang	50,00	83,99	50,00	72,01	64,00	Baik
99	Kabupaten Malinau	78,49	77,20	50,00	50,00	63,92	Baik
100	Kabupaten Bangka Tengah	83,40	50,00	50,00	71,65	63,76	Baik



LAPORAN KINERJA TA.2023
DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI

A. Daftar Hasil Pengukuran Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Bencana

No	Kabupaten/Kota	Dimensi						Nilai Indeks Sub Urusan Bencana	Kategori
		Kelembagaan	SDA	Kebijakan	Pendanaan	Teknik Operasional	Kepemimpinan		
1	Kabupaten Aceh Besar	88.13	94.4	73.36	38.87	82.93	77.8	74.83	CUKUP
2	Kabupaten Aceh Jaya	91.13	77.8	66.64	57.73	78.47	88.9	76.32	CUKUP
3	Kota Banda Aceh	83.73	61.1	66.64	57.73	83.67	72.25	70.99	CUKUP
4	Kota Sabang	71.07	44.5	62.2	38.87	46.67	88.9	61.27	CUKUP
5	Kota Subulussalam	72.53	66.7	68.88	76.67	74.87	77.8	73.06	CUKUP
6	Kabupaten Tapanuli Tengah	91.13	66.7	60	57.73	74.87	88.9	73.01	CUKUP
7	Kabupaten Tapanuli Selatan	100	83.3	88.88	71.07	91.13	100	89.88	BAIK
8	Kabupaten Deli Serdang	79.27	88.9	60.04	73.33	71.07	88.9	75.23	CUKUP
9	Kabupaten Asahan	91.13	88.9	68.92	57.73	63	66.7	71.24	CUKUP
10	Kabupaten Mandailing Natal	85.2	77.8	55.56	73.33	70.4	88.9	73.79	CUKUP
11	Kabupaten Nias Selatan	72.53	94.4	57.76	57.73	54.07	61.1	63.75	CUKUP
12	Kabupaten Padang Lawas Utara	87.4	77.8	68.92	57.73	74.87	83.35	74.68	CUKUP
13	Kabupaten Labuhanbatu Selatan	54.07	55.6	60.04	64.4	40.73	55.55	55.56	CUKUP
14	Kabupaten Nias Utara	100	77.8	68.92	57.73	82.27	88.9	78.79	BAIK
15	Kota Medan	100	66.7	91.12	57.73	95.53	88.9	85.22	BAIK
16	Kota Pematang Siantar	45.2	50	53.36	33.33	46.73	61.15	49.36	KURANG
17	Kota Sibolga	76.27	88.9	51.12	57.73	74	77.8	68.43	CUKUP
18	Kabupaten Sijunjung	79.27	100	73.36	57.73	74.07	94.45	78.89	BAIK
19	Kota Padang	94.07	100	86.68	80	91.8	100	91.55	SANGAT BAIK
20	Kota Solok	85.2	66.7	64.44	57.73	79.27	77.8	71.67	CUKUP
21	Kota Payakumbuh	82.93	77.7	66.64	64.4	74.87	83.35	74.43	CUKUP
22	Kabupaten Bengkulu	100	88.9	84.44	62.2	50.4	61.15	74.12	CUKUP
23	Kabupaten Indragiri Hilir	89.67	94.4	73.36	46.67	51.13	100	75.9	CUKUP
24	Kabupaten Rokan Hulu	63	66.7	53.32	57.73	54.07	55.55	57.33	CUKUP
25	Kabupaten Anambas	93.33	83.3	71.12	44.4	60.73	83.35	72.55	CUKUP
26	Kota Batam	53.33	55.5	68.92	52.2	65.93	83.35	65.17	CUKUP
27	Kota Tanjung Pinang	76.27	94.4	64.48	57.73	65.93	88.9	73.33	CUKUP
28	Kabupaten Sarolangun	92.6	77.8	71.12	57.73	75.53	66.7	72.78	CUKUP
29	Kabupaten Bengkulu Selatan	100	100	73.36	57.73	61.47	88.9	79	BAIK
30	Kabupaten Rejang Lebong	94.07	94.4	80	57.73	100	100	87.21	BAIK
31	Kabupaten Seluma	54.07	55.6	71.12	56.67	54.8	61.1	60.39	CUKUP
32	Kabupaten Kepahiang	100	77.8	80	51.07	79.27	94.45	81.22	BAIK



LAPORAN KINERJA TA.2023
DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI

No	Kabupaten/Kota	Dimensi						Nilai Indeks Sub Urusan Bencana	Kategori
		Kelembagaan	SDA	Kebijakan	Pendanaan	Teknik Operasional	Kepemimpinan		
33	Kabupaten Bengkulu Tengah	80.8	77.8	62.2	51.07	58.53	50	61.89	CUKUP
34	Kota Bengkulu	100	72.2	71.12	57.8	70.4	88.9	77.01	BAIK
35	Kabupaten Musi Banyuasin	100	66.6	80	57.73	79.27	88.9	79.99	BAIK
36	Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir	100	55.5	66.64	68.93	74.87	88.9	76.56	CUKUP
37	Kabupaten Banyu Asin	96.27	72.2	71.12	57.73	83.67	77.8	76.21	CUKUP
38	Kota Prabumulih	57.8	50	57.76	51.07	67.4	61.15	58.11	CUKUP
39	Kabupaten Belitung	100	77.8	80	57.73	86.67	100	84.44	BAIK
40	Kabupaten Bangka Barat	91.13	77.7	73.36	51.07	66.6	44.45	66.32	CUKUP
41	Kabupaten Bangka	76.33	66.7	71.12	57.73	74.8	72.2	70.22	CUKUP
42	Kabupaten Bangka Tengah	91.8	66.7	66.64	57.73	83.73	66.65	71.65	CUKUP
43	Kabupaten Belitung Timur	88.13	77.8	66.64	57.73	70.4	77.8	72.44	CUKUP
44	Kabupaten Lampung Barat	71.87	77.8	66.68	46.67	45.93	100	69.12	CUKUP
45	Kabupaten Lampung Timur	77	61.1	66.68	57.73	61.47	83.35	68.88	CUKUP
46	Kabupaten Pesisir Barat	36.33	50	42.2	44.4	37	38.85	40.98	KURANG
47	Kabupaten Bogor	86.67	55.6	66.68	55.53	82.93	66.65	69.33	CUKUP
48	Kabupaten Sukabumi	86.67	61.1	88.88	73.33	100	94.45	86.22	BAIK
49	Kabupaten Cianjur	92.6	88.9	82.24	80	91.8	100	89.11	BAIK
50	Kabupaten Ciamis	92.6	88.9	97.76	66.67	77.73	100	88.88	BAIK
51	Kabupaten Cirebon	92.6	66.6	84.44	57.73	95.53	100	84.65	BAIK
52	Kabupaten Subang	89.67	50	57.8	51.07	54.07	55.6	59.79	CUKUP
53	Kabupaten Purwakarta	100	66.7	97.76	77.8	95.53	88.9	89.89	BAIK
54	Kabupaten Bekasi	100	88.9	95.56	66.67	100	83.35	89.45	BAIK
55	Kota Sukabumi	100	77.8	97.76	57.73	91.13	94.45	88.44	BAIK
56	Kota Bandung	73.33	55.6	73.36	57.73	68.87	83.35	70.56	CUKUP
57	Kota Cirebon	95.53	66.7	95.56	57.73	88.13	100	86.77	BAIK
58	Kota Bekasi	83.73	66.7	84.44	57.73	100	83.35	80.67	BAIK
59	Kota Cimahi	100	77.8	91.12	57.73	100	100	89.22	BAIK
60	Kabupaten Pandeglang	97.07	72.2	77.8	77.8	84.4	88.9	83.34	BAIK
61	Kabupaten Lebak	46.67	61.1	57.8	44.4	86.67	44.4	56.1	CUKUP
62	Kabupaten Tangerang	100	66.7	86.68	62.2	91.8	83.35	83.11	BAIK
63	Kabupaten Serang	96.27	77.8	80	66.67	70.33	83.35	79.44	BAIK
64	Kabupaten Cilacap	100	77.7	86.68	66.67	91.8	83.35	84.88	BAIK
65	Kabupaten Banyumas	100	77.8	95.56	66.67	91.13	100	90.34	BAIK
66	Kabupaten Purbalingga	95.53	72.2	93.32	62.2	70.4	88.9	82.55	BAIK
67	Kabupaten Kebumen	69.6	50	71.12	57.73	95.53	94.45	75.1	CUKUP
68	Kabupaten Purworejo	100	77.8	84.44	66.67	95.53	100	88.22	BAIK



LAPORAN KINERJA TA.2023
DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI

No	Kabupaten/Kota	Dimensi						Nilai Indeks Sub Urusan Bencana	Kategori
		Kelembagaan	SDA	Kebijakan	Pendanaan	Teknik Operasional	Kepemimpinan		
69	Kabupaten Wonosobo	96.27	66.7	95.56	66.67	91.8	100	88.77	BAIK
70	Kabupaten Magelang	100	77.8	95.56	66.67	100	100	91.67	SANGAT BAIK
71	Kabupaten Boyolali	94.07	77.8	88.88	81.13	91.07	100	89.94	BAIK
72	Kabupaten Klaten	100	77.8	82.24	57.73	100	100	87	BAIK
73	Kabupaten Wonogiri	91.8	77.8	88.88	57.73	96.27	100	86.87	BAIK
74	Kabupaten Blora	100	77.8	91.12	66.67	100	100	90.56	BAIK
75	Kabupaten Rembang	92.6	83.3	66.68	66.67	70.4	77.8	75.01	CUKUP
76	Kabupaten Pati	100	77.8	84.44	57.73	82.93	100	84.99	BAIK
77	Kabupaten Kudus	100	77.8	95.56	66.67	100	94.45	90.56	BAIK
78	Kabupaten Semarang	100	77.8	84.44	66.67	87.33	83.35	83.66	BAIK
79	Kabupaten Temanggung	79.27	66.7	91.12	72.27	87.4	94.45	84.18	BAIK
80	Kabupaten Kendal	100	66.7	93.32	68.87	95.53	83.35	86.33	BAIK
81	Kabupaten Batang	100	77.8	86.68	57.73	86.67	83.35	82.78	BAIK
82	Kabupaten Pekalongan	95.53	66.7	91.12	57.73	87.33	100	85.54	BAIK
83	Kabupaten Pemalang	100	66.7	88.88	66.67	82.27	88.9	84.01	BAIK
84	Kabupaten Tegal	100	77.8	86.68	66.67	100	100	89.45	BAIK
85	Kabupaten Brebes	100	88.9	88.88	52.2	100	100	88.94	BAIK
86	Kota Surakarta	100	66.7	88.88	57.73	100	100	87.55	BAIK
87	Kota Salatiga	88.87	66.7	84.44	57.73	78.47	88.9	79.32	BAIK
88	Kota Semarang	93.33	66.6	66.68	57.73	71.07	77.8	72.21	CUKUP
89	Kota Pekalongan	78.47	66.7	71.12	57.73	79.27	77.8	72.33	CUKUP
90	Kota Tegal	100	66.7	73.36	66.67	95.53	88.9	82.12	BAIK
91	Kabupaten Kulon Progo	100	72.2	60.04	68.87	95.53	100	81.89	BAIK
92	Kabupaten Bantul	100	66.7	91.12	62.2	88.13	100	87	BAIK
93	Kabupaten Gunung Kidul	94.07	66.7	77.8	86.67	100	94.45	87.12	BAIK
94	Kabupaten Sleman	100	94.4	95.56	80	100	100	95.33	SANGAT BAIK
95	Kabupaten Pacitan	100	66.7	93.32	66.67	91.07	94.45	87.55	BAIK
96	Kabupaten Ponorogo	77	83.3	66.68	57.73	73.33	83.35	72.88	CUKUP
97	Kabupaten Trenggalek	95.53	77.8	84.44	57.73	91.13	94.45	84.44	BAIK
98	Kabupaten Tulungagung	80.8	77.8	80	57.73	95.53	83.35	79.56	BAIK
99	Kabupaten Blitar	91.13	88.9	75.56	57.73	100	88.9	82.89	BAIK
100	Kabupaten Kediri	100	77.8	88.88	63.33	100	100	89.5	BAIK
101	Kabupaten Malang	83.73	94.4	91.12	66.67	87.4	88.9	85.67	BAIK
102	Kabupaten Lumajang	95.53	83.3	93.32	57.73	91.8	100	88.42	BAIK
103	Kabupaten Banyuwangi	100	66.7	91.12	68.87	100	88.9	87.56	BAIK
104	Kabupaten Sidoarjo	95.53	61.1	91.12	66.67	91.8	100	86.99	BAIK
105	Kabupaten Mojokerto	91.8	77.8	91.12	57.73	100	88.9	85.77	BAIK



LAPORAN KINERJA TA.2023
DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI

No	Kabupaten/Kota	Dimensi						Nilai Indeks Sub Urusan Bencana	Kategori
		Kelembagaan	SDA	Kebijakan	Pendanaan	Teknik Operasional	Kepemimpinan		
106	Kabupaten Jombang	100	66.7	88.88	66.67	91.13	94.45	86.45	BAIK
107	Kabupaten Madiun	96.27	55.6	86.68	66.67	87.33	88.9	82.55	BAIK
108	Kabupaten Magetan	96.27	66.7	84.44	57.73	100	100	85.88	BAIK
109	Kabupaten Bojonegoro	95.53	72.2	80	66.67	95.53	94.45	84.77	BAIK
110	Kabupaten Lamongan	85.2	88.9	73.36	66.67	95.53	94.45	83.23	BAIK
111	Kabupaten Gresik	100	94.4	84.44	75.53	95.53	72.25	85.66	BAIK
112	Kabupaten Pamekasan	96.27	77.8	86.68	57.73	74.87	94.45	82.67	BAIK
113	Kabupaten Sumenep	91.13	55.6	86.68	57.73	87.4	88.9	80.45	BAIK
114	Kota Kediri	91.13	83.3	86.68	57.73	100	83.35	84	BAIK
115	Kota Blitar	100	77.8	91.12	57.73	100	83.35	85.89	BAIK
116	Kota Malang	95.53	94.4	93.32	66.67	100	100	92.1	SANGAT BAIK
117	Kota Pasuruan	80.73	50	71.12	64.4	92.6	100	78.44	BAIK
118	Kota Madiun	97.07	66.7	80	57.73	91.13	100	83.56	BAIK
119	Kota Surabaya	88.87	77.8	75.56	57.73	86.67	83.35	78.33	BAIK
120	Kota Batu	100	88.9	93.32	80	100	100	94.22	SANGAT BAIK
121	Kabupaten Tabanan	71.07	66.6	88.88	64.4	77.8	94.45	79.76	BAIK
122	Kabupaten Badung	100	88.9	86.68	80	87.4	88.9	88.45	BAIK
123	Kabupaten Karang Asem	92.6	77.8	84.44	68.87	82.93	83.35	82.22	BAIK
124	Kabupaten Buleleng	96.27	77.8	100	63.33	91.13	88.9	88.17	BAIK
125	Kota Denpasar	97.07	77.8	93.32	57.73	91.8	100	88.1	BAIK
126	Kabupaten Lombok Barat	95.53	77.7	86.68	57.73	79.27	100	84.32	BAIK
127	Kabupaten Lombok Timur	40	50	46.68	44.4	42.27	44.4	44.55	KURANG
128	Kabupaten Sumbawa	85.2	88.9	93.32	57.73	91.07	83.35	83.99	BAIK
129	Kabupaten Dompu	75.53	66.7	51.12	57.73	74.8	72.25	65.11	CUKUP
130	Kabupaten Bima	100	100	100	75.53	64.47	72.25	85.45	BAIK
131	Kabupaten Lombok Utara	95.53	66.7	86.68	66.67	91.13	100	86.34	BAIK
132	Kota Kupang	74.07	77.8	64.48	57.73	78.47	66.7	68.78	CUKUP
133	Kabupaten Sambas	82.2	61.1	95.56	46.67	75.53	100	80.66	BAIK
134	Kabupaten Kotawaringin Barat	100	83.3	68.92	58.87	70.4	72.25	74.4	CUKUP
135	Kabupaten Lamandau	63	94.4	68.92	71.07	82.27	88.9	76.9	CUKUP
136	Kabupaten Barito Timur	83.73	66.7	68.92	64.4	63	66.7	68.91	CUKUP
137	Kabupaten Banjar	71.07	83.3	64.48	45.53	46.73	61.15	61.18	CUKUP
138	Kabupaten Barito Kuala	96.27	77.7	82.24	65.53	71.07	72.25	77.71	BAIK
139	Kota Banjarmasin	92.6	100	88.88	66.67	83.73	100	88.67	BAIK
140	Kota Banjarbaru	91.13	100	77.8	71.07	83.73	100	86.34	BAIK
141	Kabupaten Kutai Kartanegara	100	72.2	82.24	57.73	82.27	83.35	80.45	BAIK



LAPORAN KINERJA TA.2023
DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI

No	Kabupaten/Kota	Dimensi						Nilai Indeks Sub Urusan Bencana	Kategori
		Kelembagaan	SDA	Kebijakan	Pendanaan	Teknik Operasional	Kepemimpinan		
142	Kota Balikpapan	100	66.7	86.68	64.4	91.13	88.9	84.45	BAIK
143	Kabupaten Paser	100	66.7	73.36	68.87	82.93	83.35	79.45	BAIK
144	Kabupaten Bulungan	64.47	66.7	68.92	52.2	67.47	50	61.52	CUKUP
145	Kabupaten Tana Tidung	77	94.4	84.44	63.33	86.67	88.9	82.38	BAIK
146	Kota Bitung	100	88.8	80	57.73	83.73	88.9	82.88	BAIK
147	Kota Kotamobagu	100	72.2	68.92	57.73	66.67	88.9	75.89	CUKUP
148	Kabupaten Banggai	72.53	55.6	77.8	46.67	82.93	77.8	70.89	CUKUP
149	Kabupaten Selayar	95.53	88.9	95.56	68.87	69.6	88.9	85.66	BAIK
150	Kabupaten Bulukumba	92.6	77.7	80	77.8	79.27	66.7	78.56	BAIK
151	Kabupaten Bone	91.13	88.9	80	57.73	86.67	88.9	82	BAIK
152	Kabupaten Maros	79.27	72.2	88.88	71.07	86.67	83.35	81.66	BAIK
153	Kabupaten Wajo	97.07	94.4	91.12	64.4	91.13	100	90.11	BAIK
154	Kabupaten Pinrang	100	66.7	68.92	57.73	66.67	72.25	72.01	CUKUP
155	Kabupaten Enrekang	91.13	88.9	86.68	71.07	91.13	100	88.56	BAIK
156	Kabupaten Luwu	91.13	94.4	77.8	82.2	82.2	83.35	83.89	BAIK
157	Kabupaten Tana Toraja	85.2	61.1	75.56	57.73	59.27	88.9	73.11	CUKUP
158	Kabupaten Luwu Utara	78.47	66.7	80	52.2	82.27	77.8	62.4	CUKUP
159	Kabupaten Luwu Timur	95.53	100	86.68	91.13	91.8	100	93.44	SANGAT BAIK
160	Kota Makassar	89.6	100	93.32	71.07	100	88.9	90.21	BAIK
161	Kota Pare-Pare	92.6	66.7	73.36	57.73	65.93	66.65	70.78	CUKUP
162	Kota Palopo	73.33	77.8	91.12	57.73	54.07	88.9	76.11	CUKUP
163	Kabupaten Mamuju Utara	100	88.9	80	57.73	74.8	77.8	79.33	BAIK
164	Kabupaten Mamuju Tengah	86.67	55.6	68.92	57.73	82.2	100	76.78	CUKUP
165	Kabupaten Mamasa	80	88.9	71.12	57.73	68.13	50	67.55	CUKUP
166	Kabupaten Mamuju	95.53	77.8	66.64	51.07	75.53	61.15	69.99	CUKUP
167	Kabupaten Polewali Mandar	86.67	94.4	88.88	57.73	91.8	88.9	84.87	BAIK
168	Kabupaten Majene	82.2	77.8	88.88	52.2	74.87	83.35	78.06	BAIK
169	Kabupaten Kolaka Timur	60.73	55.5	64.48	52.2	70.33	61.1	61.38	CUKUP
170	Kota Kendari	82.2	77.8	60	64.4	91.13	77.8	74	CUKUP
171	Kota Bau-Bau	82.2	88.8	68.88	65.53	87.33	88.9	79.14	BAIK
172	Kabupaten Kolaka	48.2	44.5	53.32	51.07	82.93	55.6	56.23	CUKUP
173	Kabupaten Bombana	88.13	66.7	82.24	51.07	88.13	88.9	79.11	BAIK
174	Kabupaten Gorontalo	68.93	77.8	91.12	71.07	73.33	88.9	80.34	BAIK
175	Kabupaten Pulau Taliabu	61.47	55.6	62.24	64.4	42.27	50	56.34	CUKUP
176	Kota Ternate	81.47	100	86.68	57.73	80.73	88.9	82.44	BAIK
177	Kota Tidore Kepulauan	100	77.8	97.76	71.07	87.4	100	90.99	BAIK
178	Kabupaten Maluku Tengah	100	100	93.32	71.07	79.27	88.9	88.66	BAIK



LAPORAN KINERJA TA.2023
DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI

No	Kabupaten/Kota	Dimensi						Nilai Indeks Sub Urusan Bencana	Kategori
		Kelembagaan	SDA	Kebijakan	Pendanaan	Teknik Operasional	Kepemimpinan		
179	Kabupaten Maluku Tenggara Barat	74.87	94.4	60.04	46.67	57.07	61.1	63.46	CUKUP
180	Kabupaten Kepulauan Aru	54.07	55.5	37.76	57.73	33.33	38.85	44.53	KURANG
181	Kota Ambon	77.8	72.2	86.68	64.4	87.4	83.35	80	BAIK
182	Kota Sorong	74.8	50	73.36	57.73	78.47	88.9	72.77	CUKUP

B. Daftar Hasil Pengukuran Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Trantibum Kategori Baik

No	Kabupaten/Kota	Dimensi			Nilai Indeks Sub Urusan Trantibum	Kategori
		Strategi	SDM	Sistem		
1	Kabupaten Aceh Barat	93.703	100.000	95.405	97.320	Sangat Baik
2	Kabupaten Aceh Singkil	67.404	66.665	95.802	75.902	Baik
3	Kabupaten Pidie Jaya	84.903	100.000	90.595	94.076	Sangat Baik
4	Kabupaten Batu Bara	72.762	74.777	80.415	76.137	Baik
5	Kabupaten Labuhanbatu	69.904	66.665	95.415	76.276	Baik
6	Kabupaten Nias Utara	55.183	55.502	87.015	65.271	Baik
7	Kota Medan	77.948	80.354	95.767	84.686	Sangat Baik
8	Kota Padangsidempuan	66.409	69.515	91.781	75.847	Baik
9	Kota Sibolga	82.443	61.079	86.741	73.316	Baik
10	Kabupaten Agam	72.990	58.229	88.845	70.704	Baik
11	Kabupaten Padang Pariaman	58.328	63.891	87.032	70.009	Baik
12	Kota Padang	75.601	69.504	60.014	67.750	Baik
13	Kota Payakumbuh	80.379	100.000	97.854	95.445	Sangat Baik
14	Kabupaten Indragiri Hilir	89.208	100.000	100.000	97.863	Sangat Baik
15	Kabupaten Siak	78.822	75.129	92.741	81.355	Sangat Baik
16	Kota Pekanbaru	75.601	69.504	57.610	67.000	Baik
17	Kota Batam	75.601	69.504	60.014	67.750	Baik
18	Kota Tanjung Pinang	71.851	100.000	89.635	91.193	Sangat Baik
19	Kabupaten Batanghari	76.329	58.553	85.343	70.431	Baik
20	Kabupaten Tanjung Jabung Barat	100.000	100.000	97.854	99.330	Sangat Baik
21	Kota Jambi	75.601	69.504	57.610	67.000	Baik
22	Kabupaten Bangka Tengah	81.863	77.828	87.548	81.659	Sangat Baik
23	Kabupaten Pesawaran	72.920	52.929	79.972	65.325	Baik
24	Kabupaten Tulang Bawang	80.910	91.888	89.009	88.816	Sangat Baik
25	Kota Bandar Lampung	80.650	69.515	83.395	76.050	Baik
26	Kabupaten Lebak	89.209	58.553	89.377	74.240	Baik
27	Kabupaten Pandeglang	64.052	58.553	84.717	67.805	Baik



LAPORAN KINERJA TA.2023
DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI

No	Kabupaten/Kota	Dimensi			Nilai Indeks Sub Urutan Trantibum	Kategori
		Strategi	SDM	Sistem		
28	Kota Serang	77.468	89.038	87.214	86.178	Sangat Baik
29	Kabupaten Cianjur	64.234	66.665	95.802	75.274	Baik
30	Kabupaten Garut	100.000	100.000	100.000	100.000	Sangat Baik
31	Kabupaten Sumedang	77.457	88.837	100.000	90.067	Sangat Baik
32	Kota Bandung	82.024	61.392	86.301	73.249	Baik
33	Kota Sukabumi	77.622	66.665	87.214	75.246	Baik
34	Kota Tasikmalaya	89.294	80.726	97.854	87.766	Sangat Baik
35	Kabupaten Boyolali	100.000	100.000	100.000	100.000	Sangat Baik
36	Kabupaten Cilacap	76.023	100.000	97.854	94.583	Sangat Baik
37	Kabupaten Demak	86.777	89.038	75.205	84.274	Sangat Baik
38	Kabupaten Grobogan	84.966	89.038	81.186	85.782	Sangat Baik
39	Kabupaten Kebumen	84.892	55.703	89.440	72.008	Baik
40	Kabupaten Magelang	80.741	52.956	82.953	67.817	Baik
41	Kabupaten Pekalongan	67.274	66.665	95.802	75.876	Baik
42	Kabupaten Purbalingga	95.372	72.402	97.854	84.891	Sangat Baik
43	Kabupaten Rembang	69.932	50.230	93.655	67.680	Baik
44	Kabupaten Semarang	82.876	89.038	89.618	87.999	Sangat Baik
45	Kabupaten Sukoharjo	100.000	100.000	100.000	100.000	Sangat Baik
46	Kabupaten Wonogiri	72.587	100.000	100.000	94.572	Sangat Baik
47	Kota Magelang	80.587	52.956	85.206	68.489	Baik
48	Kota Salatiga	42.481	58.229	83.333	62.943	Baik
49	Kota Surakarta	100.000	100.000	100.000	100.000	Sangat Baik
50	Kota Tegal	100.000	100.000	93.363	97.929	Sangat Baik
51	Kota Yogyakarta	59.262	50.117	85.162	62.862	Baik
52	Kabupaten Blitar	84.643	80.926	93.382	85.548	Sangat Baik
53	Kabupaten Bojonegoro	85.003	66.665	100.000	80.696	Sangat Baik
54	Kabupaten Jombang	59.929	58.553	93.363	69.686	Baik
55	Kabupaten Kediri	74.921	100.000	97.854	94.365	Sangat Baik
56	Kabupaten Lumajang	96.806	89.038	97.854	93.326	Sangat Baik
57	Kabupaten Magetan	89.398	77.875	93.655	85.080	Sangat Baik
58	Kabupaten Malang	88.069	100.000	92.985	95.449	Sangat Baik
59	Kabupaten Mojokerto	81.863	100.000	100.000	96.409	Sangat Baik
60	Kabupaten Nganjuk	88.085	61.327	87.548	74.806	Baik
61	Kabupaten Ngawi	92.411	69.439	79.236	77.044	Baik
62	Kabupaten Pamekasan	88.276	69.515	93.833	80.817	Sangat Baik
63	Kota Madiun	56.769	58.229	95.450	69.553	Baik
64	Kabupaten Badung	75.893	61.116	85.086	71.520	Baik
65	Kabupaten Tabanan	78.545	58.342	82.696	69.940	Baik
66	Kota Denpasar	81.705	58.342	85.086	71.312	Baik



LAPORAN KINERJA TA.2023
DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI

No	Kabupaten/Kota	Dimensi			Nilai Indeks Sub Urutan Trantibum	Kategori
		Strategi	SDM	Sistem		
67	Kabupaten Lombok Barat	89.271	66.665	83.333	76.341	Baik
68	Kabupaten Sumbawa	100.000	74.988	95.160	86.234	Sangat Baik
69	Kota Mataram	72.237	52.929	90.992	68.627	Baik
70	Kabupaten Flores Timur	93.603	58.553	93.060	76.259	Baik
71	Kabupaten Sumba Barat	84.876	41.794	87.566	64.605	Baik
72	Kabupaten Sumba Barat Daya	60.758	61.079	72.040	64.435	Baik
73	Kabupaten Sumba Tengah	86.168	66.665	95.802	79.617	Baik
74	Kabupaten Ketapang	82.042	66.665	80.397	73.994	Baik
75	Kota Pontianak	92.592	55.455	90.581	73.767	Baik
76	Kabupaten Hulu Sungai Selatan	100.000	100.000	100.000	100.000	Sangat Baik
77	Kabupaten Hulu Sungai Tengah	67.274	66.665	97.562	76.425	Baik
78	Kabupaten Hulu Sungai Utara	87.748	91.564	97.854	92.771	Sangat Baik
79	Kota Banjarmasin	96.897	72.290	100.000	85.807	Sangat Baik
80	Kabupaten Kotawaringin Barat	57.901	77.627	78.067	73.859	Baik
81	Kabupaten Kotawaringin Timur	76.006	77.828	95.802	83.075	Sangat Baik
82	Kota Palangka Raya	83.353	50.089	83.044	66.958	Baik
83	Kabupaten Penajam Paser Utara	74.307	83.452	74.687	78.907	Baik
84	Kota Bontang	64.234	58.553	95.802	71.300	Baik
85	Kota Samarinda	92.311	100.000	100.000	98.478	Sangat Baik
86	Kabupaten Malinau	68.690	66.665	89.344	74.142	Baik
87	Kabupaten Bone Bolango	71.859	66.665	95.802	76.784	Baik
88	Kabupaten Gorontalo	92.592	66.665	86.969	78.133	Baik
89	Kabupaten Barru	83.353	66.665	100.000	80.370	Sangat Baik
90	Kabupaten Bone	87.460	88.837	81.021	86.126	Sangat Baik
91	Kabupaten Kepulauan Selayar	67.793	66.665	81.537	71.528	Baik
92	Kabupaten Luwu	100.000	89.038	100.000	94.629	Sangat Baik
93	Kabupaten Luwu Utara	64.172	69.716	68.204	68.146	Baik
94	Kabupaten Sinjai	86.125	58.229	88.529	73.206	Baik
95	Kabupaten Soppeng	68.797	69.763	93.531	76.988	Baik
96	Kabupaten Wajo	80.501	89.038	95.784	89.452	Sangat Baik
97	Kota Palopo	89.208	66.665	93.655	79.549	Baik
98	Kota Parepare	92.311	100.000	100.000	98.478	Sangat Baik
99	Kabupaten Bombana	79.525	89.038	95.980	89.320	Sangat Baik
100	Kabupaten Buton Selatan	80.587	100.000	100.000	96.156	Sangat Baik
101	Kabupaten Konawe Selatan	96.960	75.101	73.865	79.043	Baik
102	Kabupaten Morowali Utara	65.311	66.665	78.766	70.172	Baik
103	Kabupaten Poso	88.092	80.678	70.121	78.852	Baik
104	Kabupaten Kepulauan Sangihe	66.761	89.038	90.639	85.127	Sangat Baik
105	Kabupaten Manokwari	80.123	58.553	75.754	68.190	Baik



LAPORAN KINERJA TA.2023
DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI

C. Daftar Hasil Pengukuran Indeks Penyelenggaraan Manajemen Satuan Perlindungan Masyarakat

No	Kab/Kota	Dimensi					Total Nilai Indeks	Kategori
		Pelaksanaan Fungsi	Kebijakan	Inovasi Peningkatan Kapasitas	Pemberdayaan Satlinmas	Sarpras Satlinmas		
		0.10	0.02	0.61	0.20	0.07		
1	Kota Tanjungpinang	4.48	2.11	54.95	15.18	4.12	80.85	Sangat Baik
2	Kota Tegal	8.32	2.11	54.95	20.40	2.40	88.18	Sangat Baik
3	Kabupaten Indragiri Hulu	5.12	2.11	43.25	20.40	2.40	73.28	Baik
4	Kabupaten Sampang	8.96	2.11	54.95	15.18	2.40	83.60	Sangat Baik
5	Kotawaringin Barat	3.20	1.51	49.10	20.40	4.12	78.34	Baik
6	Kota Subulussalam	2.56	2.40	54.95	15.18	2.40	77.49	Baik
7	Kabupaten Blitar	5.12	2.40	60.80	15.18	2.40	85.89	Sangat Baik
8	Kabupaten Lebong	5.76	2.11	54.95	20.40	4.12	87.35	Sangat Baik
9	Kota Baubau	1.92	2.11	54.95	20.40	4.12	83.51	Sangat Baik
10	Kota Malang	8.32	1.51	49.10	20.40	4.12	83.46	Sangat Baik
11	Kabupaten Barito Timur	3.84	2.40	43.25	20.40	5.46	75.35	Baik
12	Kota Kediri	8.96	2.40	54.95	20.40	4.79	91.50	Sangat Baik
13	Kabupaten Cilacap	8.32	2.10	49.10	20.40	5.46	85.38	Sangat Baik
14	Kota Pematang Siantar	1.92	2.11	54.95	15.18	2.40	76.56	Baik
15	Kabupaten Magetan	3.84	2.40	43.25	15.18	4.12	68.80	Baik
16	Kabupaten Aceh Barat	3.84	2.11	43.25	15.18	2.40	66.78	Baik
17	Kabupaten Buton	7.68	2.40	54.95	15.18	4.12	84.34	Sangat Baik
18	Kabupaten Kutai Kartanegara	5.76	2.40	54.95	15.18	4.12	82.42	Sangat Baik
19	Kabupaten Toraja Utara	5.12	2.40	54.95	15.18	2.40	80.05	Sangat Baik
20	Kabupaten Banyumas	7.05	2.40	37.40	15.18	4.12	66.15	Baik
21	Kabupaten Gianyar	5.76	2.11	37.40	15.18	4.12	64.58	Baik
22	Kabupaten Bogor	5.76	2.40	49.10	20.40	3.07	80.73	Sangat Baik
23	Kabupaten Luwu	7.05	2.11	54.95	15.18	2.40	81.69	Sangat Baik
24	Kota Dumai	5.76	2.40	54.95	15.18	2.40	80.69	Sangat Baik
25	Kabupaten Pangandaran	3.84	2.40	43.25	20.40	2.40	72.29	Baik
26	Kabupaten Sukoharjo	7.68	2.40	49.10	20.40	2.40	81.98	Sangat Baik
27	Kabupaten Nias	5.12	2.11	37.40	15.18	2.40	62.21	Baik



LAPORAN KINERJA TA.2023
DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI

No	Kab/Kota	Dimensi					Total Nilai Indeks	Kategori
		Pelaksanaan Fungsi	Kebijakan	Inovasi Peningkatan Kapasitas	Pemberdayaan Satlinmas	Sarpras Satlinmas		
		0.10	0.02	0.61	0.20	0.07		
28	Kabupaten Asahan	7.05	2.11	37.40	15.18	4.12	65.87	Baik
29	Lampung Selatan	2.56	2.40	37.40	15.18	2.40	59.94	Cukup Baik
30	Kabupaten Purworejo	5.76	2.40	54.95	20.40	2.40	85.91	Sangat Baik
31	Kota Banda Aceh	7.68	2.40	54.95	15.18	4.12	84.34	Sangat Baik
32	Kabupaten Bone	9.60	2.40	43.25	20.40	2.40	78.05	Baik
33	Kota Sibolga	1.92	2.40	37.40	15.18	2.40	59.30	Cukup Baik
34	Kabupaten Subang	3.84	2.40	43.25	20.40	2.40	72.29	Baik
35	Jakarta Selatan	4.48	2.40	54.95	15.18	2.40	79.41	Baik
36	Kabupaten Pesawaran	3.84	2.40	54.95	15.18	2.40	78.77	Baik
37	Padang Sidempuan	7.05	2.11	54.95	15.18	2.40	81.69	Sangat Baik
38	Kabupaten Bintan	1.92	2.11	54.95	15.18	2.40	76.56	Baik
39	Kabupaten Pekalongan	1.92	2.40	37.40	15.18	2.40	59.30	Cukup Baik
40	Kota Tasikmalaya	5.12	2.40	49.10	15.18	2.40	74.20	Baik
41	Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan	1.92	2.11	60.80	15.18	2.40	82.41	Sangat Baik
42	Kabupaten Pidie	5.76	2.11	49.10	15.18	2.40	74.55	Baik
43	Kabupaten Madiun	3.20	2.11	43.25	15.18	2.40	66.14	Baik
44	Gayo Lues	7.68	2.40	54.95	15.18	4.12	84.34	Sangat Baik
45	Kabupaten Sumenep	8.32	2.10	49.10	15.18	4.12	78.83	Baik
46	Kabupaten Probolinggo	5.12	2.11	43.25	20.40	4.12	75.01	Baik
47	Kabupaten Kendal	5.76	2.10	54.95	20.40	4.79	88.00	Sangat Baik
48	Kabupaten Simeulue	1.92	2.11	37.40	20.40	2.40	64.23	Baik
49	Jakarta Timur	3.84	2.11	54.95	15.18	2.40	78.48	Baik
50	Kabupaten Indragiri Hilir	9.60	2.40	43.25	15.18	2.40	72.83	Baik
51	Kota Yogyakarta	8.32	1.81	49.10	15.18	4.12	78.54	Baik
52	Kabupaten Kudus	6.40	2.11	54.95	15.18	2.40	81.04	Sangat Baik
53	Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur	8.32	2.10	54.95	20.40	2.40	88.17	Sangat Baik
54	Kabupaten Aceh Timur	3.84	2.11	54.95	15.18	2.40	78.48	Baik
55	Kabupaten Malang	6.40	2.10	49.10	20.40	4.12	82.12	Sangat Baik
56	Kota Mojokerto	7.68	2.40	54.95	15.18	2.40	82.61	Sangat Baik
57	Kota Madiun	4.48	1.79	49.10	20.40	5.46	81.23	Sangat Baik



LAPORAN KINERJA TA.2023
DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI

No	Kab/Kota	Dimensi					Total Nilai Indeks	Kategori
		Pelaksanaan Fungsi	Kebijakan	Inovasi Peningkatan Kapasitas	Pemberdayaan Satlinmas	Sarpras Satlinmas		
		0.10	0.02	0.61	0.20	0.07		
58	Kabupaten Magelang	2.56	2.11	37.40	15.18	2.40	59.65	Cukup Baik
59	Kabupaten Pati	3.20	2.11	43.25	20.40	2.40	71.36	Baik
60	Kota Bogor	3.84	2.40	49.10	20.40	2.40	78.14	Baik
61	Kabupaten Bojonegoro	8.32	2.40	49.10	20.40	4.12	84.35	Sangat Baik
62	Kabupaten Kepulauan Selayar	1.92	2.11	54.95	15.18	4.12	78.29	Baik
63	Kabupaten Bener Meriah	7.68	2.40	49.10	20.40	4.12	83.70	Sangat Baik
64	Kabupaten Pamekasan	4.48	2.11	54.95	15.18	2.40	79.12	Baik
65	Kota Depok	7.05	2.11	37.40	15.18	4.12	65.87	Baik
66	Kabupaten Banyuasin	3.20	2.11	37.40	15.18	4.12	62.02	Baik
67	Kabupaten Sukamara	5.76	2.11	43.25	15.18	4.12	70.43	Baik
68	Kabupaten Muara Enim	5.76	2.40	54.95	20.40	4.12	87.63	Sangat Baik
69	Kota Samarinda	3.20	2.40	54.95	20.40	2.40	83.35	Sangat Baik
70	Kabupaten Wonogiri	5.76	2.40	49.10	15.18	4.12	76.57	Baik
71	Kabupaten Klungkung	7.04	2.40	49.10	20.40	4.12	83.07	Sangat Baik
72	Kabupaten Lamongan	3.20	2.40	43.25	15.18	2.40	66.43	Baik
73	Kabupaten Enrekang	3.84	2.11	54.95	15.18	2.40	78.48	Baik
74	Kabupaten Ketapang	9.60	2.40	49.10	15.18	4.12	80.41	Sangat Baik
75	Kabupaten Bengkulu Selatan	5.76	2.40	49.10	20.40	2.40	80.06	Sangat Baik
76	Kabupaten Sukabumi	3.84	2.11	43.25	20.40	2.40	72.00	Baik
77	Kuantan Singingi	9.60	2.11	43.25	20.40	2.40	77.76	Baik
78	Kabupaten Aceh Besar	9.60	1.81	54.95	20.40	2.40	89.16	Sangat Baik
79	Kabupaten Wajo	3.84	2.11	49.10	20.40	2.40	77.85	Baik
80	Kolaka Timur	1.92	2.11	54.95	15.18	2.40	76.56	Baik
81	Kota Pekalongan	5.76	2.11	43.25	20.40	4.12	75.65	Baik
82	Kota Surakarta	8.32	2.40	49.10	20.40	5.46	85.69	Sangat Baik
83	Kabupaten Mesuji	5.12	2.40	43.25	20.40	2.40	73.57	Baik
84	Kabupaten Blora	7.05	2.11	60.80	15.18	2.40	87.54	Sangat Baik



LAPORAN KINERJA TA.2023
DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI

No	Kab/Kota	Dimensi					Total Nilai Indeks	Kategori
		Pelaksanaan Fungsi	Kebijakan	Inovasi Peningkatan Kapasitas	Pemberdayaan Satlinmas	Sarpras Satlinmas		
		0.10	0.02	0.61	0.20	0.07		
85	Kabupaten Tuban	7.05	2.40	37.40	15.18	4.12	66.15	Baik
86	Kabupaten Siak	7.05	2.40	37.40	15.18	2.40	64.43	Baik
87	Kabupaten Kampar	7.05	2.40	54.95	15.18	2.40	81.98	Sangat Baik
88	Kota Tangerang	9.60	2.10	54.95	20.40	2.40	89.45	Sangat Baik
89	Kota Bitung	9.60	2.11	54.95	15.18	4.12	85.97	Sangat Baik
90	Kabupaten Mojokerto	6.40	2.40	54.95	15.18	4.12	83.06	Sangat Baik
91	Kabupaten Sijunjung	3.84	2.11	43.25	20.40	2.40	72.00	Baik
92	Kabupaten Kutai Barat	9.60	2.11	49.10	20.40	2.40	83.61	Sangat Baik
93	Sidenreng Rappang	9.60	2.40	37.40	20.40	2.40	72.20	Baik
94	Kabupaten Maluku Tenggara	6.40	2.40	49.10	15.18	2.40	75.48	Baik
95	Kabupaten Soppeng	4.48	2.40	54.95	15.18	2.40	79.41	Baik
96	Kabupaten Serang	8.32	2.10	49.10	15.18	2.40	77.10	Baik
97	Muna Barat	2.56	2.40	37.40	15.18	2.40	59.94	Cukup Baik
98	Kabupaten Tapin	2.56	2.11	37.40	15.18	2.40	59.65	Cukup Baik
99	Kabupaten Tegal	3.84	2.40	37.40	15.18	2.40	61.22	Baik
100	Kota Magelang	8.32	1.51	49.10	20.40	4.12	83.46	Sangat Baik
101	Kabupaten Seluma	6.40	2.40	54.95	20.40	2.40	86.55	Sangat Baik
102	Kabupaten Barru	1.92	2.40	54.95	15.18	2.40	76.85	Baik
103	Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir	3.84	2.40	43.25	15.18	2.40	67.07	Baik
104	Kabupaten Pinrang	3.84	2.40	54.95	20.40	2.40	83.99	Sangat Baik
105	Kabupaten Sambas	8.96	2.10	49.10	20.40	4.12	84.68	Sangat Baik
106	Kabupaten Ciamis	4.48	2.40	49.10	20.40	2.40	78.78	Baik
107	Kabupaten Belitung	7.68	2.40	49.10	20.40	2.40	81.98	Sangat Baik
108	Kota Banjarmasin	9.60	1.51	49.10	20.40	6.80	87.41	Sangat Baik
109	Kabupaten Lima Puluh Kota	8.96	2.40	43.25	20.40	4.12	79.14	Baik
110	Kabupaten Tana Toraja	6.40	2.11	49.10	20.40	2.40	80.41	Sangat Baik
111	Kabupaten Buton Utara	1.92	2.40	54.95	20.40	2.40	82.07	Sangat Baik



LAPORAN KINERJA TA.2023
DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI

No	Kab/Kota	Dimensi					Total Nilai Indeks	Kategori
		Pelaksanaan Fungsi	Kebijakan	Inovasi Peningkatan Kapasitas	Pemberdayaan Satlinmas	Sarpras Satlinmas		
		0.10	0.02	0.61	0.20	0.07		
112	Kota Bandar Lampung	7.05	2.40	37.40	15.18	2.40	64.43	Baik
113	Kepulauan Aru	1.92	2.40	43.25	15.18	4.12	66.88	Baik
114	Kabupaten Karangasem	2.56	2.40	43.25	20.40	4.12	72.74	Baik
115	Kabupaten Hulu Sungai Selatan	9.60	2.40	60.80	20.40	6.80	100.00	Sangat Baik
116	Kota Serang	1.92	2.11	54.95	15.18	4.12	78.29	Baik
117	Kota Mataram	9.60	1.51	49.10	20.40	4.12	84.74	Sangat Baik
118	Kabupaten Lombok Utara	7.04	2.40	49.10	15.18	4.12	77.85	Baik
119	Kabupaten Sumbawa	8.32	2.40	49.10	20.40	2.40	82.62	Sangat Baik
120	Kota Bontang	5.12	2.11	37.40	15.18	2.40	62.22	Baik
121	Kabupaten Malinau	2.56	2.11	54.95	15.18	2.40	77.20	Baik
122	Kabupaten Sumba Timur	1.92	2.11	37.40	15.18	2.40	59.01	Cukup Baik

D. Daftar Hasil Pengukuran Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Kebakaran Kategori Baik

NO	Kabupaten/Kota	Indikator						Nilai Akhir	Kategori
		Indikator Kelembagaan	Indikator Perencanaan Anggaran	Indikator Pemenuhan Capaian SPM	Indikator Pemenuhan Sarpras	Indikator Pemenuhan SDM tersertifikasi	Indikator Pemberdayaan Masyarakat		
1	Kab Kutai Kertanegara	15	20	20	3	5	5	69	BAIK
2	Kab Bengkulu Tengah	20	20	15	5	3	5	69	BAIK
3	Kota Bontang	20	20	20	3	5	15	84	SANGAT BAIK
4	Kota Pekanbaru	20	20	20	5	10	20	98	SANGAT BAIK
5	Kab Lombok Utara	20	20	20	3	3	5	72	BAIK
6	Kota Bengkulu	20	20	5	10	10	20	88	SANGAT BAIK
7	Kab Sumbawa	20	20	20	3	10	20	95	SANGAT BAIK
8	Kab Bengkulu	20	20	20	5	10	5	82	SANGAT BAIK
9	Kab Bengkulu Utara	15	20	20	3	3	5	66	BAIK
10	Kota Kendari	20	20	15	5	10	20	93	SANGAT BAIK



LAPORAN KINERJA TA.2023
DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI

NO	Kabupaten/Kota	Indikator						Nilai Akhir	Kategori
		Indikator Kelembagaan	Indikator Perencanaan Anggaran	Indikator Pemenuhan Capaian SPM	Indikator Pemenuhan Sarpras	Indikator Pemenuhan SDM tersertifikasi	Indikator Pemberdayaan Masyarakat		
11	Kab Bener Meriah	15	20	20	3	3	5	66	BAIK
12	Kota Banda Aceh	20	20	20	3	3	5	72	BAIK
13	Kab Bombana	15	20	20	3	5	5	69	BAIK
14	Kota Banjarmasin	20	20	15	3	10	20	90	SANGAT BAIK
15	Kab Cirebon	20	20	20	3	10	5	80	BAIK
16	Kota Medan	20	20	20	3	5	5	74	BAIK
17	Kota Semarang	20	20	20	3	10	5	80	BAIK
18	Kab Tanjung Jabung Barat	20	20	15	3	3	20	82	SANGAT BAIK
19	Kab Cilacap	15	20	20	3	10	5	74	BAIK
20	Kab Kendal	15	20	20	3	10	5	74	BAIK
21	Kab Penukal Abab Lematang Ilir	20	20	5	3	3	20	72	BAIK
22	Kab Gresik	20	20	20	3	5	20	89	SANGAT BAIK
23	Kab Natuna	20	20	20	3	3	5	71	BAIK
24	Kota Tangerang Selatan	20	20	20	10	5	20	97	SANGAT BAIK
25	Kab Bekasi	20	20	20	3	10	5	79	BAIK
26	Kab Empat Lawang	20	5	20	5	3	5	59	CUKUP
27	Kab Pesisir Selatan	15	5	5	3	3	5	36	KURANG BAIK
28	Kab Maros	15	20	15	3	3	5	62	BAIK
29	Provinsi DKI Jakarta	20	20	20	3	10	20	95	SANGAT BAIK
30	Kota Bukittinggi	20	20	20	3	10	20	95	SANGAT BAIK
31	Kab Ogan Komering Ulu Tlmur	15	5	20	3	10	5	59	CUKUP
32	Kab Kaur	20	20	20	3	3	5	71	BAIK
33	Kota Tanjung Pinang	20	5	20	3	5	20	75	BAIK
34	Kota Bengkulu	20	20	5	10	5	20	83	SANGAT BAIK
35	Kab Konawe Selatan	20	20	5	3	10	15	75	BAIK
36	Kab Indragiri Hilir	20	20	20	3	5	5	73	BAIK



LAPORAN KINERJA TA.2023
DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI

NO	Kabupaten/Kota	Indikator						Nilai Akhir	Kategori
		Indikator Kelembagaan	Indikator Perencanaan Anggaran	Indikator Pemenuhan Capaian SPM	Indikator Pemenuhan Sarpras	Indikator Pemenuhan SDM tersertifikasi	Indikator Pemberdayaan Masyarakat		
37	Kab Lebong	15	5	15	3	3	20	63	BAIK
38	Kab Kepahiang	15	20	20	3	5	5	68	BAIK
39	Kab Aceh Besar	15	5	20	3	10	20	75	BAIK
40	Kab Aceh Tengah	15	5	20	5	5	5	56	CUKUP
41	Kab Banjar	20	20	20	3	5	5	74	BAIK
42	Kab Konawe	15	20	15	3	3	5	61	BAIK
43	Kab Kulon Progo	15	20	20	3	3	5	66	BAIK
44	Kab Bima	20	20	20	3	3	5	72	BAIK
45	Kota Cilegon	20	20	15	3	10	5	74	BAIK
46	Kab Bangka Selatan	15	20	15	3	5	5	64	BAIK
47	Kab Kepulauan Anambas	20	5	5	3	3	20	57	CUKUP
48	Kab Merangin	20	15	20	3	10	5	74	BAIK
49	Kab Tebo	20	20	15	5	10	15	87	SANGAT BAIK
50	Kab Bogor	20	20	15	3	5	20	85	SANGAT BAIK
51	Kab Bone Bolango	15	20	20	3	3	5	66	BAIK
52	Kab Pohuwatu	15	20	5	3	3	5	52	CUKUP
53	Kab Halmahera Barat	15	20	5	3	3	5	51	CUKUP
54	Kab Halmahera Utara	15	5	5	3	3	5	36	KURANG BAIK
55	Kab Kerinci	15	20	20	10	3	5	74	BAIK
56	Kota Jambi	20	20	20	5	10	20	98	SANGAT BAIK
57	Kota Metro	20	20	20	3	3	5	71	BAIK
58	Kab Brebes	15	20	15	3	3	5	61	BAIK
59	Kab Aceh Barat Daya	15	20	20	3	3	15	77	BAIK
60	Kab Simeuleu	15	15	20	5	5	5	66	BAIK
61	Kab Aceh Timur	15	15	15	3	3	5	56	CUKUP
62	Kab Kampar	20	15	20	3	5	5	69	BAIK
63	Kab Kuantan Singingi	15	15	20	3	3	5	61	BAIK



LAPORAN KINERJA TA.2023
DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI

NO	Kabupaten/Kota	Indikator						Nilai Akhir	Kategori
		Indikator Kelembagaan	Indikator Perencanaan Anggaran	Indikator Pemenuhan Capaian SPM	Indikator Pemenuhan Sarpras	Indikator Pemenuhan SDM tersertifikasi	Indikator Pemberdayaan Masyarakat		
64	Kab Seluma	15	20	20	3	3	5	66	BAIK
65	Kab Ende	15	20	15	3	3	5	61	BAIK
66	Kab Sumbawa Barat	20	20	20	5	10	20	104	SANGAT BAIK
67	Kab Dompu	15	15	5	3	3	5	46	CUKUP
68	Kab Hulu Sungai Utara	15	15	20	10	10	20	93	SANGAT BAIK
69	Kab Tabalong	15	15	15	3	5	5	58	CUKUP
70	Kab Kotabaru	15	15	15	3	10	5	64	BAIK
71	Kab Tanah Laut	15	20	20	5	10	5	77	BAIK
72	Kab Tanah Bumbu	15	20	20	5	3	5	69	BAIK
73	Kab Kutai Timur	20	20	15	5	3	5	69	BAIK
74	Kab Mahakam Ulu	15	20	5	3	3	5	51	CUKUP
75	Kab Penajem Paser Utara	20	20	20	10	10	20	103	SANGAT BAIK
76	Kab Kolaka	15	20	20	3	3	5	66	BAIK
77	Kab Kolaka Timur	15	5	15	3	5	5	49	CUKUP
78	Kab Wakatobi	15	20	5	3	3	5	51	CUKUP
79	Kab Buton Tengah	15	20	5	3	3	5	51	CUKUP
80	Kota Subulussalam	15	5	5	10	3	20	60	CUKUP
81	Kota Langsa	15	20	20	10	3	5	74	BAIK
82	Kab Rokan Hulu	15	20	5	3	5	20	69	BAIK
83	Kota Bima	20	20	20	3	5	5	74	BAIK
84	Kota Balikpapan	15	20	20	10	10	20	98	SANGAT BAIK
85	Kab Aceh Tamiang	15	20	5	3	3	5	51	CUKUP
86	Kab Mandailing Natal	15	20	20	3	3	5	66	BAIK
87	Kab Lampung Barat	15	20	15	3	3	5	61	BAIK
88	Kab Pringsewu	15	20	20	3	5	15	79	BAIK
89	Kab Tulang Bawang	20	15	20	3	3	5	66	BAIK
90	Kab Musi Rawas	15	20	5	3	3	5	51	CUKUP



LAPORAN KINERJA TA.2023
DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI

NO	Kabupaten/Kota	Indikator						Nilai Akhir	Kategori
		Indikator Kelembagaan	Indikator Perencanaan Anggaran	Indikator Pemenuhan Capaian SPM	Indikator Pemenuhan Sarpras	Indikator Pemenuhan SDM tersertifikasi	Indikator Pemberdayaan Masyarakat		
91	Kab Sijunjung	15	20	20	5	5	15	81	SANGAT BAIK
92	Kab Lebak	15	20	15	3	3	5	61	BAIK
93	Kab Cianjur	15	20	20	3	5	5	68	BAIK
94	Kab Tegal	15	20	20	3	5	5	68	BAIK
95	Kab Tulungagung	15	15	15	3	3	5	56	CUKUP
96	Kab Badung	20	20	20	10	10	5	88	SANGAT BAIK
97	Kab Banggai	15	5	5	3	3	5	36	KURANG BAIK
98	Kab Luwu	20	20	20	3	10	20	95	SANGAT BAIK
99	Kota Sabang	15	15	15	3	5	5	59	CUKUP
100	Kab Tangerang	15	20	5	3	10	20	75	BAIK
101	Kab Morowali Utara	15	20	20	3	5	5	69	BAIK



LAPORAN KINERJA TA.2023
DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI

LAMPIRAN IKU 2: Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan

Daftar Kab/Kota dengan nilai Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan Kategori Baik

NO	Kabupaten/kota	Nilai Indeks Komposit					Nilai Akhir Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan	Kategori Nilai
		Indeks GWPP	Segmen Batas Terintegrasi Geospasial	Indeks Perkotaan	Perizinan Terintegrasi dan Terpadu	Indeks Kecamatan		
1	Kabupaten Aceh Besar	73.7	100	0	100	42	63	ITPK Baik
2	Kabupaten Aceh Selatan	73.7	100	0	100	15	58	ITPK Baik
3	Kabupaten Aceh Tengah	73.7	100	0	100	58	66	ITPK Baik
4	Kabupaten Aceh Timur	73.7	100	0	100	23	59	ITPK Baik
5	Kabupaten Gayo Lues	73.7	100	0	100	30	61	ITPK Baik
6	Kota Banda Aceh	73.7	100	0	100	51	65	ITPK Baik
7	Kota Langsa	73.7	100	0	100	10	57	ITPK Baik
8	Kota Sabang	73.7	100	0	100	45	64	ITPK Baik
9	Kabupaten Solok	90.11	100	0	100	0	58	ITPK Baik
10	Kabupaten Tanah Datar	90.11	100	0	100	0	58	ITPK Baik
11	Kabupaten Bengkalis	59.85	100	0	100	0	52	ITPK Baik
12	Kabupaten Rokan Hilir	59.85	100	0	100	0	52	ITPK Baik
13	Kota Dumai	59.85	100	0	100	0	52	ITPK Baik
14	Kota Pekanbaru	59.85	100	0	100	0	52	ITPK Baik
15	Kota Batam	45.96	100	10.58	100	0	51	ITPK Baik
16	Kabupaten Merangin	48.82	100	0	100	53	60	ITPK Baik
17	Kabupaten Sarolangun	48.82	100	0	100	54	61	ITPK Baik
18	Kota Jambi	48.82	100	0	100	73	64	ITPK Baik
19	Kota Sungai penuh	48.82	100	0	100	56	61	ITPK Baik
20	Kabupaten Bengkulu Selatan	54.77	100	0	100	0	51	ITPK Baik
21	Kabupaten Bengkulu Tengah	54.77	100	0	100	0	51	ITPK Baik
22	Kabupaten Bengkulu Utara	54.77	100	0	100	0	51	ITPK Baik
23	Kabupaten Kepahiang	54.77	100	0	100	0	51	ITPK Baik
24	Kabupaten Mukomuko	54.77	100	0	100	0	51	ITPK Baik
25	Kabupaten Seluma	54.77	100	0	100	0	51	ITPK Baik
26	Kota Bengkulu	54.77	100	0	100	0	51	ITPK Baik
27	Kabupaten Bangka	82.6	100	0	100	0	57	ITPK Baik
28	Kabupaten Bangka Tengah	82.6	100	13.24	100	0	59	ITPK Baik
29	Kabupaten Belitung	82.6	100	11.52	100	0	59	ITPK Baik



LAPORAN KINERJA TA.2023
DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI

NO	Kabupaten/kota	Nilai Indeks Komposit					Nilai Akhir Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan	Kategori Nilai
		Indeks GWPP	Segmen Batas Terintegrasi Geospasial	Indeks Perkotaan	Perizinan Terintegrasi dan Terpadu	Indeks Kecamatan		
30	Kota Pangkal Pinang	82.6	100	0	100	0	57	ITPK Baik
31	Kabupaten Lampung Barat	55.15	100	0	100	50	61	ITPK Baik
32	Kabupaten Lampung Selatan	55.15	100	0	100	58	63	ITPK Baik
33	Kabupaten Pesisir Barat	55.15	100	0	100	10	53	ITPK Baik
34	Kabupaten Tanggamus	55.15	100	0	100	41	59	ITPK Baik
35	Kabupaten Way Kanan	55.15	100	0	100	55	62	ITPK Baik
36	Kota Metro	55.15	100	0	100	46	60	ITPK Baik
37	Kabupaten Pandeglang	43.12	100	0	100	49	58	ITPK Baik
38	Kabupaten Tangerang	43.12	100	0	100	56	60	ITPK Baik
39	Kota Cilegon	43.12	100	0	100	49	58	ITPK Baik
40	Kota Serang	43.12	100	0	100	53	59	ITPK Baik
41	Kota Tangerang	43.12	100	0	100	53	59	ITPK Baik
42	Kota Tangerang Selatan	43.12	100	10.49	100	69	64	ITPK Baik
43	Kabupaten Bandung	90.02	100	0	100	0	58	ITPK Baik
44	Kabupaten Bandung Barat	90.02	100	0	100	0	58	ITPK Baik
45	Kabupaten Bekasi	90.02	100	0	100	0	58	ITPK Baik
46	Kabupaten Bogor	90.02	100	0	100	0	58	ITPK Baik
47	Kabupaten Garut	90.02	100	0	100	0	58	ITPK Baik
48	Kabupaten Kuningan	90.02	100	0	100	0	58	ITPK Baik
49	Kabupaten Purwakarta	90.02	100	0	100	0	58	ITPK Baik
50	Kabupaten Subang	90.02	100	0	100	0	58	ITPK Baik
51	Kabupaten Sumedang	90.02	100	0	100	0	58	ITPK Baik
52	Kota Bandung	90.02	100	0	100	0	58	ITPK Baik
53	Kota Banjar	90.02	100	0	100	0	58	ITPK Baik
54	Kota Bekasi	90.02	100	0	100	0	58	ITPK Baik
55	Kota Bogor	90.02	100	0	100	0	58	ITPK Baik
56	Kota Cimahi	90.02	100	0	100	0	58	ITPK Baik
57	Kota Cirebon	90.02	100	0	100	0	58	ITPK Baik
58	Kota Depok	90.02	100	0	100	0	58	ITPK Baik
59	Kota Sukabumi	90.02	100	0	100	0	58	ITPK Baik
60	Kabupaten Banjarnegara	69.77	100	0	100	0	54	ITPK Baik
61	Kabupaten Banyumas	69.77	100	35.23	100	0	61	ITPK Baik



LAPORAN KINERJA TA.2023
DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI

NO	Kabupaten/kota	Nilai Indeks Komposit					Nilai Akhir Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan	Kategori Nilai
		Indeks GWPP	Segmen Batas Terintegrasi Geospasial	Indeks Perkotaan	Perizinan Terintegrasi dan Terpadu	Indeks Kecamatan		
62	Kabupaten Boyolali	69.77	100	10.79	100	0	56	ITPK Baik
63	Kabupaten Brebes	69.77	100	0	100	0	54	ITPK Baik
64	Kabupaten Cilacap	69.77	100	25.3	100	0	59	ITPK Baik
65	Kabupaten Klaten	69.77	100	0	100	0	54	ITPK Baik
66	Kabupaten Magelang	69.77	100	0	100	0	54	ITPK Baik
67	Kabupaten Semarang	69.77	100	0	100	0	54	ITPK Baik
68	Kabupaten Sukoharjo	69.77	100	40.4	100	0	62	ITPK Baik
69	Kota Semarang	69.77	100	25.75	100	0	59	ITPK Baik
70	Kota Surakarta	69.77	100	11.3	100	0	56	ITPK Baik
71	Kota Tegal	69.77	100	0	100	0	54	ITPK Baik
72	Kabupaten Bantul	71.4	100	0	100	0	54	ITPK Baik
73	Kabupaten Gunungkidul	71.4	100	0	100	0	54	ITPK Baik
74	Kabupaten Kulon Progo	71.4	100	0	100	0	54	ITPK Baik
75	Kabupaten Sleman	71.4	100	0	100	0	54	ITPK Baik
76	Kota Yogyakarta	71.4	100	12.42	100	0	57	ITPK Baik
77	Kabupaten Trenggalek	24.44	100	31.66	100	0	51	ITPK Baik
78	Kabupaten Badung	57.72	100	0	100	62	64	ITPK Baik
79	Kabupaten Buleleng	57.72	100	0	100	51	62	ITPK Baik
80	Kabupaten Jembrana	57.72	100	0	100	66	65	ITPK Baik
81	Kabupaten Karangasem	57.72	100	18.51	100	60	67	ITPK Baik
82	Kabupaten Tabanan	57.72	100	0	100	55	63	ITPK Baik
83	Kota Denpasar	57.72	100	0	100	70	66	ITPK Baik
84	Kabupaten Lombok Timur	62.64	100	0	100	0	53	ITPK Baik
85	Kabupaten Lombok Utara	62.64	100	0	100	0	53	ITPK Baik
86	Kabupaten Sumbawa Barat	62.64	100	0	100	0	53	ITPK Baik
87	Kota Mataram	62.64	100	0	100	0	53	ITPK Baik
88	Kabupaten Belu	75.35	100	0	100	0	55	ITPK Baik
89	Kabupaten Kupang	75.35	100	0	100	0	55	ITPK Baik
90	Kabupaten Malaka	75.35	100	0	100	0	55	ITPK Baik
91	Kabupaten Manggarai	75.35	100	0	100	0	55	ITPK Baik
92	Kabupaten Manggarai Barat	75.35	100	0	100	0	55	ITPK Baik
93	Kabupaten Manggarai Timur	75.35	100	0	100	0	55	ITPK Baik



LAPORAN KINERJA TA.2023
DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI

NO	Kabupaten/kota	Nilai Indeks Komposit					Nilai Akhir Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan	Kategori Nilai
		Indeks GWPP	Segmen Batas Terintegrasi Geospasial	Indeks Perkotaan	Perizinan Terintegrasi dan Terpadu	Indeks Kecamatan		
94	Kabupaten Ngada	75.35	100	0	100	0	55	ITPK Baik
95	Kabupaten Sumba Timur	75.35	100	0	100	0	55	ITPK Baik
96	Kabupaten Timor Tengah Selatan	75.35	100	0	100	0	55	ITPK Baik
97	Kabupaten Timor Tengah Utara	75.35	100	0	100	0	55	ITPK Baik
98	Kota Kupang	75.35	100	0	100	0	55	ITPK Baik
99	Kabupaten Kapuas Hulu	79.21	100	0	100	0	56	ITPK Baik
100	Kabupaten Kubu Raya	79.21	100	0	100	0	56	ITPK Baik
101	Kabupaten Banjar	27.7	100	16.25	100	67	62	ITPK Baik
102	Kabupaten Tanah Bumbu	27.7	100	0	100	59	57	ITPK Baik
103	Kota Banjarbaru	27.7	100	0	100	71	60	ITPK Baik
104	Kota Banjarmasin	27.7	100	0	100	88	63	ITPK Baik
105	Kabupaten Katingan	70.03	100	0	100	0	54	ITPK Baik
106	Kota Palangka Raya	70.03	100	0	100	0	54	ITPK Baik
107	Kota Balikpapan	25.24	100	0	100	70	59	ITPK Baik
108	Kota Bontang	25.24	100	0	100	60	57	ITPK Baik
109	Kota Samarinda	25.24	100	0	100	52	55	ITPK Baik
110	Kota Tarakan	77.23	100	0	100	0	55	ITPK Baik
111	Kabupaten Gorontalo	57.98	100	0	100	0	52	ITPK Baik
112	Kabupaten Gorontalo Utara	57.98	100	0	100	0	52	ITPK Baik
113	Kabupaten Pohuwato	57.98	100	0	100	0	52	ITPK Baik
114	Kota Gorontalo	57.98	100	0	100	0	52	ITPK Baik
115	Kabupaten Majene	62.91	40	0	100	52	51	ITPK Baik
116	Kabupaten Mamuju	62.91	40	0	100	51	51	ITPK Baik
117	Kabupaten Kolaka	51.38	100	0	100	37	58	ITPK Baik
118	Kabupaten Wakatobi	51.38	100	0	100	39	58	ITPK Baik
119	Kota Bau-Bau	51.38	40	0	100	63	51	ITPK Baik
120	Kabupaten Banggai	59.91	100	0	100	0	52	ITPK Baik
121	Kabupaten Morowali	59.91	100	0	100	0	52	ITPK Baik
122	Kabupaten Morowali Utara	59.91	100	0	100	0	52	ITPK Baik
123	Kabupaten Parigi Moutong	59.91	100	0	100	0	52	ITPK Baik
124	Kabupaten Sigi	59.91	100	0	100	0	52	ITPK Baik



LAPORAN KINERJA TA.2023
DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI

NO	Kabupaten/kota	Nilai Indeks Komposit					Nilai Akhir Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan	Kategori Nilai
		Indeks GWPP	Segmen Batas Terintegrasi Geospasial	Indeks Perkotaan	Perizinan Terintegrasi dan Terpadu	Indeks Kecamatan		
125	Kota Palu	59.91	100	0	100	0	52	ITPK Baik
126	Kabupaten Minahasa	79.4	100	0	100	0	56	ITPK Baik
127	Kabupaten Minahasa Selatan	79.4	100	0	100	0	56	ITPK Baik
128	Kabupaten Minahasa Utara	79.4	100	0	100	0	56	ITPK Baik
129	Kota Bitung	79.4	100	0	100	0	56	ITPK Baik
130	Kota Kotamobagu	79.4	100	0	100	0	56	ITPK Baik
131	Kota Manado	79.4	100	0	100	0	56	ITPK Baik
132	Kota Tomohon	79.4	100	0	100	0	56	ITPK Baik
133	Kabupaten Kepulauan Aru	78.6	100	0	100	40	64	ITPK Baik
134	Kabupaten Maluku Tengah	78.6	100	0	100	51	66	ITPK Baik
135	Kabupaten Maluku Tenggara	78.6	100	0	100	60	68	ITPK Baik
136	Kota Ambon	78.6	100	0	100	47	65	ITPK Baik
137	Kota Tual	78.6	100	0	100	45	65	ITPK Baik
138	Kabupaten Maybrat	55.92	100	0	100	0	51	ITPK Baik
139	Kabupaten Sorong	55.92	100	0	100	0	51	ITPK Baik
140	Kota Sorong	55.92	100	0	100	0	51	ITPK Baik